

LAPORAN KINERJA INTERIM

**Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandung**

TRIWULAN II

2025



KATA PENGANTAR

Kepala Balai Besar POM di Bandung

**“Balai Besar
Pengawas Obat dan
Makanan di
Bandung selaku
Unit Pelaksana
Teknis di
Lingkungan Badan
POM RI senantiasa
selalu berkomitmen
menjamin mutu
Obat dan Makanan
yang beredar di
masvarakat”**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 dapat diselesaikan. Tahun 2025, merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029. Pada tahun 2025, terjadi beberapa isu strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Balai Besar POM di Bandung. Namun, hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan tetapi dijadikan sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka “menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat”.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Triwulan II tahun 2025 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Interim Triwulan II Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 ini. LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842), serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TRIWULAN II TAHUN 2025

LAPKIN Interim Triwulan II Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 disusun pada akhir Triwulan II pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua tujuan utama yaitu (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai.

Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada pemberi mandat dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan POM serta Balai Besar POM di Bandung di triwulan berikutnya.

Bandung, 18 Juli 2025

Kepala Balai Besar POM di Bandung,



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar
	Daftar Isi
	Ringkasan /Ikhtisar Eksekutif
	Highlight Kinerja
	<hr/>
BAB I Pendahuluan	1.1 Latar Belakang
	1.2 Gambaran Umum Organisasi
	1.3 Struktur Organisasi
	1.4 Isu Strategis
	<hr/>
BAB II Perencanaan Kinerja	2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2025-2029
	2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
	2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
	2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025
	2.5 Metode Pengukuran
	<hr/>
BAB III Akuntabilitas Kinerja	3.1 Capaian Kinerja Organisasi
	3.1.1 Sasaran Kegiatan Ke-1: Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
	3.1.2 Sasaran KegiatanKe-2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
	3.1.3 Sasaran KegiatanKe-3: Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
	3.1.4 Sasaran KegiatanKe-4: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
	3.1.5 Sasaran KegiatanKe-5: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
	3.1.6 Sasaran KegiatanKe-6: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

- 3.1.7 Sasaran KegiatanKe-7: Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif
 - 3.1.8 Sasaran KegiatanKe-8: Layanan Publik UPT yang Prima
 - 3.1.9 Sasaran KegiatanKe-9: Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal
 - 3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi
 - 3.3 Realisasi Anggaran
-

BAB IV Penutup

- 4.1 Kesimpulan
 - 4.2 Saran
-

Lampiran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama Triwulan II tahun 2025. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung selama triwulan I tahun 2025 yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di triwulan berikutnya.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BBPOM di Bandung dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BBPOM di Bandung bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BBPOM di Bandung berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko

kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.



Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di Bandung dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025, telah ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Bandung.

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Bandung yang telah ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2025. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2025. Pada sasaran kegiatan kesatu yaitu **"Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Jawa Barat"** diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori Tidak dapat disimpulkan sebanyak 6 (enam) indikator, yaitu Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 111.41%, Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 113.01%, Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 117,34%, Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 124.46%, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 114.55%, dan Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 118.88%. 3 (tiga) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 102.41%, Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 108.32%, dan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 104.48%. 1 (satu) indikator belum terdapat realisasi yaitu Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebesar 0,00% karena belum ada sampel KLB, Serta 1 (satu) indikator dihitung pada akhir tahun yaitu Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Sasaran kegiatan kedua yaitu **"Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi"** diperoleh capaian 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik, yaitu Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 101.00%.

Sasaran kegiatan ketiga yaitu **"Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Jawa Barat"** diperoleh capaian 1 (satu) Indikator dengan kategori Sangat Baik, yaitu Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 103.75%.

Sasaran kegiatan keempat yaitu **"Meningkatnya efektivitas KIE di Jawa Barat"** diperoleh capaian 2 (dua) indikator dengan kategori Tidak dapat disimpulkan yaitu Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 125.00% dan Jumlah desa

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

pangan aman sebesar 135.71%. 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung sebesar 100.13%. Dan 1 (satu) indikator dengan kategori Baik yaitu Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 100,00%.

Sasaran kegiatan kelima yaitu **"Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu"** diperoleh capaian 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik, yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sebesar 109.45%.

Sasaran kegiatan keenam yaitu **"Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT"** diperoleh capaian 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT sebesar 102.43%.

Sasaran kegiatan ketujuh yaitu **"Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif"** diperoleh capaian 1 (satu) indikator dengan kategori Baik yaitu Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung sebesar 100,00%.

Sasaran kegiatan kedelapan yaitu **"Layanan Publik BBPOM di Bandung yang Prima"** diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT diukur pada akhir tahun.

Sasaran kegiatan kesembilan yaitu **"Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Bandung yang Optimal"** diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung, Nilai AKIP Balai Besar di Bandung, Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung, dan Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung yang diukur pada akhir tahun.

Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Bandung memperoleh anggaran sebesar Rp66.390.943.000,- dengan pagu dikurangi Blokir sebesar Rp36.886.313.000,-. Realisasi anggaran pada Triwulan II tahun 2025 dengan presentase 35.93% yaitu sebesar Rp13.253.700.010,-. Dari Indikator Kinerja yang telah dilaksanakan diperoleh tingkat efisiensi tertinggi, yaitu Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM. Sedangkan tingkat efisiensi terendah adalah pada Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TRIWULAN II TAHUN 2025

Kegiatan BBPOM di Bandung yang dilakukan selama Triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan dengan Tidak Efisien karena adanya Efisiensi Anggaran. Meskipun demikian pada triwulan berikutnya di tahun 2025 akan terus ditingkatkan sesuai dengan pedoman Renstra Balai Besar POM tahun 2025-2029.

HIGHLIGHT KINERJA

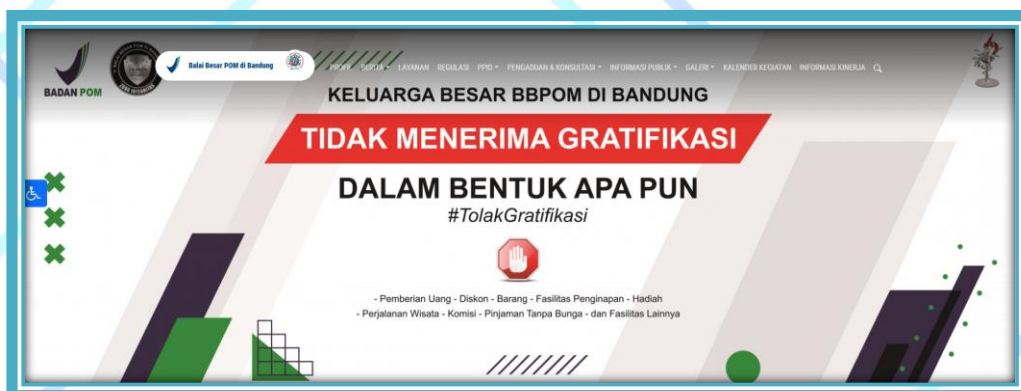
1. Balai Besar POM di Bandung telah mendapatkan Sertifikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tanggal 20 Desember 2021 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

2. Sebagai Upaya pemberantasan Korupsi, Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 sesuai dengan Surat Rekomendasi Sucofindo International Certification Service Nomor. 5932/SERCO-XI/VP/2024 tanggal 20 November 2024. Selain itu Balai Besar POM di Bandung juga secara aktif memberikan informasi Anti Korupsi melalui Media Sosial dan Subsite Balai Besar POM di Bandung.





LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

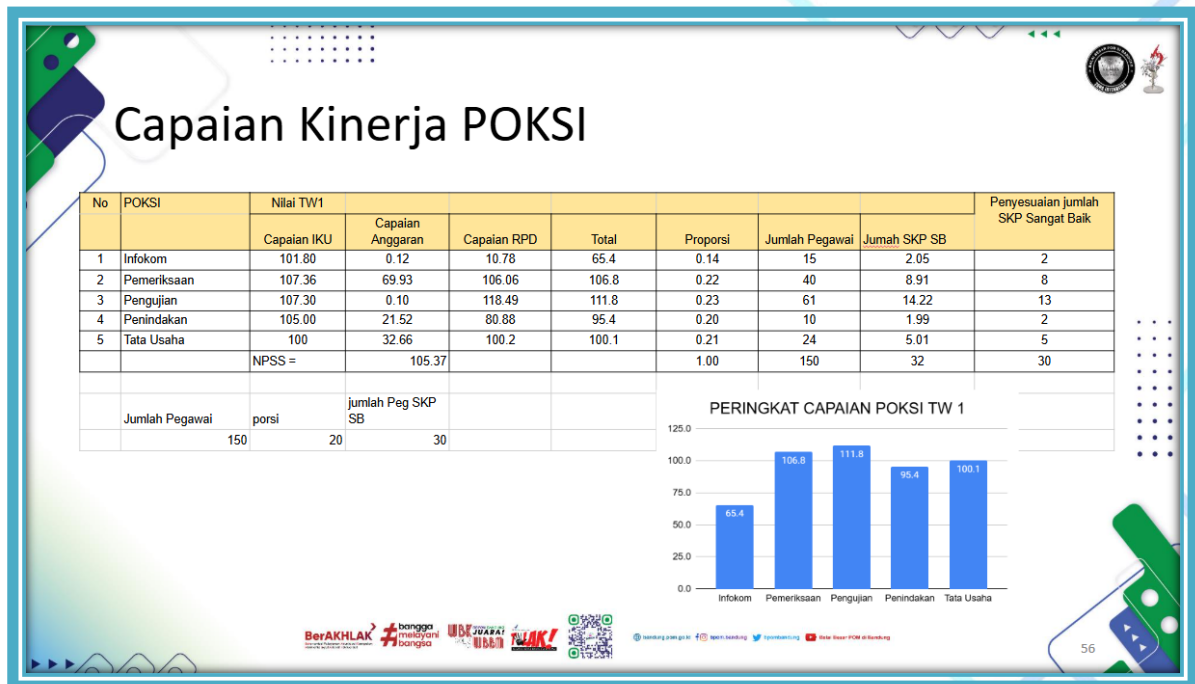
3. Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 pada Balai Besar POM di Bandung Nomor B.PI.06.06.7.11.24.642 tanggal 28 November 2024, Nilai PMP ZI BBPOM di Bandung adalah 91,24 sehingga dapat diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM.

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	Komponen Pengungkit	60,00				
	I. Manajemen Perubahan	8,00	3,54	4,00	7,54	MS
	II. Penataan Tatalaksana	7,00	3,13	2,50	5,63	MS
	III. Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,45	5,00	9,45	MS
	IV. Penguatan Akuntabilitas	10,00	5,00	4,45	9,45	MS
	V. Penguatan Pengawasan	15,00	6,82	7,50	14,32	MS
	VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,96	4,59	9,55	MS
TOTAL PENGUNGKIT					55,92	
B.	Komponen Hasil	40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel		22,50		
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)		17,50	16,89	
		2. Capaian Kinerja lebih baik		5,00	2,50	
		II.		Pelayanan Publik yang Prima	17,50	
Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50		15,93			
TOTAL HASIL					35,31	
NILAI PMPZI					91,24	

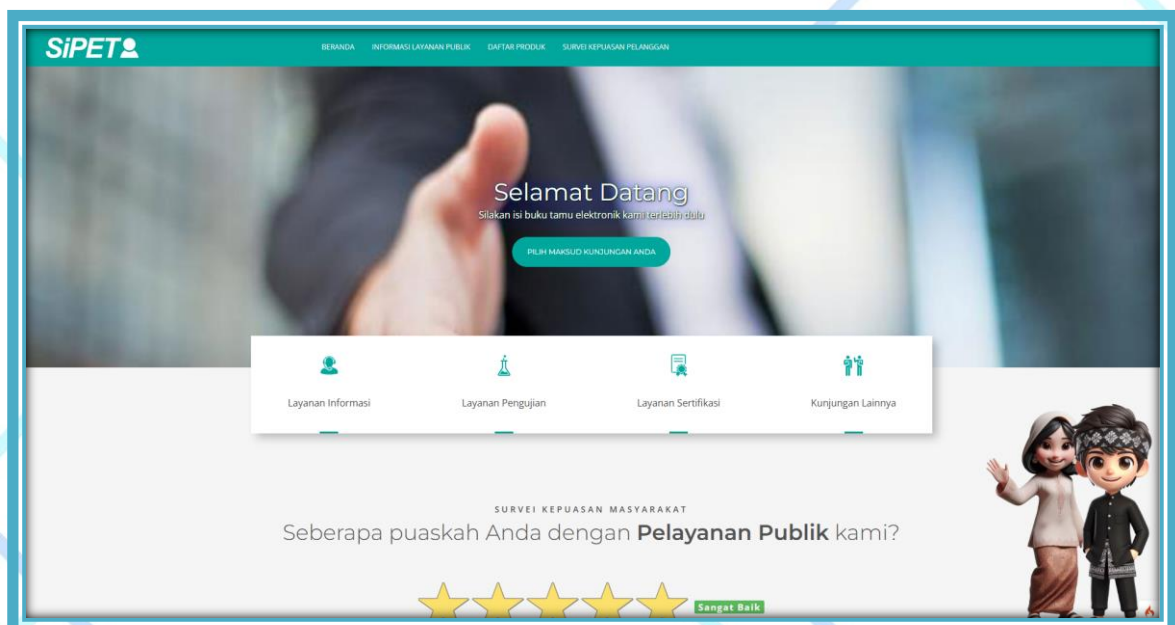
4. Balai Besar POM di Bandung telah membuat Inovasi dalam Pengelolaan Kinerja melalui Google Site Manajemen Kinerja BBPOM di Bandung sebagai aplikasi untuk pengelolaan kinerja BBPOM di Bandung mulai dari perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, sampai dengan pengelolaan Anggaran.



5. Balai Besar POM di Bandung telah membuat inovasi penerapan Reward and Punishment pengukuran kinerja Pegawai untuk menentukan proporsi predikat kinerja Pegawai sesuai dengan tugas dan tanggungjawab setiap pegawai.

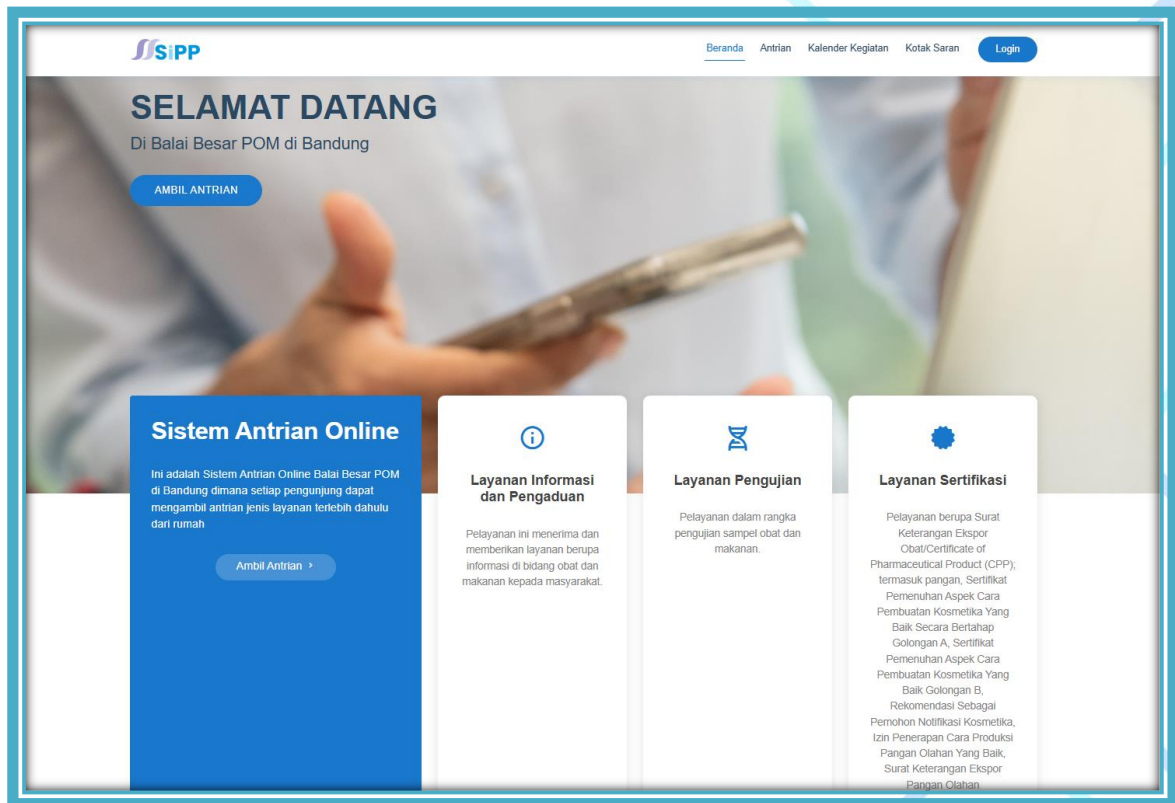


6. Sebagai Upaya meningkatkan Pelayanan Publik BBPOM di Bandung membuat aplikasi pencatatan buku tamu berbasis elektronik berupa SIPETA untuk Layanan di ULPK BBPOM di Bandung.

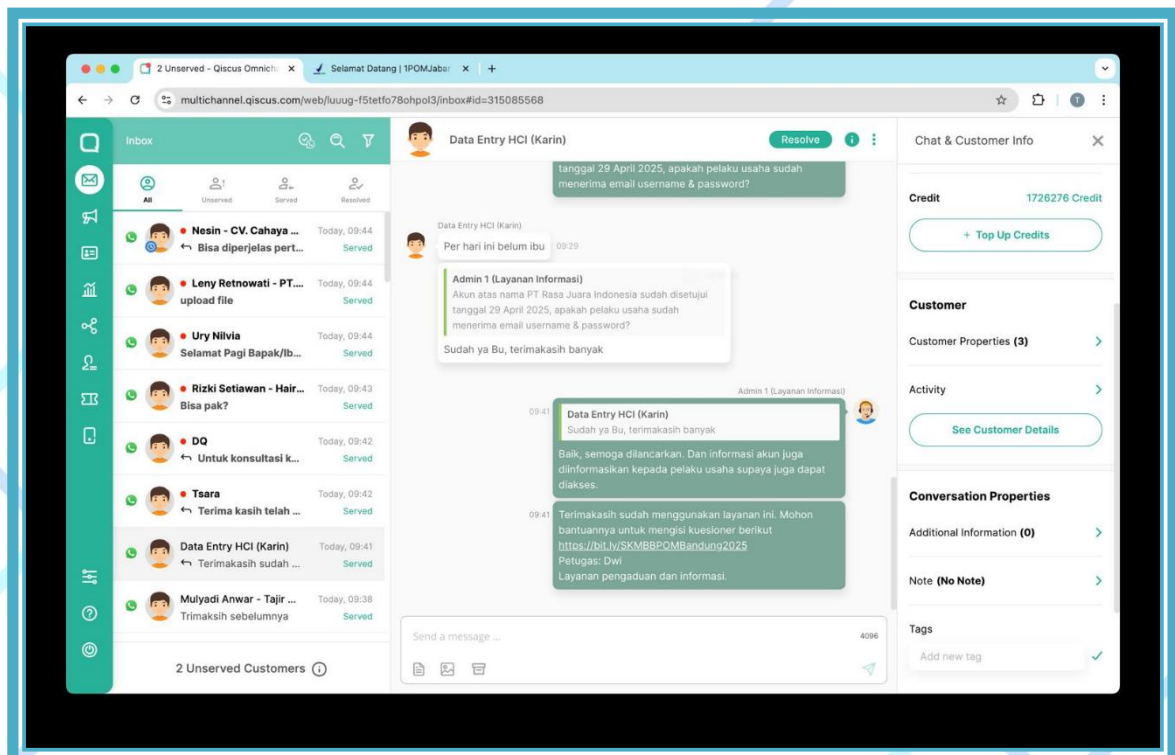


LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TRIWULAN II TAHUN 2025

7. Sebagai Upaya meningkatkan pelayanan publik BBPOM di Bandung hadir pada setiap Mall Pelayanan Publik (MPP) pada beberapa Kota/Kabupaten di Jawa Barat dan menerapkan sistem Antrian Online untuk pendataan Pelanggan di MPP.

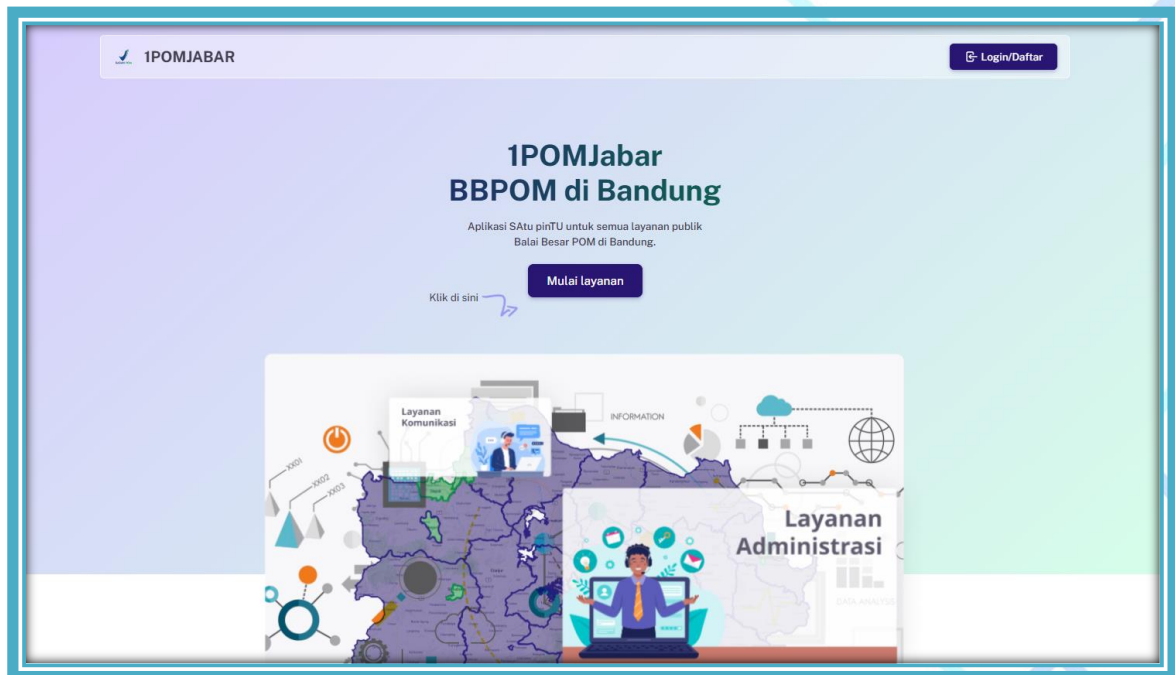


8. Layanan Online BBPOM di Bandung melalui aplikasi Whatsapp satu nomor 08119900533 untuk memudahkan pelanggan mendapatkan informasi di BBPOM di Bandung.

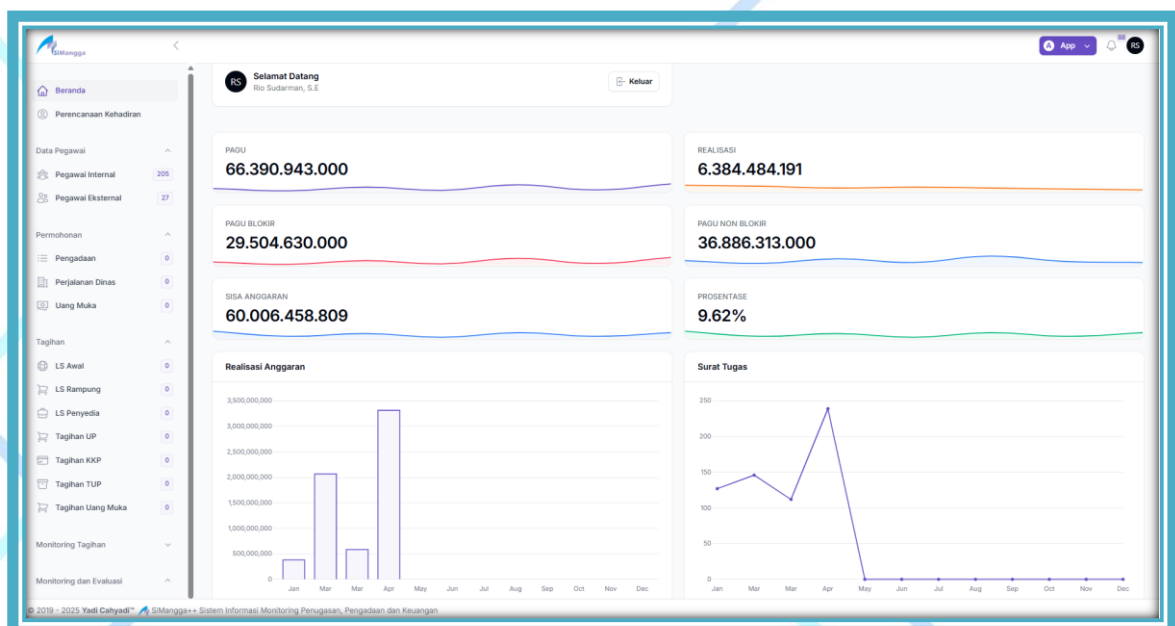


LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TRIWULAN II TAHUN 2025

9. Balai Besar POM di Bandung telah membuat aplikasi Satu POM Jabar yang menjadi Layanan satu pintu BBPOM di Bandung untuk menjangkau seluruh pelanggan dan sarana dalam pengawasan obat dan makanan.



10. Dalam pengelolaan Keuangan yang akuntabel, Balai Besar POM di Bandung telah membuat aplikasi Simangga (Sistem Informasi Monitoring Penugasan, Pengadaan dan Keuangan) untuk mempermudah proses pengadaan dan Keuangan di BBPOM di Bandung sejak Tahun 2019 sehingga proses pertanggungjawaban lebih akuntabel, efektif, dan efisien.



11. Balai Besar POM di Bandung menggelar pendampingan UMKM melalui program Prabu UMKM Juara sebagai Upaya untuk memfasilitasi UMKM Obat dan Makanan di Jawa Barat mendapatkan pendampingan dan izin edar.



LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

12. Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sesuai dengan Sertifikat No. QSC 01806 dari Sucofindo International Certification Service yang berlaku dari tanggal 18 November 2024 hingga 17 November 2027.



LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

13. Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan ISO 17025:2017 Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi sesuai dengan Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional Nomor LP-173-IDN yang berlaku dari tanggal 3 Januari 2022 hingga 5 September 2026.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Isu Strategis

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung bulan April s.d. Juni atau Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan II Tahun 2025 dan tahun pertama dari Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025-2029 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja Interim ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai Besar POM di Bandung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842), serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 6 (enam) tahun kedepan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, antara lain : 1) aspek kesehatan-penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans, dalam rangka mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif; 2) aspek sosial-perubahan demografi dan epidemiologi yang meningkatkan tren kebutuhan masyarakat dalam penggunaan produk sediaan farmasi dan pangan olahan serta perubahan pola penyakit, yang memerlukan respon cepat, efektif dan efisien; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan, dengan meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan, sehingga dapat menghasilkan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan bermanfaat yang dapat bersaing dalam dinamika pasar yang dinamis; 4) aspek keamanan nasional - meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, terutama pelanggaran di media online/e-commerce dan kejahatan siber, termasuk bioterorisme; 5) aspek teknologi-perkembangan teknologi yang akseleratif khususnya dibidang bioteknologi dan nanoteknologi yang memberikan paradigma baru dan

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2025

melakukan inovasi pengembangan produk baru, yang memerlukan peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi terutama untuk menjamin keamanan produk yang beredar; dan 6) aspek lingkungan - Isu lingkungan dan keberlanjutan mendorong tuntutan pasar agar produk yang produksi dan diedarkan ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga diperlukan adanya perubahan regulasi, standar dan persyaratan dalam pengawasannya.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagai tindak lanjut, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional

LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TRIWULAN III TAHUN 2025

tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM sebanyak 21 (dua puluh satu); b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM sebanyak 21 (dua puluh satu); dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM sebanyak 34 (tiga puluh empat).

KEDUDUKAN

UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023, Balai Besar POM di Bandung mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2025

- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

TABEL 1.1
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
BBPOM di Bandung	Alamat Jl. Pasteur No. 25 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung	1. Kota Bandung 2. Kabupaten Subang 3. Kabupaten Cianjur 4. Kabupaten Garut 5. Kabupaten Bandung Barat 6. Kabupaten Majalengka 7. Kabupaten Sumedang 8. Kabupaten Bandung 9. Kabupaten Karawang 10. Kota Bekasi 11. Kabupaten Bekasi 12. Kabupaten Sukabumi 13. Kota Cimahi 14. Kota Sukabumi 15. Kabupaten Purwakarta 16. Kabupaten Cirebon 17. Kota Cirebon, 18. Kabupaten Indramayu 19. Kabupaten Kuningan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023.



Gambar 1.1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Bandung

1.4 ISU STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada tahun kerja 2025 maka muncul beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja, antara lain:

ISU INTERNAL

Tatakelola Regulasi, Organisasi dan Pelayanan Publik

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Dalam rangka untuk memperkuat peran regulasi dan pengawasan, diperlukan peningkatan status Organisasi BPOM menjadi setingkat kementerian. Serta melakukan penyelarasan kewenangan/fragmentasi kebijakan antar lembaga, agar tidak tumpang tindih yang menyebabkan Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal.

Implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengendalian intern untuk efisiensi dan akuntabilitas tata kelola bbpom di bandung, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, dan transparansi serta partisipasi publik dalam pengawasan obat dan makanan.

Tatakelola Sumberdaya Manusia

Balai Besar POM di Bandung memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan, dengan jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis, penguatan budaya organisasi dan core value BerAKHLAK, serta penerapan kode etik dan disiplin ASN, untuk meningkatkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Tatakelola Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional.

Luas lahan Balai Besar POM di Bandung seluas 4.268 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 5.686 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana adalah 78,1% yang terdiri dari pemenuhan alat laboratorium 61,7% dan pemenuhan sarana prasarana kerja 94,6%, sehingga masih diperlukan tambahan untuk penambahan alat laboratorium.

Tatakelola sarana prasarana dilakukan dengan digitalisasi dan optimalisasi Pengelolaan BMN untuk Efisiensi Anggaran, efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa melalui optimalisasi Produk Dalam Negeri (PDN), digitalisasi dan modernisasi Kearsipan untuk mengurangi biaya operasional, dan efisiensi pemenuhan sarana dan prasarana untuk optimalisasi kinerja BBPOM di Bandung

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium Balai Besar POM di Bandung telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-173-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu, laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar

LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TRIWULAN III TAHUN 2025

pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai Besar POM di Bandung, masih terdapat gap sehingga pengadaan peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2023, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 62,4%.

Regionalisasi Laboratorium

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mendukung daya saing produk obat dan makanan maka pada tahun 2023 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru yaitu 'Regionalisasi Laboratorium'. Setiap BB/Balai POM telah memiliki laboratorium pengujian kimia untuk obat dan nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan, serta pengujian biologi. Beberapa laboratorium telah dilengkapi instrument dengan teknologi tinggi, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Beberapa BB/Balai POM memiliki fasilitas uji sterilitas dan atau fasilitas uji DNA, sehingga menjadi Balai unggulan BPOM untuk uji sterilitas dan uji DNA. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laboratorium pengujian. Regionalisasi laboratorium dikelompokkan ke dalam tujuh region. Balai Besar POM di Bandung masuk ke dalam Region 3 dengan Koordinator BBPOM di DKI Jakarta, dan anggota terdiri dari BBPOM di Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Serang. Manfaat dari sistem manajemen regionalisasi laboratorium ini adalah efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan lain-lain, serta mengurangi timeline pengujian atau waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

ISU EKSTERNAL

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional RPJMN 2025-2029 di Bidang Kesehatan

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2025

penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:

- a. Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik
- b. Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususnya mendukung melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi

Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:

- a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan
- b. tingkat maturitas
- c. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar
- d. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan
- e. masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
- f. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2025

- g. Pengembangan jejaring laboratorium POM
 - h. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan
 - i. farmasi dan pangan olahan sesuai standar
 - j. g. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan I RTP
 - k. h. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
 - a. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai
 - l. Standar kemampuan Laboratorium
 - m. j. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi
 - n. standar kompetensi
 - o. k. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)
 - p. l. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka
 - q. pelaporan KTD/ESO
 - r. m. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan
 - s. Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
 - t. n. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
 - u. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
 - v. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar
 - w. Penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi
3. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan

Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan Data dan Informasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (traceability) dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan.

BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagipakaikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM Command Center untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2025

Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2025

Implementasi Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 bertujuan untuk mengendalikan dan mengoptimalkan belanja negara dan daerah agar lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan program-program prioritas yang lebih produktif dalam mencapai tujuan nasional.

Sebagaimana Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025, semua kementerian dan Lembaga termasuk BPOM diminta untuk melakukan langkah-langkah pelaksanaan anggaran sebagai berikut:

1. Melakukan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Penyusunan Rencana Program/Kegiatan Pada Awal Tahun Anggaran
 - b. Meningkatkan Kualitas Reviu Anggaran dan Melakukan Optimalisasi Revisi Anggaran
 - c. Melakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Belanja Pemerintah Daerah (Transfer Ke Daerah) sesuai Bidang dan Lingkup Kerja Kementerian/Lembaga Masing-Masing
2. Melakukan Peningkatan Pelaksanaan Anggaran Belanja yang Berkualitas (Spending Better), dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
 - b. Melakukan Akselerasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek
 - c. Meningkatkan Kualitas Belanja Melalui Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja (Value For Money),
 - d. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Bersumber dari Dana PHLN dan SBSN,
3. Melakukan Akselerasi Program/Kegiatan Pemerintahan Baru, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan Akselerasi Operasionalisasi dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga Baru Terdampak Transisi Kabinet Merah Putih (KMP),
 - b. Memprioritaskan pencapaian program ASTA CITA dan Quick Wins Presiden RI,
4. Melakukan Peningkatan Akuntabilitas Proses Pelaksanaan Anggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran

- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal
- c. Meningkatkan Kualitas dan Validitas Capaian Output Serta Pelaporannya

Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri

Pasar produk obat dan makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi BPOM untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya.

Di tengah pertumbuhan pasar ini, BPOM berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BPOM kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional.

Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BPOM dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan obat dan makanan. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri

LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TRIWULAN III TAHUN 2025

yang terus berubah dengan cepat. Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional.

AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Kolaborasi dengan stakeholders

Peluang BPOM untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi internasional, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BPOM dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini.

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2025

Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan, sementara kolaborasi dengan lembaga internasional dapat membantu BPOM menyelaraskan regulasinya dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan BPOM, termasuk advokasi untuk peraturan yang lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam obat dan makanan, atau kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan makanan dalam negeri. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi BPOM untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra global. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BPOM untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

Peningkatan kesadaran masyarakat

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BPOM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BPOM dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat

dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BPOM untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan Indonesia beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BPOM dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh BPOM memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi internasional dan daya saing pasar ekspor produk Indonesia, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan

Inovasi produk dan layanan kesehatan membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, bahan kosmetik baru dan teknologi sediaan kosmetik dan makanan fungsional, BPOM berada dalam keunggulan strategis untuk memimpin dalam pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Hal ini termasuk pembuatan kerangka kerja regulasi yang mendukung penelitian dan pengembangan produk baru dan memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan efikasi yang ketat. Melalui kolaborasi dengan peneliti, industri, dan lembaga internasional, BPOM dapat memfasilitasi inovasi yang berkelanjutan dalam sektor kesehatan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan produk kesehatan baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, mengingat juga masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandung. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015- 2019) menunjukkan tren penurunan terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada tahun 2015 jumlah sampel garam yang TMS sebesar 85% dan hingga tahun 2017 menjadi 81,62%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 54,82%. Sedangkan hasil pengawasan tepung terigu dan minyak goreng sawit dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015- 2019) menunjukkan relatif semua sampel yang diuji memenuhi syarat (MS).

Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan.

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2025

Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya yaitu pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Bandung melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

**2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
(RAPK)**

2.5 Metode Pengukuran

2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Rencana strategis BPOM Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 serta dengan memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, diseluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2025-2029 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai *impact assessment*.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa

pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Visi pembangunan nasional Indonesia 2025-2029 adalah: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesi Emas 2045.

Dalam RPJPN 2025-2045 Tahap Pertama yaitu RPJMN 2025-2029, fokusnya adalah Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Etologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana, serta Kesiambungan Pembangunan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka Balai Besar POM di Bandung telah menetapkan Visi 2025-2029 yaitu: -

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Penjelasan Visi:

Visi ini mencerminkan dedikasi Balai Besar POM di Bandung dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional..

Visi Balai Besar POM di Bandung untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama Besar POM di Bandung. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: Besar POM di Bandung berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar

memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: Besar POM di Bandung mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya Besar POM di Bandung adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan Besar POM di Bandung menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). Besar POM di Bandung berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi Besar POM di Bandung untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen Besar POM di Bandung dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BBPOM di Bandung telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi-misi ini disusun dengan memperhatikan misi Badan POM, yang telah mendukung Asta Cita Misi Presiden. Misi BBPOM di Bandung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan
5. pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandung disusun dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta memperhatikan kondisi tantangan dan peluang masa depan serta sumber daya yang dimiliki. Sasaran Kegiatan ini juga sejalan dan memperkuat sasaran strategis BPOM untuk periode 2025 - 2029, dan secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Jawa Barat:

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BBPOM di Bandung dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar, serta pada kejadian Kejadian Luar Biasa keracunan pangan. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis, peningkatan infrastruktur dan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas laboratorium untuk menguatkan pengawasan proaktif, yang lebih responsif dan efektif. Selain itu, juga menguatkan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan kejadian yang tidak diinginkan dari konsumsi produk sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga dapat meningkatkan respon perlindungan masyarakat dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kejadian emerging disease. Sasaran kegiatan juga difokuskan untuk meningkatkan kepatuhan dari para pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan dan ketentuan regulasi yang berlaku. Kegiatan ini juga dapat memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga yang dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang

konduktif dan berdaya saing, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil. Sasaran kegiatan ini juga difokuskan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dengan memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar adalah produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat, melalui kegiatan pemeriksaan yang efektif dan menyeluruh mulai dari sebelum produk diedarkan, pada saat proses produksi dan setelah produk diedarkan melalui jalur distribusi yang sesuai ketentuan. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi serta otomatisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat menguatkan sistem pemeriksaan yang efektif, responsive dan menyeluruh.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan peran aktif BBPOM di Bandung mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting, terutama di wilayah Jawa Barat. Pengawasan pangan fortifikasi ini merupakan upaya untuk memastikan keamanan dan mutu pangan yang ditambahkan zat gizi tertentu, sehingga dapat meningkatkan kualitas pangan, meningkatkan status gizi masyarakat, dan menurunkan angka stunting.

3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Jawa Barat

Sasaran kegiatan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BBPOM di Bandung sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BBPOM di Bandung berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

4. Meningkatnya efektivitas KIE di Jawa Barat

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BBPOM di Bandung berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif,

dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan BBPOM di Bandung dalam mendeteksi, menemukan dan menindak tegas pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Peningkatan kegiatan penegakan hukum dan pemberian sanksi yang berat diharapkan dapat mengurangi kejadian kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi peningkatan koordinasi dan advokasi dengan Integrated Criminal Justice System (ICJS) merupakan bagian yang penting meningkatkan kesepahaman bahwa kejahatan bidang sediaan farmasi dan pangan olahan adalah kejahatan kemanusiaan, sehingga dapat meningkatkan kolaborasi dalam menurunkan tingkat kejahatan tersebut.

7. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

8. Layanan Publik BBPOM di Bandung yang Prima

Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BBPOM di Bandung kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

9. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Bandung yang Optimal

Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk membangun BBPOM di Bandung sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, BBPOM di Bandung menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reviu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel 2.1.1 berikut:

TABEL 2.1.1

SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2025-2029

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)				
	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					
1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	88.00	89.75	91.50	93.25
2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	27	28	29	30
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	91	93
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	100	100	100	100
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	90	91	93	94

8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	83	85	87	90
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	93.00	94.25	95.50	96.75
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	85.68	88.08	90.48	92.28
SK 2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi					
12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	63	68	71	75
SK 3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					
13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7	85.8	89.5	91.2	92.7
SK 4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT					
14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94	87.81	88.68	89.55	90.42
15. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	20	23	24	26
16. Jumlah desa pangan aman	6	10	10	10	10
17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	3	3	5	5

SK 5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu					
18.Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0
SK 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					
19.Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72	74	76	78	80
SK 7. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif					
20.Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90	91	92	93	94
SK 8. Layanan Publik UPT yang Prima					
21.Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
SK 9. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel					
22.Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91,5	91,75	92,0	92,25	92,50
23.Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83,10	83,25	83,40	83,55	83,70
24.Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5	5	5	5	5
25.Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95	3	3.05	3.1	3.15

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2025 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.8A.09.24.605 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 berikut:

TABEL 2.2.1

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BBPOM DI BANDUNG TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25
		2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57
3.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94
		15. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17
		16. Jumlah desa pangan aman	6
		17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos	85.0

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72
7.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90
8.	Layanan Publik UPT yang Prima	21. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70
9.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91,5
		22. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83,10
		23. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5
		24. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan RKT Tahun 2025 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp. 66.390.943.000,-.

Pada tanggal 2 Desember 2024 ditetapkan DIPA Balai Besar POM di Bandung menjadi Rp. 66.390.943.000,-.

TABEL 2.3.1

PERJANJIAN KINERJA BBPOM DI BANDUNG

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25
		2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57
3.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94
		15. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17
		16. Jumlah desa pangan aman	6
		17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos	85.0

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72
7.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90
8.	Layanan Publik UPT yang Prima	21. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70
9.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91,5
		22. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83,10
		23. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5
		24. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

Rp.46.287.148.000,-
Rp.20.103.795.000,-

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam Perubahan PK Balai Besar POM di Bandung beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.4.1 berikut:

TABEL 2.4.1

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	1.492.536.000
	2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26												26.00	99.200.000
	3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	405.173.200
	4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	62.112.800
	5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	155.282.000
	6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	64.683.000

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
	7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	320.563.000
	8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTF) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	305.724.000
	9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	642.279.000
	10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	417.745.000
	11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	44.945.000
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	0.00	4.80	11.00	19.00	32.00	44.00	44.00	44.00	57.00	57.00	57.00	57.00	58.922.000
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi	13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar	81.7			79.00	79.00	79.00	80.00	80.00	80.00	81.00	81.00	81.00	81.70	12.603.107.000

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Kemampuan Laboratorium														
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94			86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	22.383.776.000
	15. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	0.00	10.00	20.00	25.00	40.00	40.00	50.00	75.00	75.00	90.00	100.00	17.00	558.912.000
	16. Jumlah desa pangan aman	6	0.00	10.00	15.00	25.00	35.00	35.00	60.00	80.00	80.00	100.00	100.00	6.00	929.917.000
	17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	0.00	10.00	20.00	25.00	60.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	166.002.000
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.0	0.00	10.00	15.00	40.00	50.00	60.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	85.00	109.594.000
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72	14.00	16.00	17.00	55.88	57.65	58.00	59.00	60.00	62.00	64.00	66.00	72.00	866.166.000

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
di wilayah kerja UPT															
Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	90.00	283.012.000
Layanan Publik UPT yang Prima	21. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	829.727.000
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	22. Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91,5												91.50	20.247.184.000
	23. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83,10												83.10	3.084.740.000
	24. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5												5.00	100.140.000
	25. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95												2.95	159.501.000

2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Bandung merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya

dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja dan dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM, dengan rincian sebagai berikut

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$






Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1 + (1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5.1

KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

				
Tidak Dapat Disimpulkan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
$X > 110\%$	$100\% < x \leq 110\%$	$90\% < x \leq 100\%$	$60\% \leq x \leq 90\%$	$< 60\%$

Selanjutnya, dilakukan penghitungan rata-rata dari capaian indikator kinerja di setiap sasaran strategis yang disebut dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS). Kemudian, nilai dari seluruh NSS dalam setiap Perspektif dikonsolidasi sehingga menghasilkan Nilai Perspektif (NP) dengan formula berikut:

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Keterangan :

NP : Nilai Perspektif

NSS : Nilai Sasaran Strategis

SS : Sasaran Strategis

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat Sasaran Strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka Sasaran Strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Selanjutnya, hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi disebut Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. NPSS dapat dihitung dengan formula berikut:

$$NPSS = \frac{\sum NP}{\sum P}$$

Keterangan:

NPSS : Nilai Pencapaian Sasaran Strategis





NP : Nilai Perpektif

SS : Perspektif

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

TABEL 2.5.2




KRITERIA PENCAPAIAN NPSS

				
Istimewa	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
>100%	$90 \leq NPSS \leq 100$	$70 \leq NPSS < 90$	$50 \leq NPSS < 70$	< 50

Pada pengukuran perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan, capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

TABEL 2.5.3

KRITERIA PENGUKURAN REALISASI TERHADAP TARGET TAHUNAN

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

B. REALISASI ANGGARAN

- Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran
- Realisasi anggaran per Sasaran Strategis/Kegiatan.
- Evaluasi dan Analisis Anggaran berisikan mengenai rencana dan realisasi penyerapan pendanaan per program/ kegiatan pada tahun yang bersangkutan baik yang berasal dari DIPA maupun Hibah dan analisis tingkat pencapaiannya.
- Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Rencana Capaian Output}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut

TABEL 2.5.4

KRITERIA TINGKAT EFISIENSI

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja








**3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Evaluasi**

3.3 Realisasi anggaran

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2025-2029 dan Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Bandung tahun 2025 memuat 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Pencapaian keseluruhan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Bandung pada Triwulan II tahun 2025 secara lengkap adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	
1. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN PRODUK SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT	108.36	SANGAT BAIK	
2. MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI	101.00	SANGAT BAIK	
3. MENGUATNYA LAB PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT	103,75	SANGAT BAIK	
4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA UPT	105.03	SANGAT BAIK	
5. MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU	109.45	SANGAT BAIK	
6. TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT	102.43	SANGAT BAIK	
7. TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMANTAUAN SIBER DAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF	100,00	BAIK	
8. LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA	-	DIUKUR MULAI TRIWULAN III	
9. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 25 indikator kinerja utama. Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.1.2 di bawah ini:

TABEL 3.1.2
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025 (%) Kecuali*	TARGET TW II (%)	REALISASI TW II (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW II (%)	KRITERIA CAPAIAN
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	86.25	96.09	111.41	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26.00	-	-	-	-
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	96.06	113.01	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	-	-	-
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	99.74	117.34	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025 (%) Kecual i*	TARGET TW II (%)	REALISASI TW II (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW II (%)	KRITERIA CAPAIAN
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.00	85.00	87.05	102.41	SANGAT BAIK
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.00	88.00	95.32	108.32	SANGAT BAIK
		8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	99.57	124.46	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	91.75	95.86	104.48	SANGAT BAIK
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	97.37	114.55	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	83.48	99.24	118.88	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025 (%) Kecual i*	TARGET TW II (%)	REALISASI TW II (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW II (%)	KRITERIA CAPAIAN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				108.36	SANGAT BAIK
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12.Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57.00	44.00	44.44	101.00	SANGAT BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				101.00	SANGAT BAIK
3.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13.Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.70	80.00	83.00	103.75	SANGAT BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				103.75	SANGAT BAIK
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14.Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94	86.94	87.05	100.13	SANGAT BAIK
		15.Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	17	40.00	50.00	125.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		16.Jumlah desa pangan aman	6	35.00	47.50	135.71	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		17.Jumlah pasar pangan berbasis komunitas	1	80.00	80.00	100.00	BAIK

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025 (%) Kecuali*	TARGET TW II (%)	REALISASI TW II (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW II (%)	KRITERIA CAPAIAN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				105.03	SANGAT BAIK
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18.Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.00	60.00	65.67	109.45	SANGAT BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				109.45	SANGAT BAIK
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19.Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72.00	58.00	59.41	102.43	SANGAT BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				102.43	SANGAT BAIK
7.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20.Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90.00	50.00	50.00	100.00	BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				100.00	BAIK
8.	Layanan Publik UPT	21.Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025 (%) Kecuali*	TARGET TW II (%)	REALISASI TW II (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW II (%)	KRITERIA CAPAIAN
	yang Prima	NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-	DIUKUR MULAI TW II
9.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22.Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.50	-	-	-	-
		23.Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83.10	-	-	-	-
		24.Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5	-	-	-	-
		25.Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95	-	-	-	-
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
NILAI KINERJA ORGANISASI						106,22	ISTIMEWA

Pada Triwulan II tahun 2025, terdapat enam (6) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Baik, satu (1) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Baik, dan dua (2) pencapaian sasaran kegiatan akan diukur pada Triwulan III dan akhir tahun. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

:



SASARAN
KEGIATAN KE-1







MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN PRODUK
SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH
KERJA UPT



Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 11 (sebelas) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Indikator yang dapat diukur untuk mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran adalah 9 (sembilan) indikator, sehingga diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **108.36%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.3.

TABEL 3.1.3

CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25%	96,09%	111,41%	Tidak Dapat Disimpulkan	
2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	0,00%	0,00%	0,00%	Diukur pada Akhir Tahun	-
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	96,06%	113,01%	Tidak Dapat Disimpulkan	
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	0%	0%	-	-

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	99.74%	117,34%	Tidak Dapat Disimpulkan	
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00%	87.05%	102.41%	Sangat Baik	
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,00%	95.32%	108.32%	Sangat Baik	
8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00%	99.57%	124.46%	Tidak Dapat Disimpulkan	
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,75%	95.86%	104.48%	Sangat Baik	
10. Persentase sarana distribusi Pangan	85,00%	97.37%	114.55%	Tidak Dapat Disimpulkan	

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,48%	99.24%	118.88%	Tidak Dapat Disimpulkan	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			108.36%	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan =
 $a+b+c+d$

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

$30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$,

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%)$.

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$. Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai

Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) =

$(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$

c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan

2. Pengujian

3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$
- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

- 1. Penandaan
 - 2. Pengujian
 - 3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan relak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

- b. Kesesuaian pelaksanaan sampling
 $(\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$.

Mencakup kesesuaian dengan:

- 1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
 - 2. Pemilihan parameter uji
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) $\times 100\%$.

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) $\times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
2. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktorat Pengawasan Kosmetik) $\times 100\%$.

Mencakup surat:


1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

TABEL 3.1.4

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

"PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG
DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

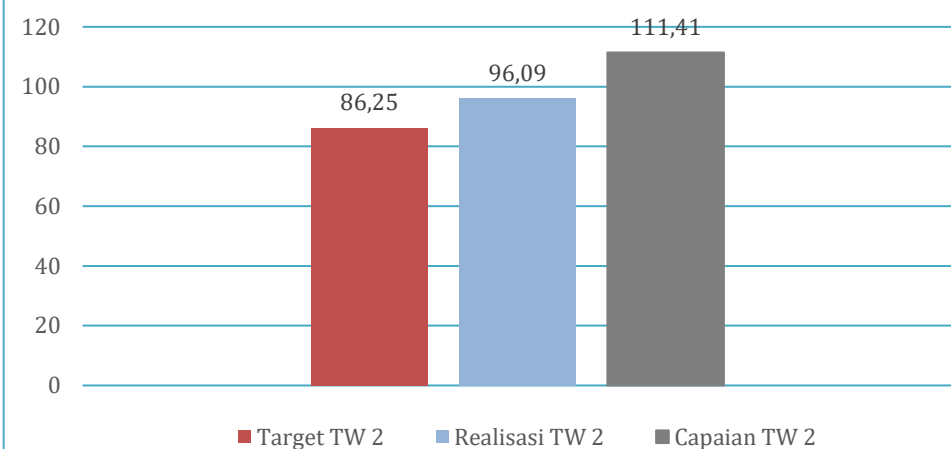
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25%	96.09%	111,41%	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan III tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 86,25%. Seluruh sampel sediaan farmasi telah diuji sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Dengan demikian ketepatan pelaporan sampling dan pengujian memenuhi *timeline* yang ditetapkan. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 96,09%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **111,41%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Grafik 3.1.1
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan III Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025


Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 86,25%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan III sebesar 111,41% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.5

PERBANDINGAN REALISASI TW 2 DENGAN TARGET TAHUNAN

"PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG
DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN III TAHUN 2025

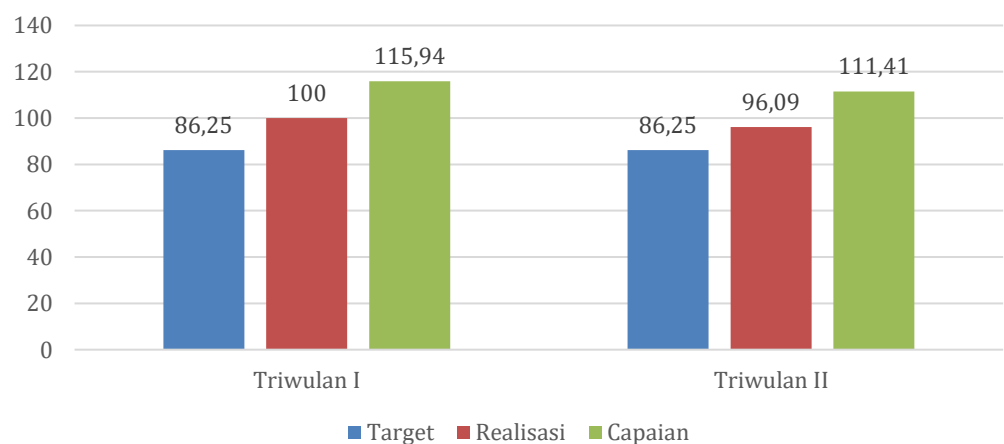
INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KATEGORI
-----------	-------------------------	---------------------	-------------------	----------

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25%	96,09%	111,41%	Tercapai/ Melampaui	
--	--------	--------	---------	------------------------	---

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 86.25% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 pada triwulan I sebesar 100.00% dan triwulan II sebesar 96,09%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dan II dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (115,94%) dan triwulan II (111,41%). Nilai pencapaian sasaran pada triwulan II terjadi penurunan sebesar 4,53% dibandingkan pada triwulan I.

Grafik 3.1.2
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I dan II Tahun 2025



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan III tahun 2025 disebabkan antara lain :

1. Relaksasi anggaran pada bulan April 2025 menyebabkan target pada Triwulan II kembali ke target semula sehingga sampel sediaan farmasi

yang disampling dan diuji Balai Besar POM di Bandung baru sebesar 31,31% (553 sampel dari target 1766 sampel). Seluruh sampel sediaan farmasi yang diuji Balai Besar POM di Bandung yang berasal dari anggota Balai Regional Semarang baru sebesar 33,69% (729 sampel dari 2164 sampel). Total keseluruhan sampel sediaan farmasi pada Triwulan II dapat diuji sesuai pedoman sampling (parameter uji kritis dan timeline) yang telah ditetapkan.

2. Renlak sampling disusun berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2025 dan waktu pelaksanaan sampling dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya aplikasi internal (Appsheets) pada pelaporan sampel obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik yang mempercepat dan memudahkan untuk mengakses data sehingga mempercepat proses Tindak Lanjut.
4. Pelatihan personel sampling yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS.
5. Pengambilan contoh sampel sediaan farmasi yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian.
6. Peningkatan pemahaman dan ketepatan personil sampling dalam menentukan kesimpulan penandaan sampel sediaan farmasi.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Verifikasi bertingkat hasil sampling termasuk evaluasi penandaan sampel sediaan farmasi untuk meminimalisir adanya kesalahan pengambilan kesimpulan.
2. Melakukan monitoring timeline dan pelaporan SIPT.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja :

1. Adanya efisiensi anggaran sehingga sampel yang disampling dan diuji masih sangat sedikit sehingga target kinerja bisa tercapai.
2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.
3. Pelatihan personel yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

Adanya aplikasi appsheet pada laboratorium kosmetik (aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi oleh laboratorium obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi, serta laboratorium pangan. Aplikasi appsheet ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan.

Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.6

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG
DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	115,94%	6,80%	17,06%	16,06%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

2. PERSENTASE SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO KE BPOM

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM diukur dengan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = $(A / B) \times 100\%$.

Keterangan:

- A. merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Target Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM Tahun 2025 adalah 26% diukur pada Akhir Tahun.

3. PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. Kesesuaian target sampel UPT;
2. Kesesuaian parameter uji;
3. Ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F.

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$.

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$.

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak} / \text{jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan : $((\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti} / \text{total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}) \times 100\%$.


TABEL 3.1.7

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

"PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG

DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

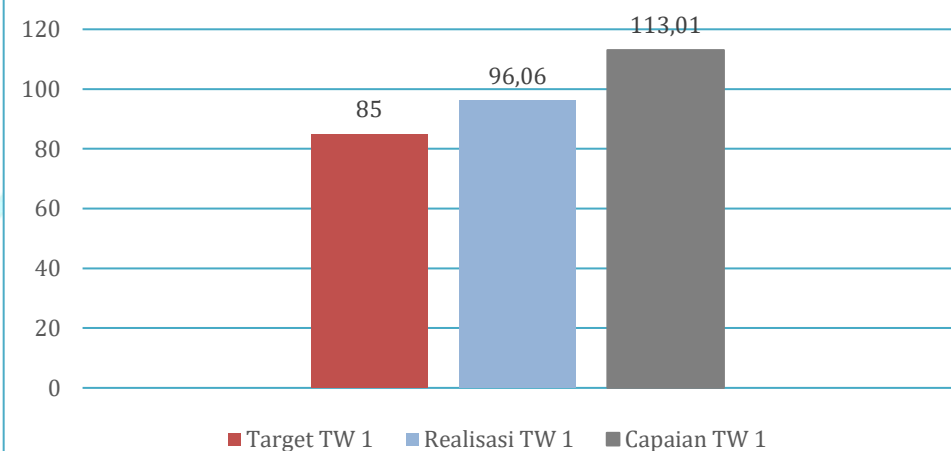
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00%	96,06%	113,01%	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85,00%. Seluruh sampel pangan olahan telah diuji sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Sebanyak 179 sampel Pangan Olahan telah diperiksa dan diuji dengan rincian sebanyak 145 sampel memenuhi syarat dan 34 sampel tidak memenuhi syarat (Vitamin A, Benzoat, Siklamat, ALT, AKK, Enterobacteriaceae). Dengan demikian Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah sebesar 96,06 %. Berdasarkan capaian tersebut maka nilai pencapaian indikator adalah sebesar **113,01 %** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Grafik 3.1.3
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan II Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025


Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85,00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 113.01 % dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.8

PERBANDINGAN REALISASI TW II DENGAN TARGET TAHUNAN

"PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG
DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

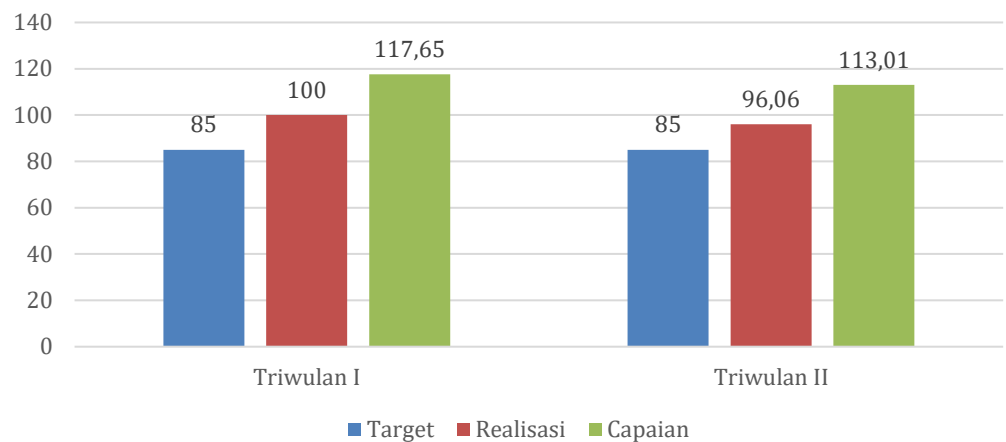
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00%	96.06%	113.01%	Tercapai/ Melampaui	

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85,00 % sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 pada triwulan I sebesar 100,00 % dan triwulan II sebesar 96,06 %. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dan II dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (117,65 %) dan triwulan II (113,01 %). Nilai pencapaian sasaran pada triwulan II terjadi penurunan sebesar sebesar 4,64 % dibandingkan pada triwulan I.

Grafik 3.1.4
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I dan II Tahun 2025



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan II tahun 2025 disebabkan antara lain :

1. Renlak disusun dengan tepat disesuaikan dengan kondisi dan waktu pelaksanaan sampling dilakukan sesuai jadwal.
2. Penyusunan anggaran yang tepat dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan.
3. Adanya aplikasi internal (Appsheets) yang mempercepat dan memudahkan untuk mengakses data sehingga mempercepat proses Tindak Lanjut .
4. Pelatihan personel sampling yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS.
5. Pengambilan contoh sampel Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi pangan.
6. Peningkatan pemahaman dan ketepatan personil sampling dalam menentukan kesimpulan penandaan sampel produk pangan olahan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Verifikasi bertingkat hasil sampling termasuk evaluasi penandaan pangan olahan untuk meminimalisir adanya kesalahan pengambilan kesimpulan.
2. Melakukan monitoring timeline dan pelaporan SIPT.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Tersedianya sarana dan prasarana (reagensia, media, alat gelas dan instrumen) yang mendukung dalam proses sampling dan pengujian.
2. Sumber Daya Manusia yang telah memenuhi kompetensi.
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.
4. Pelatihan personel yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

Adanya aplikasi appsheet pada laboratorium kosmetik (aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi oleh laboratorium obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi, serta laboratorium pangan. Aplikasi appsheet ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan.

Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (*Integrated Form for Tools & Equipment*) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal

melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.9

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG
DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	117,65%	7,72%	15,25%	14,25%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

4. PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau

pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

- a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
- b. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dihitung dengan rumus = Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar / Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM x 100%.

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
- e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

- f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
- g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
- i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
 - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

TABEL 3.1.10

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

"PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR"

TRIWULAN II TAHUN 2025

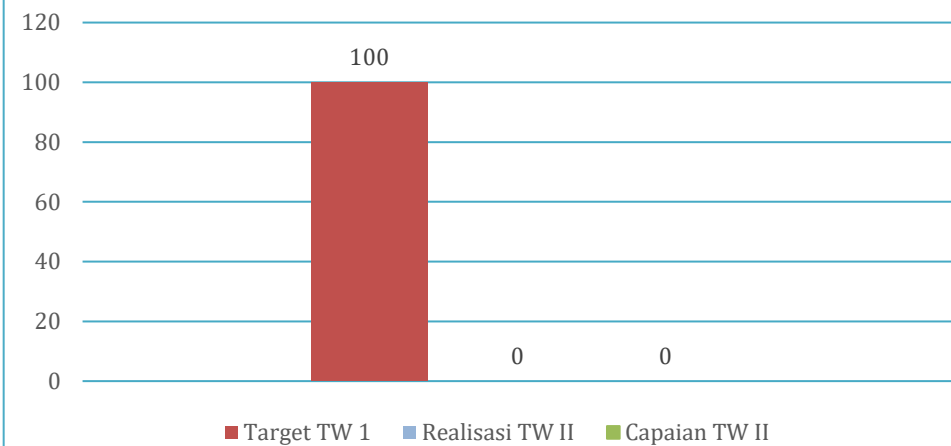
INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	0%	0%	-	-

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100,00%. Pada Triwulan II 2025, sampel KLB adalah sebanyak 0 sampel. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji

sesuai standar sebesar 0%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 0% .

Grafik 3.1.5
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan II Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 0% .

TABEL 3.1.11

PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN

"PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR"

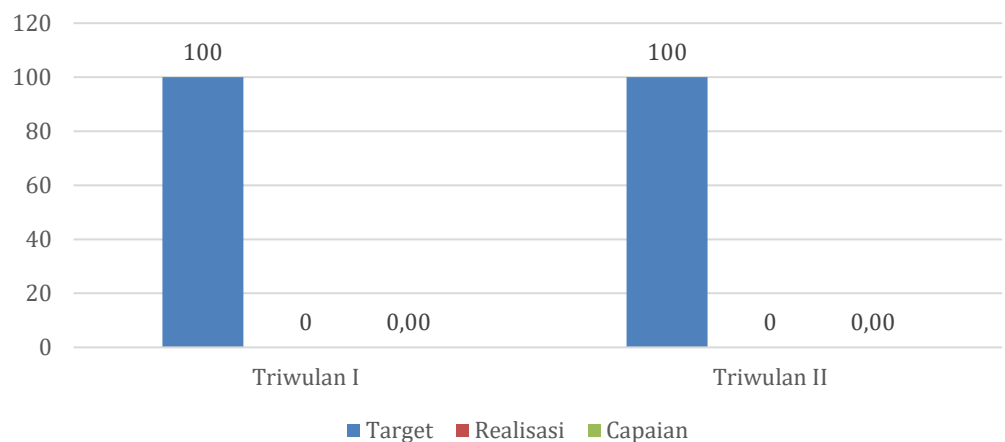
TRIWULAN II TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%	0%	0%	-	-

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100,00 % sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Tahun 2025 pada triwulan I sebesar 0 % dan triwulan II sebesar 0 %. Sehingga capaian persentase sampel KLB keracunan pangan tidak dapat dibandingkan . Hal ini disebabkan karena tidak ada sampel keracunan pangan hingga triwulan II.

Grafik 3.1.6
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I dan II Tahun 2025



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan II tahun 2025 disebabkan antara lain:

1. Dampak positif dari Program Nasional BPOM sehingga meningkatkan kesadaran Masyarakat akan hal-hal yang menyebabkan KLB terjadi.
2. Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap Masyarakat melalui medsos BBPOM (Instagram, Twitter) memudahkan dalam penyebaran informasi mengenai KLB.
3. Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan II tahun 2025 disebabkan tidak adanya sampel KLB yang di uji oleh Balai Besar POM di Bandung

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
2. Program Desa Pangan Aman.
3. Program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
4. Program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas.

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan KIE yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lintas sektor/lembaga lain.
2. Melaksanakan KIE melalui webinar tentang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha maupun masyarakat luas.
3. Melaksanakan KIE secara merata di seluruh wilayah BBPOM di Bandung
4. Pedoman Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang baru dapat menumbuhkan inovasi sosialisasi keamanan pangan dalam bentuk video "Kabayan Ngelmu" yang dapat diakses secara *online* di 1POMJabar.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.12

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	7,75%	12,90%	11,90%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

5. PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dengan = $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

A. Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$.

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$.

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

D. Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT}) \times 100\%$.

E. Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$.

F. Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.


Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$.

TABEL 3.1.13

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

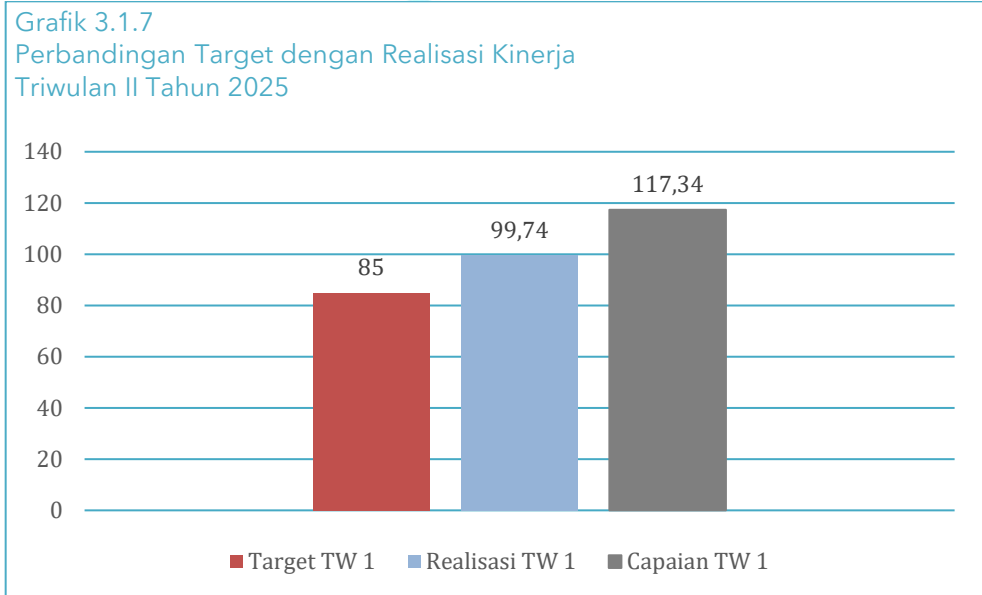
"PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00%	99,74%	117,34%	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85,00%. Seluruh sampel PIRT yang telah diuji sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Sebanyak 58 sampel PIRT telah diperiksa dan diuji dengan rincian sebanyak 47 sampel memenuhi syarat, 11 sampel tidak memenuhi syarat yang terdiri dari 1 sampel TMS Kimia (Kadar tartrazin) dan 4 sampel TMS Mikro (ALT, AKK). Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 100,00%. Berdasarkan capaian tersebut maka nilai pencapaian indikator adalah sebesar **117,34%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025


Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85,00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 117,34 % dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.14

PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN

"PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN "

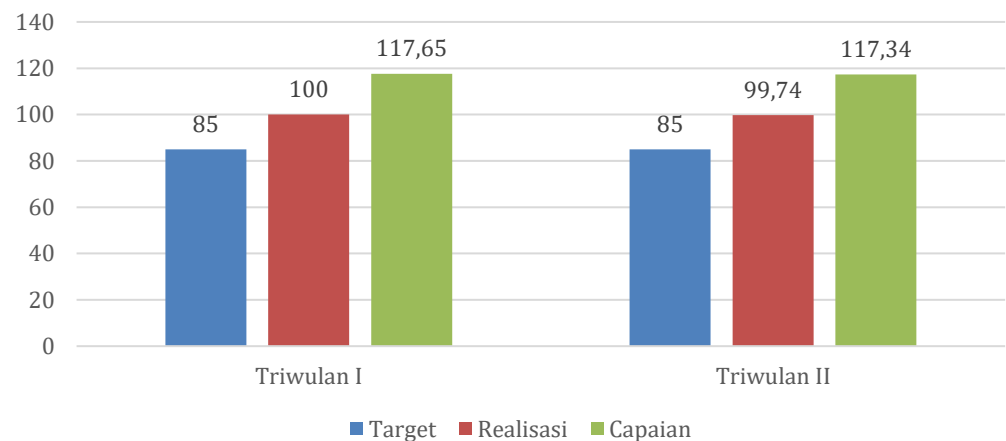
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00%	99,74%	117,34%	Tercapai/ Melampaui	

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85,00 % sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 pada triwulan I sebesar 100.00 % dan triwulan II sebesar 99.74%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dan II dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (117,65%) dan triwulan II (117,34%). Nilai pencapaian sasaran pada triwulan II terjadi penurunan sebesar 0,31% dibandingkan pada triwulan I.

Grafik 3.1.8
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I dan II Tahun 2025



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan

1. Renlak disusun dengan tepat disesuaikan dengan kondisi dan waktu pelaksanaan sampling dilakukan sesuai jadwal.
2. Penyusunan anggaran yang tepat dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan.
3. Adanya aplikasi internal (Appsheets) yang mempercepat dan memudahkan untuk mengakses data sehingga mempercepat proses Tindak Lanjut.
4. Pelatihan personel sampling yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS.
5. Pengambilan contoh sampel PIRT yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan

sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi pangan.

6. Peningkatan pemahaman dan ketepatan personil sampling dalam menentukan kesimpulan penandaan sampel PIRT.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Verifikasi bertingkat hasil sampling termasuk evaluasi penandaan sampel PIRT untuk meminimalisir adanya kesalahan pengambilan kesimpulan.
2. Melakukan monitoring timeline dan pelaporan SIPT.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Tersedianya sarana dan prasarana (reagensia, media, alat gelas dan instrumen) yang mendukung dalam proses sampling dan pengujian.
2. Sumber Daya Manusia yang telah memenuhi kompetensi.
3. Pendampingan UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan.
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.
5. Pelatihan personel yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

Adanya aplikasi appsheet pada laboratorium kosmetik (aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi oleh laboratorium obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi, serta laboratorium

pangan. Aplikasi appsheet ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai money penarikan data hasil pengujian bulanan.

Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (*Integrated Form for Tools & Equipment*) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.15

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	117,65%	7,75%	15,18%	14,18%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

6. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diukur dengan rumus : $(A+B) / 2$ dengan rincian sebagai berikut :

- A. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha X 100%.
- B. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor X 100%.

TABEL 3.1.16

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

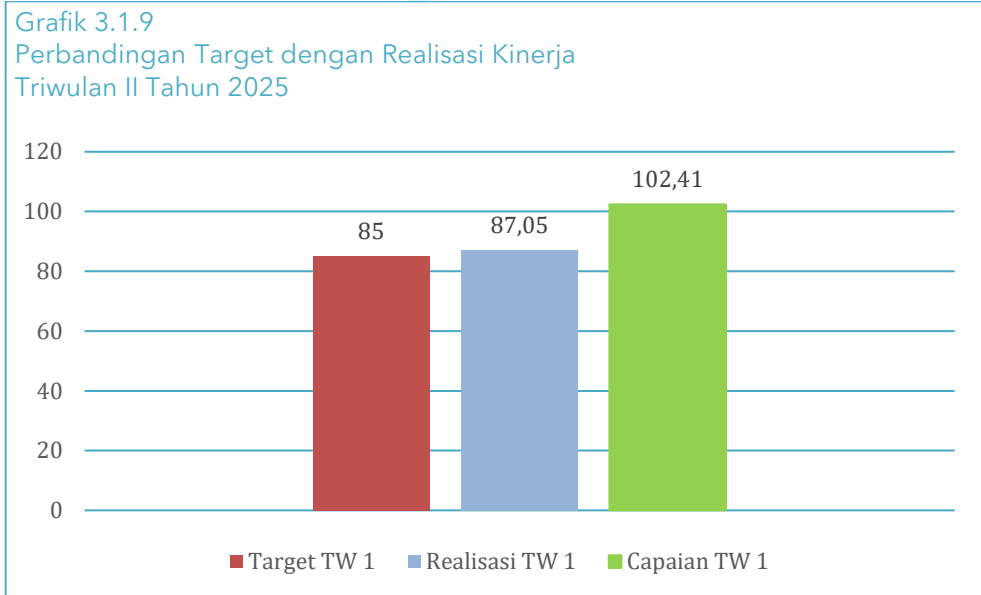
"PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00%	87.05%	102.41%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85,00%. Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 74,11% (166 respon dari 224 rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) dan rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebesar 100% (6 respon dari 6 rekomendasi yang disampaikan kepada lintas sektor) sehingga persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah sebesar 87.05%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 102.41% dengan kriteria Sangat Baik.



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85,00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 102,41 % dengan kategori Tercapai/ Melampaui .

TABEL 3.1.17

PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN

"PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER"

TRIWULAN II TAHUN 2025

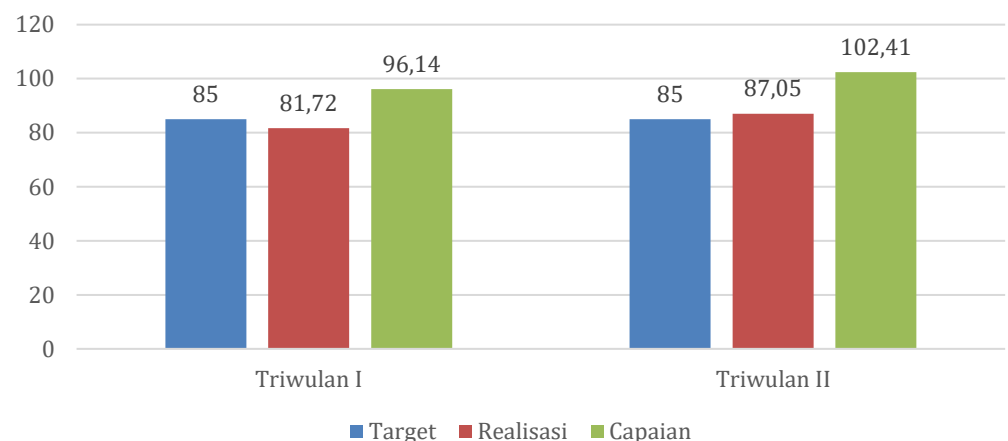
INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	85,00%	87.05%	102.41%	Tercapai/ Melampaui	

ditindaklanjuti oleh stakeholder					
----------------------------------	--	--	--	--	--

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Target indikator kinerja pada triwulan II adalah sebesar 85,00%, target ini sama dengan target tahunan yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2025 pada triwulan I sebesar 81,72% dengan capaian kinerja sebesar 96,14%. Pada triwulan II persentasenya meningkat menjadi 87,05% dengan capaian kinerja sebesar 102,41%. Nilai capaian kinerja triwulan II jika dibandingkan dengan triwulan I terdapat kenaikan sebesar 6,27%.

Grafik 3.1.10
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I dan II Tahun 2025



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut :

- Peningkatan koordinasi dan komunikasi. Koordinasi dengan pelaku usaha dan lintas sektor lebih intens.
- Pemanfaatan sistem Digital. Pemakaian aplikasi Satu POM Jabar dan Galura Inspeksi mempermudah pelaku usaha dalam menerima dan menindaklanjuti rekomendasinya

- Pendampingan dan edukasi. Pada tanggal 13 Juni 2025 telah dilakukan desk CAPA yang mana dilakukan sosialisasi aplikasi Satu POM Jabar dan pendampingan pemenuhan CAPA nya
- Monitoring secara berkala. Pemantauan respon dari pelaku usaha secara berkala sehingga dapat segera diintervensi jika terdapat kendala

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Dilakukan komunikasi melalui telepon atau WA kepada PIC sarana untuk dilakukan desk CAPA.



Gambar 3.1.1 Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa desk CAPA secara mandiri yang bertujuan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

2. Disampaikan surat resmi penagihan CAPA sebagai pengingat terkait kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan

3. Penerapan Mekanisme Peringatan Otomatis. Implementasi sistem notifikasi melalui WA untuk mengingatkan tenggat waktu bagi pelaku usaha

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Kegiatan desk CAPA adalah proses evaluasi, verifikasi, dan monitoring tindakan perbaikan dan pencegahan (Corrective and Preventive Action) yang dilakukan melalui penilaian dokumen yang disampaikan oleh pihak sarana baik secara offline maupun online. Dengan melakukan desk CAPA maka sekaligus memberikan bimbingan bagaimana membuat CAPA yang jelas dan benar.
2. Diberikan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha misalnya dengan memberikan bimbingan teknis bagaimana menyusun CAPA yang efektif, focus pada akar masalah dan pencegahan berulang.
3. Penggunaan platform digital dalam monitoring CAPA yaitu aplikasi Satu POM Jabar dan Galura Inspeksi. Monitoring progress CAPA yang dikirimkan oleh pelaku usaha dan evaluasi oleh petugas

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1. Evaluasi efektifitas pengawasan termasuk penilaian terhadap kualitas rekomendasi yang diberikan dan respon pelaku usaha
2. Perumusan kebijakan internal seperti pengembangan sistem digital, frekuensi pelaksanaan desk CAPA untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut
3. Pelaporan kinerja baik untuk kepentingan internal maupun eksternal

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.18

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN
SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI
OLEH STAKEHOLDER"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,14%	21,32%	4,51%	3,51%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

7. PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

- Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
- Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana,

pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%.
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%.
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut = rata-rata persentase sub aspek 1-6 :
 - 1. Ketepatan penetapan tindak lanjut
 - 2. Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
 - 3. Kesesuaian format laporan inspeksi
 - 4. Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
 - 5. Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
 - 6. Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)


A. Pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target sesuai renlak}) \times 100\%$

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$

C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$

TABEL 3.1.19
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA
DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,00%	95.32%	108.32%	Sangat Baik	

Pada Triwulan II, seluruh sarana produksi sediaan farmasi yang ditargetkan dapat terlaksana, namun terdapat ketidaksesuaian pemenuhan timeline untuk

sarana produksi Obat bahan Alam. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 3.1.20

RINCIAN PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN TRIWULAN II TA 2025

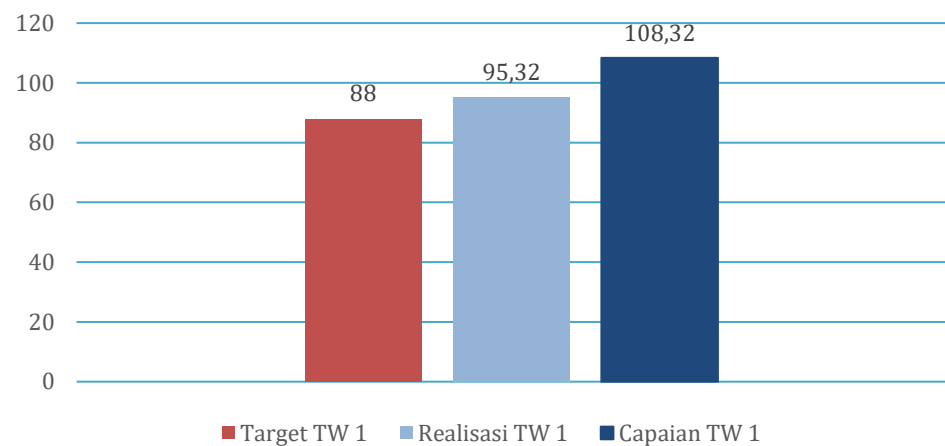
SARANA	KESESUAIAN DENGAN PEDOMAN	% Kesesuaian
INDUSTRI OBAT	A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	100%
	B. Jumlah pelaksanaan inspeksi	100%
	C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut	100%
	CAPAIAN INDUSTRI OBAT	100%
IOT/IEBA	A. Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	100%
	B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	100%
	C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	100%
	D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	0%
	CAPAIAN INDUSTRI IOT/IEBA	75%
UKOT	A. Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	100%
	B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	100%
	C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	100%
	D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	100%
	CAPAIAN INDUSTRI UKOT	100%
UMOT	A. Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	-
	B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	-
	C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	-
	D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	-
	CAPAIAN INDUSTRI UMOT	-
INDUSTRI SK	A. Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	-
	B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	-
	C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	-
	D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	-
	CAPAIAN INDUSTRI SK	-
INDUSTRI KOSMETIK	A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	100%
	B. Jumlah pelaksanaan inspeksi	100%
	C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut	100%
	CAPAIAN INDUSTRI KOSMETIK	100%
CAPAIAN SARPROD SEDIAAN FARMASI		93.75%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 88,00%. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 95,32%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 108,32% dengan kriteria Sangat Baik.

Grafik 3.1.11

Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan II Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 88,00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 108,32% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.21

PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA
DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN II TAHUN 2025

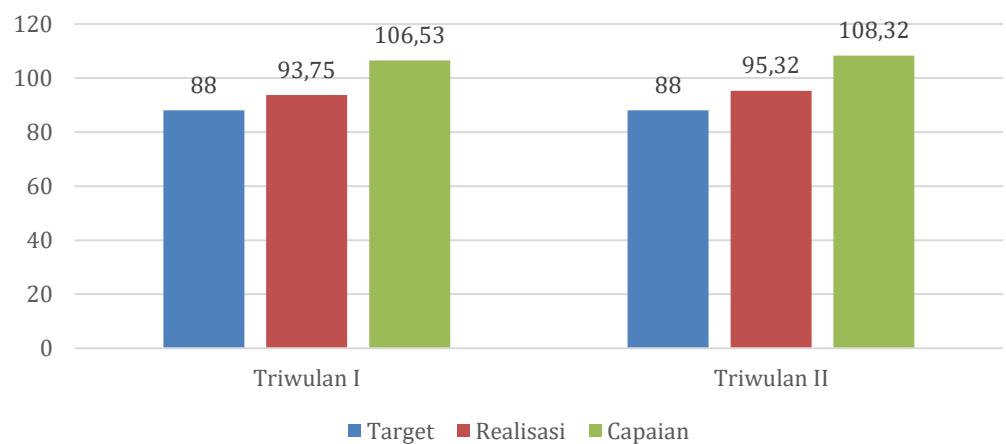
INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	88,00%	95.32%	108.32%	Tercapai	

ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 88,00% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 pada triwulan I sebesar 93,75% dan triwulan II sebesar 95,32%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dan II dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (106,53%) dan triwulan II (108,32%). Nilai pencapaian sasaran pada triwulan II terjadi kenaikan sebesar sebesar 1,79% dibandingkan pada triwulan I.

Grafik 3.1.12
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I dan II Tahun 2025



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan II tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Penyusunan kajian resiko pengawasan yang menjadi dasar dalam penetapan target pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

- Peningkatan kompetensi inspektur yang melakukan pengawasan sarana produksi sediaan Farmasi. Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Bandung telah memiliki inspektur CPOB 24 orang, CPOTB 45 orang dan CPKB 29 orang dengan jenjang yang bervariasi, baik Inspektur Kepala, Senior ataupun Junior.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam menyusun Berita Acara, Laporan Inspeksi dan surat tindak lanjut serta evaluasi Corective Action dan Preventive Action (CAPA).

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalisir adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil inspeksi.
- Melakukan monitoring timeline, baik timeline penerbitan surat tindak lanjut, pelaporan inspeksi dan pelaporan SIPT.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.
- Sharing knowledge antar inspektur sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel
- Pelatihan personil yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.
- Peningkatan kompetensi inspektur CDOB melalui Pelatihan CDOB Senior Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan POM pada tanggal 30 Juni - 5 Agustus 2025.
- Kegiatan desk CAPA dalam rangka evaluasi, verifikasi, dan monitoring tindakan perbaikan dan pencegahan (Corrective and Preventive Action) yang dilakukan melalui penilaian dokumen yang disampaikan oleh pihak sarana baik secara offline maupun online, sekaligus memberikan bimbingan bagaimana membuat CAPA yang jelas dan benar. Desk

CAPA dilaksanakan di kantor Balai Besar POM di Bandung pada tanggal 13 Juni 2025



Gambar 3.1.2 Desk CAPA dengan sarana pelaku usaha

- Peningkatan koordinasi bersama lintas sektor dalam pengawasan Obat. Koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota melalui penyelenggaraan bimbingan teknis kepada sarana pelaku usaha, antara lain tanggal 22 Mei 2025 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 24 Juni 2025 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, serta 23 Juni 2025 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.



Gambar 3.1.3 Koordinasi dengan Lintas Sektor melalui bimbingan teknis kepada sarana pelaku usaha

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Penggunaan aplikasi 1POM JABAR untuk memantau dan mengevaluasi hasil pemeriksaan. Melalui aplikasi ini, progress tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor akan terlihat dengan jelas, sehingga semua hasil inspeksi akan dapat dimonitoring dan di tindaklanjuti oleh pihak terkait secara efektif.
- Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha untuk membahas tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.22

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	106,53%	28,31%	3,76%	2,76%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

8. PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN (TERMASUK IRTP) YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan


Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan rumus % Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$.

Keterangan:

1. Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
2. Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:
 - a. Ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;

- b. Kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
- c. Kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 - pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK).
 - pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK).
 - pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK).
- d. Kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

TABEL 3.1.23
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN (TERMASUK IRTP)
YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00%	99.57%	124.46	Tidak dapat Disimpulkan	

Pada Triwulan II, seluruh sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang ditargetkan dapat terlaksana dan ditindaklanjuti sesuai pedoman, namun terdapat ketidaksesuaian pemenuhan timeline pada pelaporan SIPT sarana produksi IRTP. Secara terperinci capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel di bawah.

TABEL 3.1.24

"PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN (TERMASUK IRTP)
YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN II TAHUN 2025

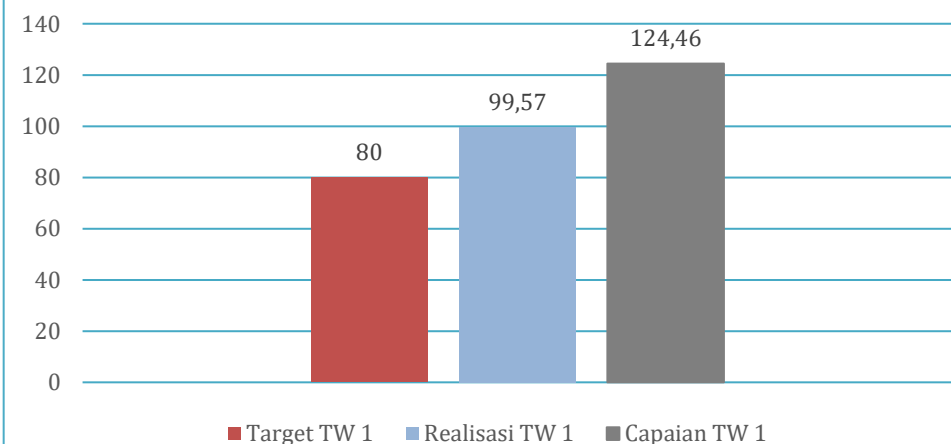
SARANA	KESESUAIAN DENGAN PEDOMAN	% Kesesuaian
INDUSTRI PANGAN	A. pemenuhan target sarana produksi yang diperiksa	100.00%
	B. Ketepatan tindak lanjut	100.00%
	C. Kesesuaian waktu pelaporan	98.72%
	CAPAIAN INDUSTRI PANGAN	99.57%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80,00%. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 99,57%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 124,46% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.

Grafik 3.1.13

Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan II Tahun 2025




B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 80,00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 124,46% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.25

PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN (TERMASUK IRTP)
YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

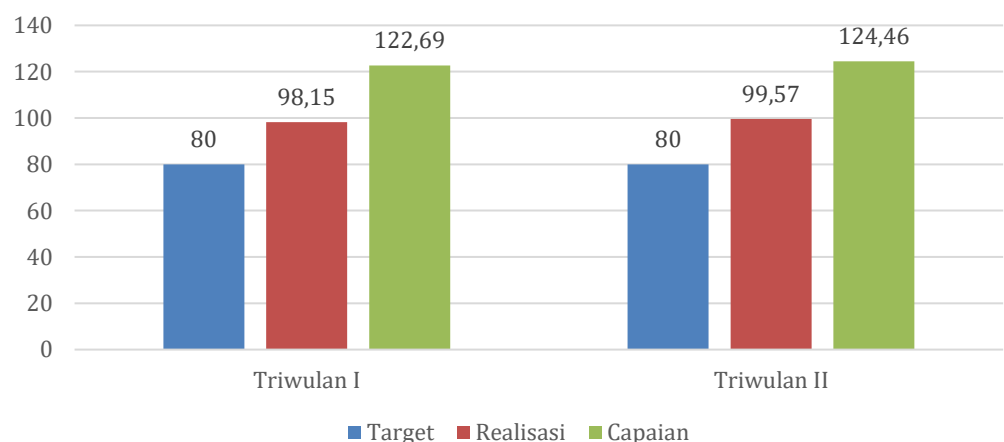
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00%	99.57%	124.46%	Tercapai	

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80,00% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 pada triwulan I sebesar 98,15% dan triwulan II sebesar 99,57%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dan II dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I adalah 122,69% dan triwulan II adalah 124,46%. Nilai pencapaian sasaran pada triwulan II terjadi kenaikan sebesar sebesar 1,77% dibandingkan pada triwulan I.

Grafik 3.1.14
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I dan II Tahun 2025



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan II tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Penyusunan kajian resiko pengawasan yang menjadi dasar dalam penyusunan target pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- Peningkatan kompetensi inspektur yang melakukan pengawasan sarana produksi sediaan Pangan Olahan termasuk IRTP. Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Bandung telah memiliki inspektur Pangan sebanyak 39 orang dengan jenjang yang bervariasi, baik Inspektur Madya, Muda ataupun Pertama.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam menyusun Berita Acara, Laporan Inspeksi dan surat tindak lanjut serta evaluasi Corective Action dan Preventive Action (CAPA).
- Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dalam pengawasan pangan olahan, khususnya Pangan Industri Rumah Tangga melalui berbagai cara, baik formal ataupun informal.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalisis adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil inspeksi.
- Melakukan monitoring timeline, baik timeline penerbitan surat tindak lanjut, pelaporan inspeksi dan pelaporan SIPT.
- Koordinasi dan komunikasi dengan pusat atau UPT lain terus ditingkatkan, baik melalui komunikasi formal dan informal.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.



Gambar 3.1.4 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

- Sharing knowledge antar inspektur sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel
- Pelatihan personel yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.
- Pelatihan Food Inspektur Dasar yang diselenggarakan oleh PPSDM bekerjasama dengan Direktorat Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan.

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Penggunaan aplikasi 1POM JABAR untuk memantau dan mengevaluasi hasil pemeriksaan. Melalui aplikasi ini, progress tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor akan terlihat dengan jelas, sehingga semua hasil inspeksi akan dapat dimonitoring dan di tindaklanjuti oleh pihak terkait secara efektif.
- Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha untuk membahas tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.26

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN (TERMASUK IRTP)
YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	122,69%	28,31%	4,33%	3,33%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

9. PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Jumlah sarana/fasilitas yang

memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan $= (A+B+C)/3$

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

1. Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung: Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa X 100 %
2. Persentase kesesuaian tindaklanjut dihitung: Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%.
- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang


- diperiksa) X100%.
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%
- C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)
- a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.
- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

TABEL 3.1.27

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

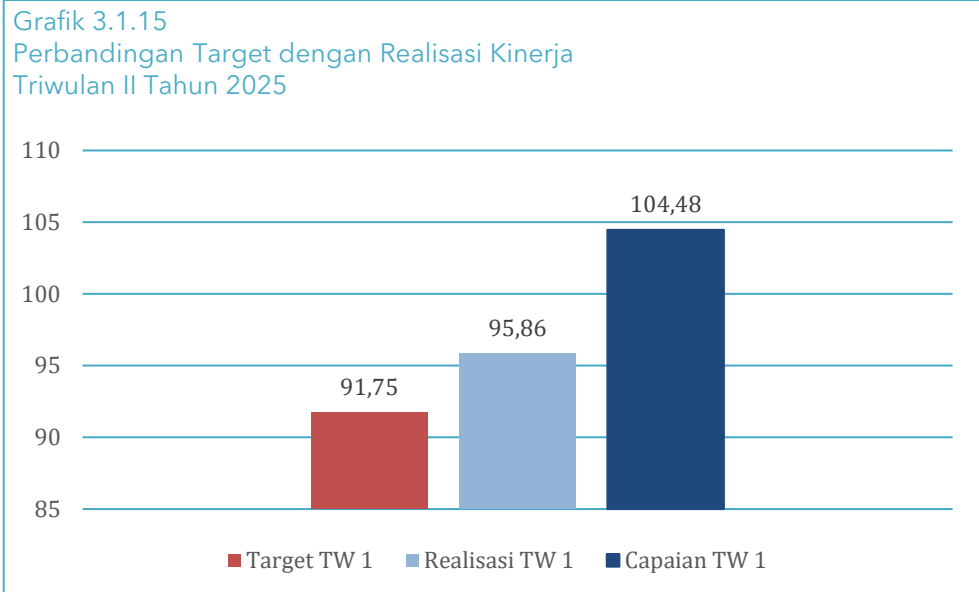
"PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,75%	95.86%	104.48%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91,75%. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 95,86%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 104,48% dengan kriteria Sangat Baik.



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 91,75%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 104,48% dengan kategori Tercapai.


TABEL 3.1.28

PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN

"PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI
-----------	-------------------	-----------------	---------------	----------

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,75%	95.86%	104.48%	Tercapai	
---	--------	--------	---------	----------	---

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Target triwulan II pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91,75% sama dengan target tahunan yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Jika dibandingkan antara nilai capaian kinerja triwulan I dan II maka nilai capaian kinerja pada triwulan I sebesar 100,25% dan triwulan II sebesar 104,48%. Nilai capaian kinerja pada triwulan II terjadi kenaikan sebesar 4,23% dibandingkan triwulan I.



D. Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan II tahun 2025 disebabkan antara lain :

1. Pada Triwulan II, realisasi kinerja distribusi Obat 97,10%, distribusi Obat Bahan Alam 93,09%, dan Suplemen Kesehatan 94,23% dan distribusi Kosmetik 99,04%

2. Perencanaan pemeriksaan yang berbasis risiko, dengan prioritas sarana yang memiliki riwayat pelanggaran atau risiko tinggi
3. Pemanfaatan sistem digital yaitu aplikasi Galura Inspeksi dan Satu POM Jabar untuk mempercepat proses tindak lanjut dan pemantauan
4. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Menyusun rencana pemeriksaan berbasis risiko dan prioritas bulanan/triwulanan
2. Optimalisasi sumber daya pemeriksa (tim kerja, jadwal fleksibel, pengaturan beban kerja)
2. Monitoring rutin progres pemeriksaan dan evaluasi bulanan
3. Review hasil pemeriksaan dan tindak lanjut oleh supervisor
4. Pembinaan teknis kepada sarana untuk mengurangi kesalahan atau ketidakpatuhan berulang

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Perencanaan dan Penjadwalan Pemeriksaan yang Efektif. Menyusun jadwal pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko masing-masing fasilitas untuk memastikan prioritas yang tepat. Selain itu Mengalokasikan tim pemeriksa sesuai dengan kompleksitas dan jumlah fasilitas yang akan diperiksa.
2. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi. Kegiatan pelatihan dapat berupa pelatihan internal dan eksternal
3. Penggunaan Teknologi Informasi. Mengoptimalkan penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan Galura Inspeksi
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala. Melakukan penilaian rutin terhadap capaian kinerja individu dan tim untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.
5. Koordinasi dan komunikasi secara internal maupun dengan pusat atau UPT lain terkait kasus-kasus pengawasan. BBPOM di Bandung sering terlibat dalam pengawasan bersama pusat. Menjadi narasumber atas

undangan lintas sektor yang mengundang pelaku usaha atau petugas pemeriksa daerah.

6. Menjadi narasumber atas undangan lintas sektor (pelatihan untuk pelaku usaha, petugas pemeriksa daerah) atau kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang bekerjasama dengan tokoh masyarakat.

Pada tanggal 24 Juni 2025 menjadi narasumber pada kegiatan Penilaian ketersediaan obat Kabupaten/ Kota melalui evaluasi pelaporan Obat di Puskesmas dan Rumah Sakit oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur



F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi kinerja berkala. Data capaian kinerja digunakan untuk mengidentifikasi tren, hambatan dan perbaikan yang diperlukan. Data didapat dari SIPT, Galura Inspeksi dan rekapitulasi dari kertas kerja. Aplikasi Galura Inspeksi merupakan inovasi pengembangan dari aplikasi Satu POM Jabar.
2. Rapat tinjauan kinerja bulanan bersama pimpinan yang membahas capaian kinerja, kendala di lapangan dan tindak lanjut strategisnya

3. Membuat dashboard berbasis IT yaitu aplikasi Galura Inspeksi untuk menampilkan capaian pemeriksaan, pelaporan SIPT, tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada pelaku usaha dan CAPA nya. Selain itu menampilkan capaian pemeriksaan per individu, per kabupaten/ kota, sarana memenuhi ketentuan/ tidak memenuhi ketentuan.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.29

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.95 %	27,69%	3,57%	2,57%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuandisimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

10. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Pengawasan melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C) dengan rincian sebagai berikut :

$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$


$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

TABEL 3.1.30

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

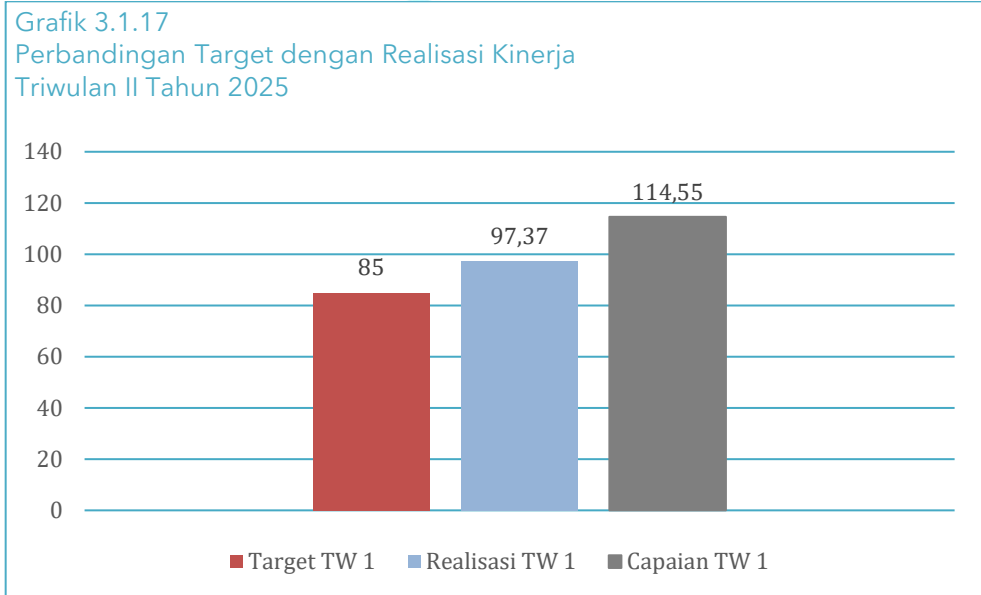
"PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	97.37%	114.55%	Tidak dapat Disimpulkan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85,00%. Pada Triwulan II 2025, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 97,37%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **114.55%** dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85,00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 114,55% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.31

PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN

"PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

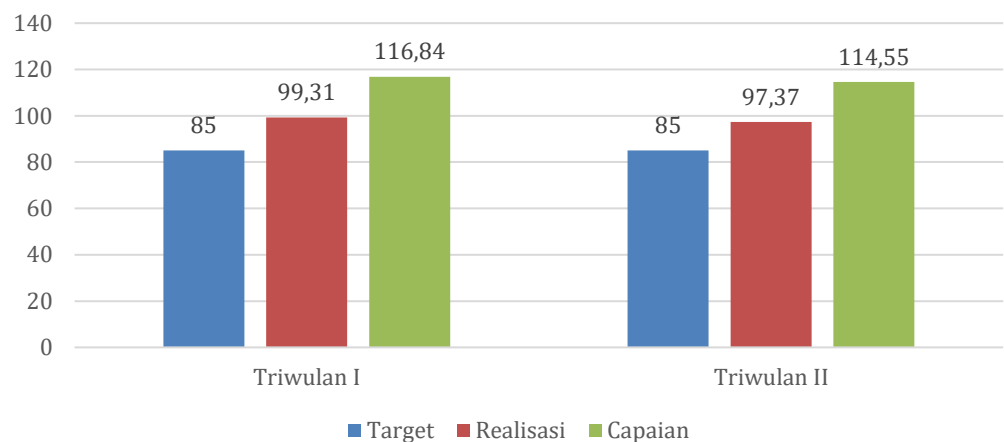
TRIWULAN II TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	97.37%	114.55%	Tercapai	

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85,00% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dan II dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (116,84%) dan triwulan II (114,55%). Nilai pencapaian sasaran pada triwulan II terjadi penurunan sebesar sebesar 2,29% dibandingkan pada triwulan I.

Grafik 3.1.18
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I dan II Tahun 2025



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan II tahun 2024 disebabkan antara lain :

1. Perencanaan pengawasan berbasis risiko. Sarana distribusi diprioritaskan berdasarkan kategori risiko tinggi riwayat pelanggaran misalnya produk tanpa izin edar
2. Penggunaan sistem digital dalam pengawasan. Aplikasi Galura Inspeksi dan Satu POM Jabar mempermudah dalam dokumentasi, pelaporan dan pemantauan
3. Pemantauan capaian kinerja secara berkala sehingga pencapaian target berada pada jalur yang tepat. Selain itu membantu mendeteksi dini hambatan dan penyimpangan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Menyusun rencana pemeriksaan berbasis risiko dan prioritas bulanan/triwulanan
2. Optimalisasi sumber daya pemeriksa (tim kerja, jadwal fleksibel, pengaturan beban kerja)
3. Monitoring rutin progres pemeriksaan dan evaluasi bulanan
4. Review hasil pemeriksaan dan tindak lanjut oleh supervisor
5. Pembinaan teknis kepada sarana untuk mengurangi kesalahan atau ketidakpatuhan berulang

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Perencanaan dan Penjadwalan Pemeriksaan yang Efektif. Menyusun jadwal pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko masing-masing fasilitas untuk memastikan prioritas yang tepat. Selain itu mengalokasikan tim pemeriksa sesuai dengan kompleksitas dan jumlah fasilitas yang akan diperiksa
2. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi. Kegiatan pelatihan dapat berupa pelatihan internal dan eksternal
3. Penggunaan Teknologi Informasi. Mengoptimalkan penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan Galura Inspeksi
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala. Melakukan penilaian rutin terhadap capaian kinerja individu dan tim untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan
5. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi. Mengadakan pertemuan rutin antar tim pemeriksa untuk membahas progres dan kendala yang dihadapi
6. Koordinasi dan komunikasi dengan pusat atau UPT lain terus ditingkatkan, baik melalui komunikasi formal dan informal.

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi kinerja berkala. Data capaian kinerja digunakan untuk mengidentifikasi tren, hambatan dan perbaikan yang diperlukan. Data didapat dari SIPT, Galura Inspeksi dan rekapitulasi dari kertas kerja. Aplikasi Galura Inspeksi merupakan inovasi pengembangan dari aplikasi Satu POM Jabar.
2. Rapat tinjauan kinerja bulanan bersama pimpinan yang membahas capaian kinerja, kendala di lapangan dan tindak lanjut strategisnya
3. Membuat dashboard berbasis IT yaitu aplikasi Galura Inspeksi untuk menampilkan capaian pemeriksaan, pelaporan SIPT, tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada pelaku usaha dan CAPA nya. Selain itu menampilkan capaian pemeriksaan per individu, per kabupaten/ kota, sarana memenuhi ketentuan/ tidak memenuhi ketentuan

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.32

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	116,84%	35,33%	3,31%	2,31%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

11. PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

- a. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan

Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen kesehatan, dan Obat Kuasi.

- b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media.
- g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $a+b/2$

- a. Pemenuhan jumlah target pengawasan = $\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai Renlak} \times 100\%$
- b. Ketepatan waktu pelaporan = $\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah target iklan yang diawasi} \times 100\%$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}) \times 100\%$

- b. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$
- c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$
- C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$
 - a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}) \times 100\%$
 - b. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$
 - c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$
- D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$
 - a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target} / \text{jumlah media (4)}$. Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$
 - b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = $(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}) / 2$. Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$. Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$
- E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b+c)$
 - a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan sesuai renlak}) \times 40\%$
 - b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan $(\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) / \text{proporsi target media} \times 20\%$
 - c. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$

waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

TABEL 3.1.33

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

"PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG
DIAWASI SESUAI KETENTUAN"

TRIWULAN II TAHUN 2025

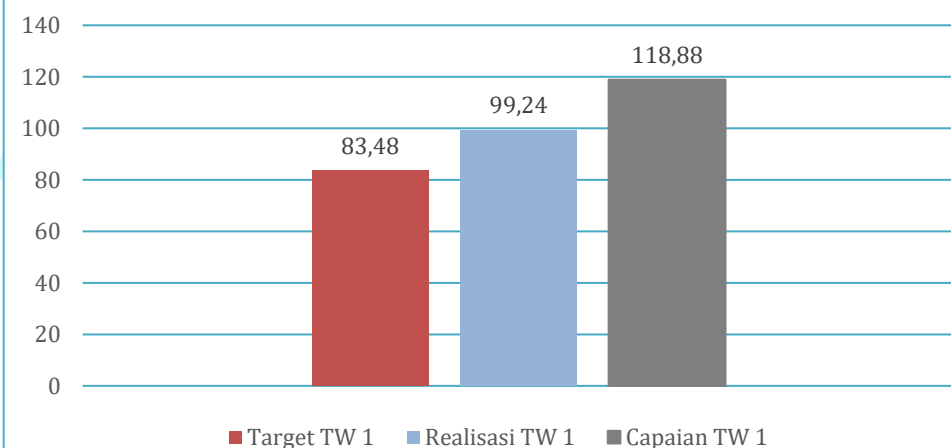
INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,48%	99.24%	118.88%	Tidak Dapat Disimpulkan	●

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 83,48%. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 99.24%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **118.88%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Grafik 3.1.19

Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan II Tahun 2025




B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 83,48%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 118.88% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.34

PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN"

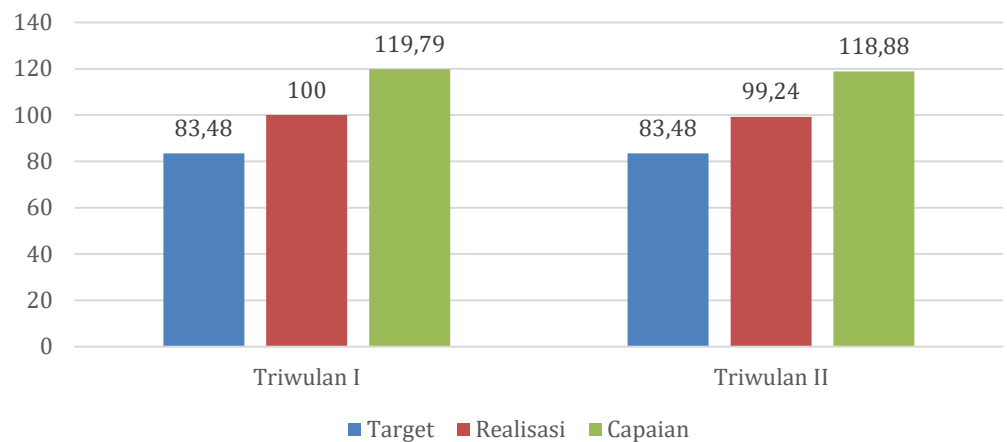
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,48%	99.24%	118.88%	Tercapai	

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 83.48% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 pada triwulan I sebesar 100% dan triwulan II sebesar 99.24%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dan II dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (119.79%) dan triwulan II (118.88%). Nilai pencapaian sasaran pada triwulan II terjadi penurunan sebesar sebesar 0.91% dibandingkan pada triwulan I.

Grafik 3.1.20
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I dan II Tahun 2025



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan II tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Peningkatan kompetensi personil yang melakukan pengawasan iklan dengan melakukan kegiatan Sharing Knowledge Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam memberikan kesimpulan hasil pengawasan iklan.
- Peningkatan pemahaman dalam pelaporan hasil pengawasan iklan tepat waktu sesuai pedoman.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalisir adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil pengawasan iklan.
- Melakukan monitoring timeline pelaporan SIPT Iklan .

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.
- Sharing knowledge antar personil pengawasan iklan sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel.
- Peningkatan kompetensi personil pengawasan iklan dengan mengadakan sharing knowlage tentang pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara internal yang diselenggarakan secara luring pada bulan 9 Januari 2025.



Gambar 3.1.5 Kegiatan Sharing Knowledge Pengawasan Iklan untuk personil pengawasan Iklan di Sub Kelompok Inspeksi BBPOM Di Bandung

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, dengan memanfaatkan aplikasi SIPT dan Aplikasi pengawasan iklan di Pusat antarlain SiAPIK untuk pengawasan iklan obat, SiREKA untuk pengawasan iklan Obat Bahan Alam, Kuasi dan Suplemen Kesehatan.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.35

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG
DIAWASI SESUAI KETENTUAN"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN N TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	119,79%	27,28%	4,39%	3,39%	Tidak Efisien



Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SARANA
KEGIATAN KE-2 PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **101.00%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.36.

TABEL 3.1.36

CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-2
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	44,00%	44.44%	101.00	Sangat Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			101.00%	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman

tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $\frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \times 100\%$.

Keterangan:


- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

TABEL 3.1.37

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

"PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

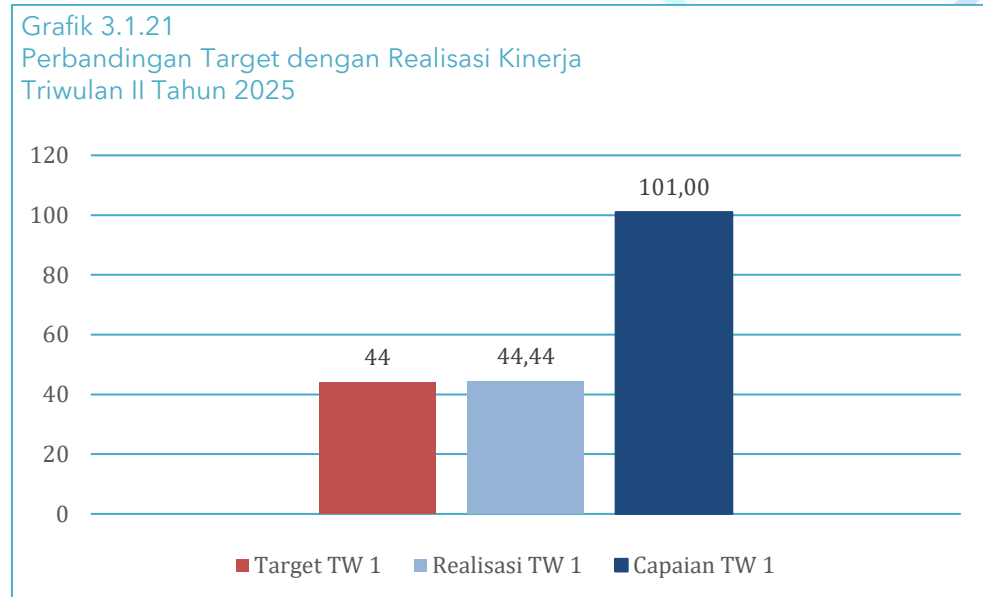
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	44,00%	44.44%	101.00%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 44,00%. Jumlah sarana pangan fortifikasi yang berada di cakupan pengawasan Balai Besar POM di Bandung adalah sebanyak 63

sarana. Pada Triwulan II, sarana pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebanyak 9 (sembilan) sarana, sehingga persentase cakupan sebesar 44.44%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **101.00%** dengan kriteria **Sangat Baik**.



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 57,00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 77.96% dengan kategori Akan Tercapai.

TABEL 3.1.38

PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN

"PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"

TRIWULAN II TAHUN 2025

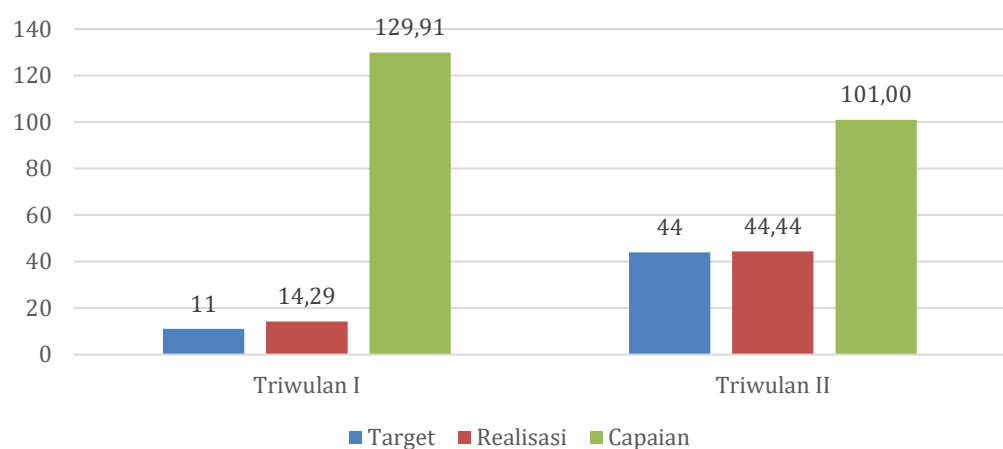
INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan	57,00%	44.44%	77.96%	Akan Tercapai	▲

ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 44%. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 pada triwulan I sebesar 14,29% dan triwulan II sebesar 44,44%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dan II dihitung terhadap target tahun 2025, yaitu 57%, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I sebesar 25,07% dan triwulan II sebesar 77,96%. Apabila dibandingkan terhadap target per triwulan, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan II terjadi penurunan sebesar sebesar 28% dibandingkan pada triwulan I.

Grafik 3.1.22
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I dan II Tahun 2025



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan II tahun 2024 disebabkan antara lain :

- Penyusunan kajian resiko pengawasan yang menjadi dasar dalam penyusunan target pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

- Peningkatan kompetensi inspektur yang melakukan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi. Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Bandung telah memiliki inspektur CPPOB sebanyak 39 orang dengan jenjang yang bervariasi, baik Inspektur Madya, Muda dan Pertama.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam menyusun Berita Acara, Laporan Inspeksi dan surat tindak lanjut serta evaluasi Corective Action dan Preventive Action (CAPA).

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalis adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil inspeksi.
- Melakukan monitoring timeline, baik timeline penerbitan surat tindak lanjut, pelaporan inspeksi dan pelaporan SIPT.
- Koordinasi dan komunikasi dengan pusat atau UPT lain terus ditingkatkan, baik melalui komunikasi formal dan informal.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

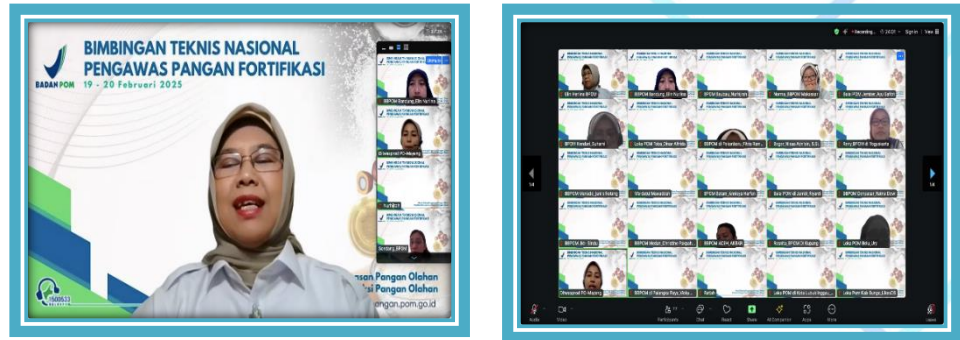
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.



Gambar 3.1.6 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

- Sharing knowledge antar inspektur sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel

- Pelatihan personel yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.
- Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan Fortifikasi yang diselenggarakan oleh PPSDM POM Bersama Direktorat Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan.



Gambar 3.1.7 Bimbingan Teknis Nasional Pengawasan pangan fortifikasi

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Penggunaan aplikasi 1POM JABAR untuk memantau dan mengevaluasi hasil pemeriksaan. Melalui aplikasi ini, progress tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor akan terlihat dengan jelas, sehingga semua hasil inspeksi akan dapat dimonitoring dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
- Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha untuk membahas tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.39

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI
YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	101.00%	63.10%	1.60%	0.60%	Efisien



Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Efisien ($0 < 1,00$) karena capaian realisasi Anggaran lebih kecil dari capaian kinerja.

**SASARAN MENGUATNYA LAB PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN
KEGIATAN KE-3 PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **103,75%** dengan kriteria **Sangat Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.40.

TABEL 3.1.40

**CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-3
TRIWULAN II TAHUN 2025**

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	80,00%	83,00%	103,75%	Sangat Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			103,75%	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

**NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN
OLAHAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM**

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

a. Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir

Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

b. Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

c. Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

d. Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

a. SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:

- Standar Ruang Lingkup;
- Standar Peralatan;
- Standar Kompetensi Laboratorium;
- Standar Metode yang terverifikasi.

b. SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:


- Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
- Standar Peralatan;
- Standar Kompetensi Laboratorium.

TABEL 3.1.41

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

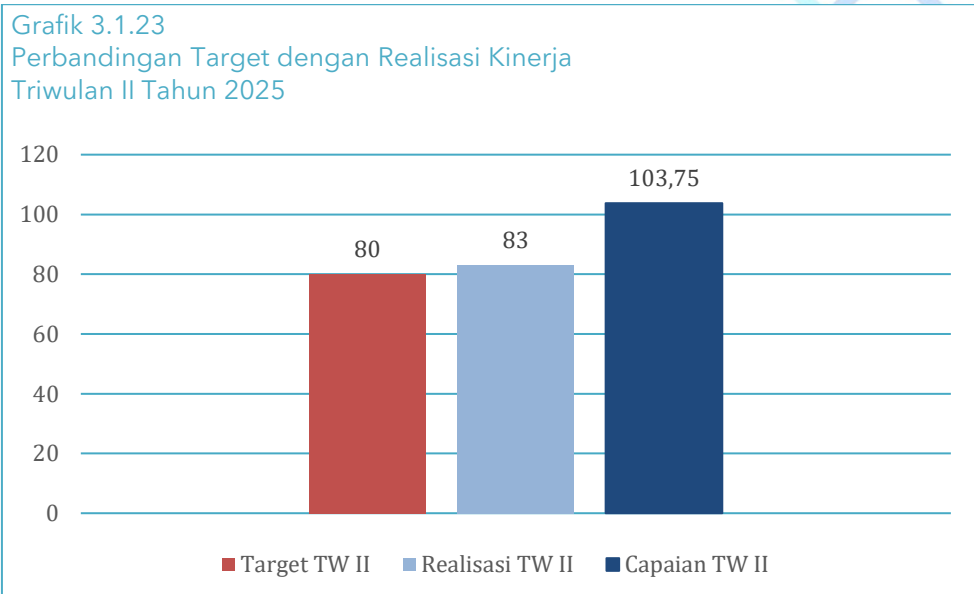
"NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN
OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	80,00%	83,00%	103,75%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80,00%. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 83,00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **103.75%** dengan kriteria **Sangat Baik**.



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025


Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 81,70%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 100,37% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.42

PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN

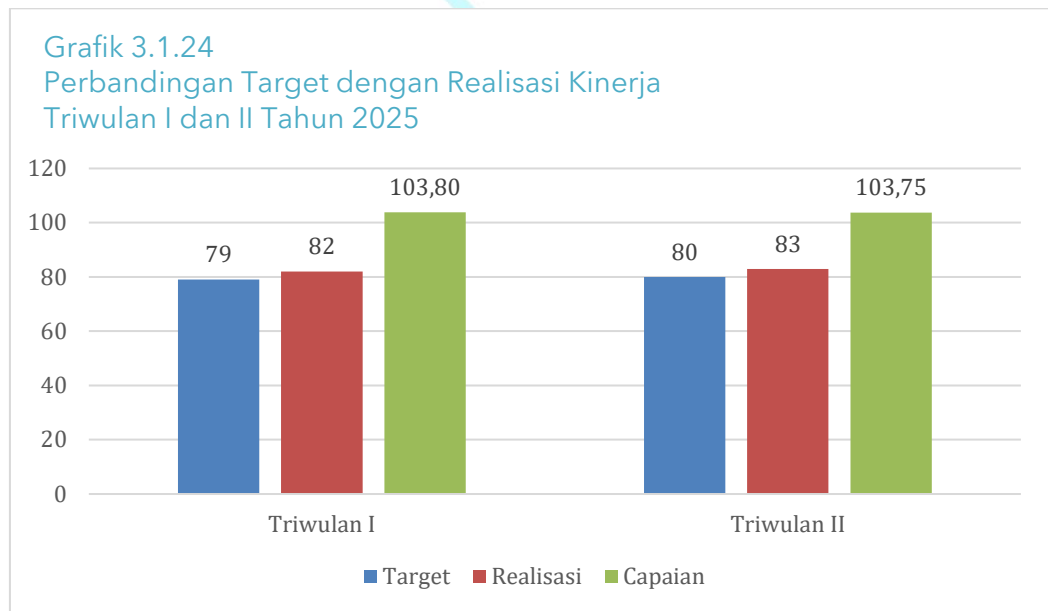
"NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN
OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81,70%	83,00%	101.59%	Tercapai	

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80.00%. Persentase Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 pada triwulan II sebesar 83.00% dan triwulan I sebesar 82,00%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dan II dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (103,80%) dan triwulan II (103,75%). Nilai pencapaian sasaran pada triwulan II terjadi penurunan sebesar sebesar 0,05% dibandingkan pada triwulan I.



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan II tahun 2025 disebabkan antara lain :

1. Pemenuhan SRL pada Triwulan II sebesar 85,30%, SRL laboratorium kimia 83,60% dengan rincian laboratorium obat sebesar 77,60%, SRL laboratorium OBA dan SKOK sebesar 88,10%, SRL Laboratorium Kosmetik sebesar 94,20%, SRL laboratorium pangan sebesar 74,50%, dan SRL laboratorium mikrobiologi sebesar 87,00%.
2. Pemenuhan peralatan sebesar 88,10%, dengan rincian nilai pemenuhan peralatan kimia sebesar 90,20% dan pemenuhan peralatan mikrobiologi sebesar 86,10%.
3. Pemenuhan kompetensi laboratorium pengujian dan mikrobiologi sebesar 80%.
4. Pemenuhan metode terverifikasi sebesar 67,20%, dengan rincian pemenuhan metode terverifikasi laboratorium obat sebesar 41,20%, SRL laboratorium OBA dan SKOK sebesar 50,60%, SRL Laboratorium Kosmetik sebesar 81,70%, SRL laboratorium pangan sebesar 69,30%, dan SRL laboratorium mikrobiologi sebesar 93,20%.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup : Membuat roadmap pemenuhan SRL Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi disesuaikan dengan kendala permasalahan yang ada.
2. Pemenuhan Kompetensi : Membuat roadmap peningkatan kompetensi penguji sesuai kemampuan melakukan pengujian pada masing-masing laboratorium.
3. Pemenuhan Peralatan : Membuat roadmap penambahan alat dan perbaikan alat yang rusak di tahun anggaran 2025.
4. Pemenuhan metode terverifikasi : Membuat roadmap penambahan metode terverifikasi pada masing-masing laboratorium.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- ✎ Untuk pemenuhan standar ruang lingkup pada Triwulan II tahun 2025 telah dilakukan verifikasi metode analisa sebanyak 9 parameter uji.
- ✎ Untuk pemenuhan kompetensi SDM pada Triwulan II tahun 2025, laboratorium obat bahan alam, suplemen Kesehatan dan obat kuasi, laboratorium kosmetik dan mikrobiologi sudah memenuhi kedua aspek penilaian kompetensi. Sedangkan laboratorium obat dan laboratorium pangan belum memenuhi aspek 2 penilaian kompetensi.
- ✎ Untuk pemenuhan metode analisa terverifikasi pada Triwulan II tahun 2025 Laboratorium Obat sebanyak 7 Metode Analisa, laboratorium Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi sebanyak 2 Metode Analisa, laboratorium kosmetik 8 Metode Analisa, laboratorium Pangan 1 Metode Analisa.

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

Adanya aplikasi appsheet pada laboratorium kosmetik (aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi oleh laboratorium obat

bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi, serta laboratorium pangan. Aplikasi appsheet ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan.

Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.43

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN
OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	103,80%	0,07%	1406,53 %	1405,53 %	Tidak Efisien






Berdasarkan tabel diatas, indicator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING
KEGIATAN KE-4 WILAYAH KERJA UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **105.03%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.44.

TABEL 3.1.44

CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86,94%	87,05%	100,13%	Sangat Baik	
2. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	40,00%	50,00%	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan	
3. Jumlah desa pangan aman	35,00%	47.50%	135.71%	Tidak Dapat Disimpulkan	
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	80,00%	80,00%	100,00%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			105.03%	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan

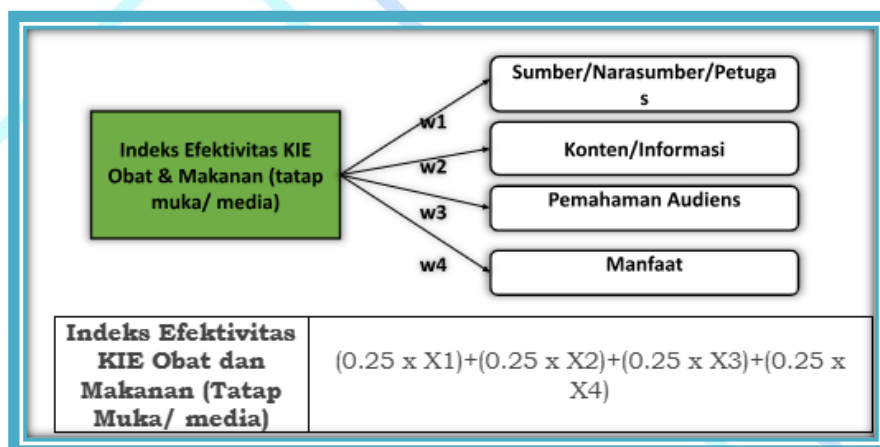
kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Gambar 3.1.8 Rumus Indeks Efektifitas KIE

TABEL 3.1.45

KATEGORI TINGKAT EFEKTIVITAS KIE


SKOR INDEKS 100	INTERPRETASI EFEKTIVITAS
<65,00	Tidak Efektif
65,01 - 75,00	Kurang Efektif
75,01 - 85,00	Cukup Efektif
85,01 - 95,00	Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif

TABEL 3.1.46

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

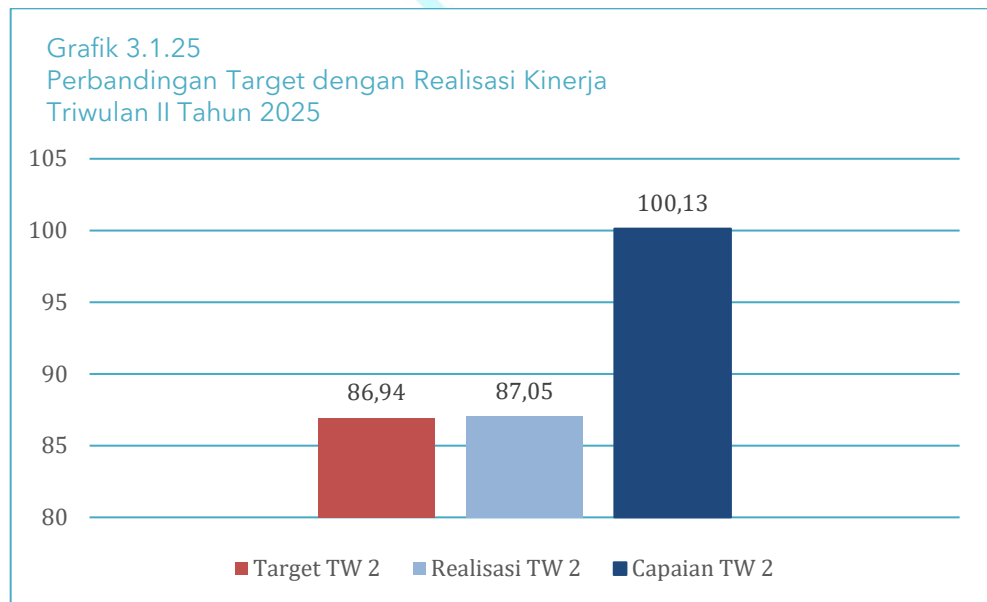
"TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86,94%	87,05%	100,13%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 86,94%. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung sebesar 87,05%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **100,13%** dengan kriteria **Sangat Baik**.



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 86,94%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 100,13% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.47

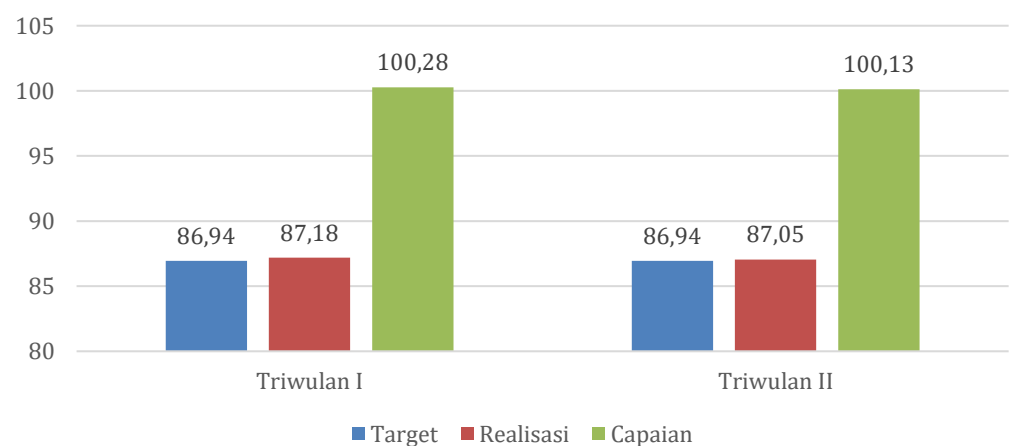
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN
DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG"
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86,94%	87,05%	100,13%	Tercapai	

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 86.94% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Persentase Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung pada triwulan I sebesar 100,28% dan triwulan II sebesar 100,13%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dan II dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (100,28%) dan triwulan II (100,13%). Nilai pencapaian sasaran pada triwulan II terjadi penurunan sebesar 0,15% dibandingkan pada triwulan I.

Grafik 3.1.26
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I dan II Tahun 2025



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan II tahun 2025 disebabkan antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan bekerja sama dengan Tokoh Masyarakat
2. Melakukan KIE melalui sosial media melalui infografis dan videografis yang menarik di Instagram secara masif dengan topik yang terjadwal
3. Melakukan KIE melalui videotron bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika Kota Bandung
4. Melakukan KIE bekerjasama dengan Pramuka

5. Melaksanakan KIE melalui kegiatan pameran bekerjasama dengan Kemendagri
6. Membuat link survey yang mudah diakses oleh responden.



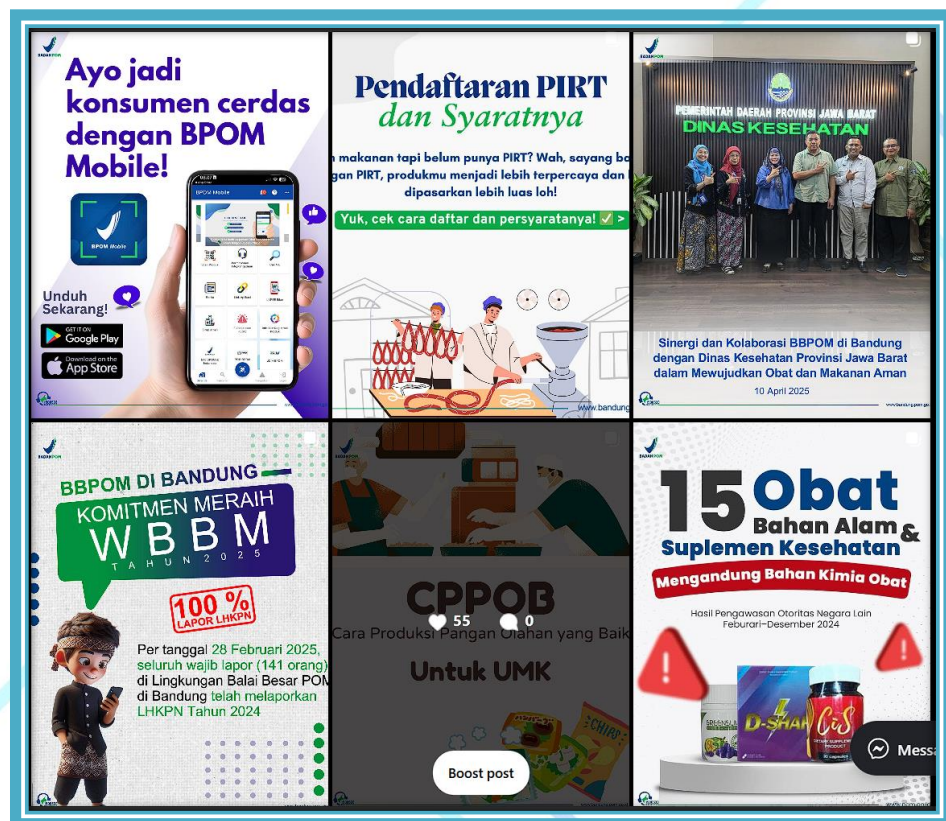
Gambar 3.1.9 Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat pada tanggal 15 April 2025



Gambar 3.1.10 Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat pada tanggal 10 Mei 2025



Gambar 3.1.11 Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat pada tanggal 12 Juni 2025



Gambar 3.1.12 KIE melalui Sosial Media bulan April 2025



Gambar 3.1.13 KIE melalui Sosial Media bulan Mei 2025



Gambar 3.1.14 KIE melalui Sosial Media bulan Juni 2025



Gambar 3.1.15 KIE melalui Media Cetak Koran Galamedia pada Bulan Juni 2025



Gambar 3.1.16 Kegiatan Penyebaran Informasi dalam rangka Hari Jamu, 23 Mei 2025

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Meningkatkan cakupan KIE yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lintas sektor/lembaga lain
2. Melaksanakan KIE melalui webinar tentang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha maupun masyarakat luas.
3. Melaksanakan KIE secara merata di seluruh wilayah BBPOM di Bandung secara komprehensif
4. Menjaga konsistensi kegiatan melalui media social

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Melakukan survei efektivitas KIE secara periodik kepada responden yang telah menerima KIE
2. Melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses cleaning jika terdapat data responden ganda.
3. Memberikan penjelasan terkait pengisian kuesioner efektivitas KIE kepada responden sebelum dilakukan survei efektivitas KIE untuk memastikan pertanyaan pada kuesioner dapat dipahami dengan benar oleh responden
4. Melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil pengukuran masing-masing, untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif.
5. Meningkatkan inovasi pengelolaan media sosial termasuk mengenali karakter/algoritma dari setiap platform untuk penyesuaian konten sesuai dengan target pengguna platform.

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.48

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN
DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	100.13%	35.85%	2.79%	1.79%	Tidak Efisien

BBPOM di Bandung					
------------------	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, indicator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan program yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

- a. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
- b. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.
- c. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
 1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. BBPOM di Bandung melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
 2. Apabila Kabupaten/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.
- Tahapan kegiatan sebagai berikut:
- a. Sekolah Full Intervensi yang berjumlah 17 sekolah dengan tahapan :
 1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
 4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

Jumlah sekolah yang akan akan dikawal pada tahun 2025 adalah 26 sekolah dari 3 kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, dan Kota Bekasi.
 - b. Sekolah Perluasan merupakan sekolah yang mendapatkan sosialisasi Keamanan Pangan di luar dari sekolah yang mendapatkan full intervensi. Jumlah sekolah perluasan yang akan mendapatkan sosialisasi Keamanan Pangan yaitu 60 sekolah.

TABEL 3.1.49

TAHAPAN PJAS

Tahapan	UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)


Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)
Pengawalan	5%	Februari - Desember (TW 2-4)
	100%	

TABEL 3.1.50

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

TRIWULAN II TAHUN 2025

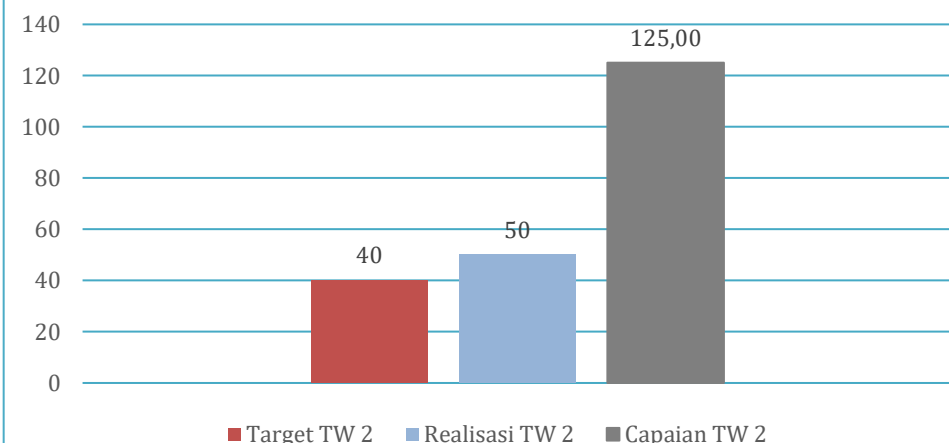
INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
Jumlah sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	40,00%	50,00%	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 40,00%. Progress Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 50,00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **125,00%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Grafik 3.1.27

Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100,00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 50,00% dengan kategori perlu upaya keras.

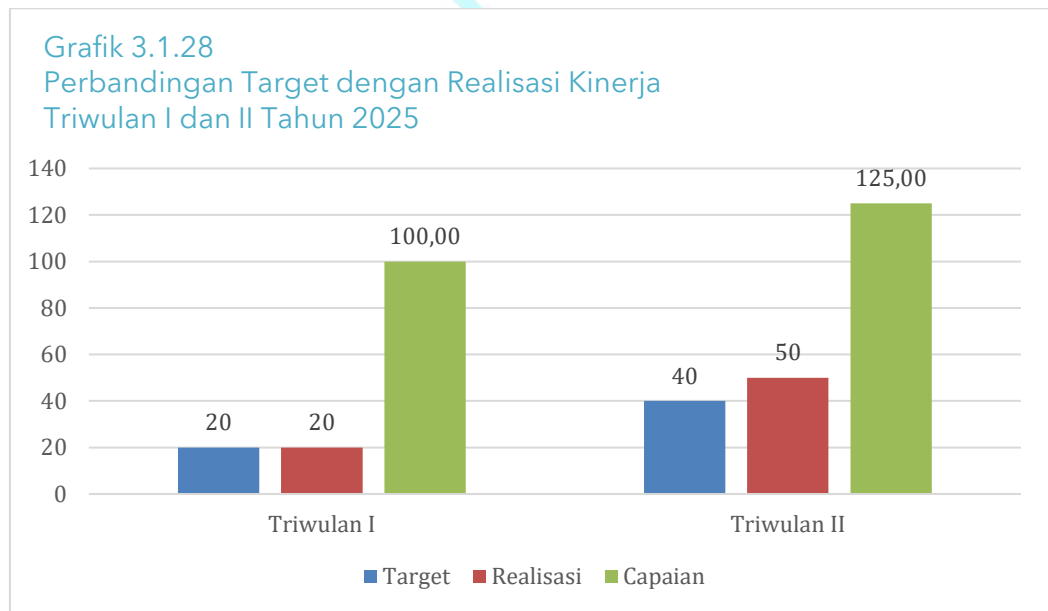
TABEL 3.1.51

PERBANDINGAN REALISASI TW 2 DENGAN TARGET TAHUNAN
SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN
PANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	100,00%	50,00%	50,00%	Perlu Upaya keras	

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan I, target Tahapan Jumlah sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 25% sedangkan dengan target untuk triwulan II sebesar 40% Nilai pencapaian sasaran pada triwulan I sebesar 20 % dan pencapaian sasaran pada triwulan II sebesar 50% . Terjadi peningkatan sebesar 25% pada triwulan II.



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja untuk Indikator Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dilakukan karena koordinasi dan kerja sama yang baik antara BBPOM di Bandung dengan Pemerintah Daerah setempat untuk bersinergi mewujudkan program keamanan pangan.

Kolaborasi antara BBPOM di Bandung dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dalam penjadwalan kegiatan sosialisasi, penentuan sekolah perluasan yang dipilih untuk mengikuti kegiatan sosialisasi.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Kolaborasi antara BBPOM di Bandung dengan Dinas Kesehatan kabupaten kota setempat terkait pengawasan obat dan makanan
2. Koordinasi antara BBPOM di Bandung dengan Dinas pendidikan kabupaten kota setempat untuk melaksanakan program yang telah direncanakan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
3. Publikasi yang masive ke sekolah-sekolah melalui berbagai platform media sosial untuk menyebarkan informasi seputar kegiatan sosialisasi

4. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 27 Mei 2025 ini diikuti oleh 17 sekolah full intervensi di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan 63 sekolah perluasan dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang
5. Untuk pengawalan yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 27 Mei 2025 diikuti oleh 26 Sekolah dari Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, dan Kota Bekasi. Sekolah-sekolah antusias dalam menjalankan program PJAS aman untuk tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1. Berdasarkan informasi kinerja yang didapatkan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat perencanaan pada triwulan III
2. Publikasi terkait Keamanan Pangan perlu terus ditingkatkan melalui berbagai platform media sosial supaya target yang mendapatkan informasi seputar keamanan pangan semakin bertambah.
3. Koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah setempat dapat meningkatkan keberhasilan program yang direncanakan



Gambar 3.1.17 Sosialisasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.52

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN" TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Jumlah sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	125.00%	7.44%	16.81%	15.81%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

3. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawasan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang

mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

TABEL 3.1.53

TAHAPAN PROGRAM DESA PANGAN AMAN


No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari - April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei - Juni atau September -Oktober
4.	Monev	20%	Juli atau November
5.	Pengawasan	10%	Februari - November
	Total Skor	100%	

TABEL 3.1.54

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

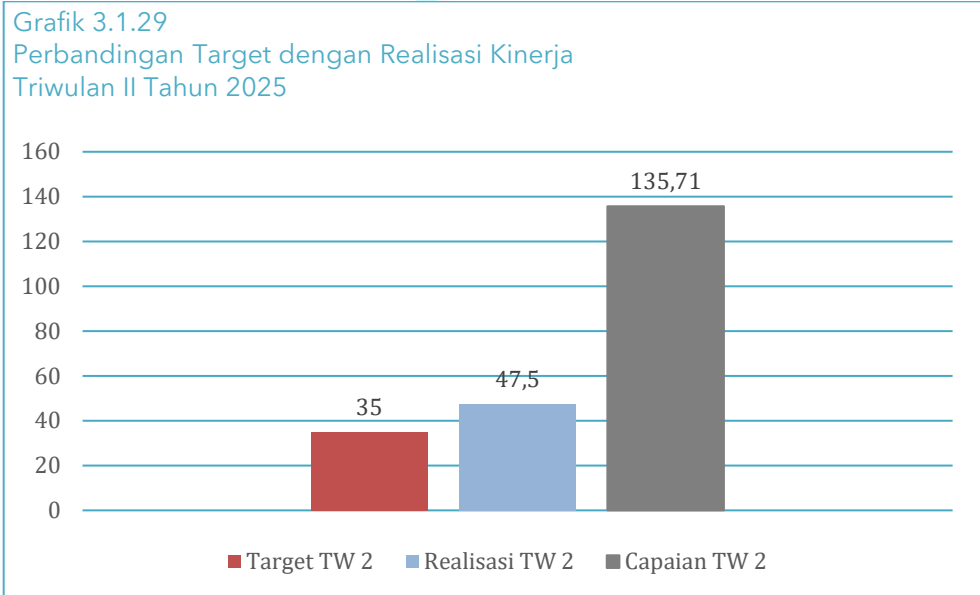
"JUMLAH DESA PANGAN AMAN"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
Jumlah Desa Pangan Aman	35,00%	47.5%	135.71%	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 35,00%. Progres Jumlah Desa Pangan Aman sebesar 47,50%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **135,71%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025


Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100,00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 47,5% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.55

PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN

"JUMLAH DESA PANGAN AMAN "

TRIWULAN II TAHUN 2025

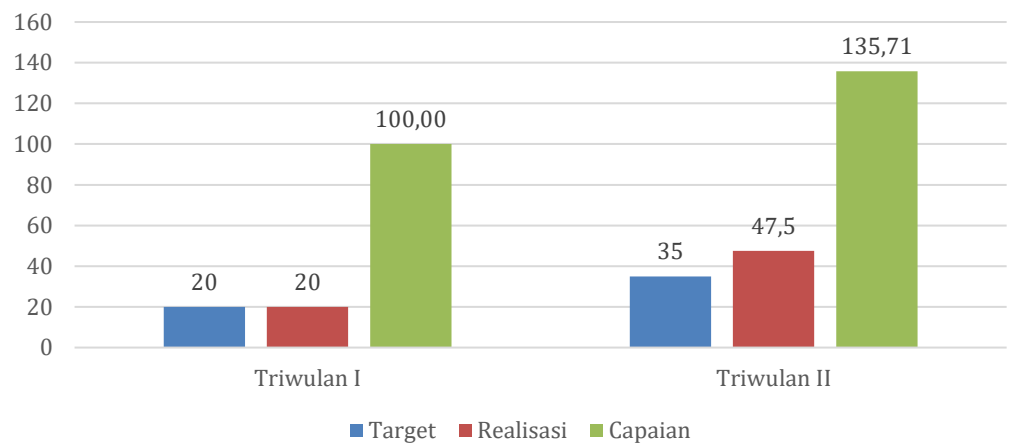
INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
Jumlah Desa Pangan Aman	100,00%	47.5%	47.5%	Perlu Upaya Keras	

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 35.00% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Sedangkan target yang ditetapkan pada triwulan I sebesar 20%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dan II dihitung

terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (100,00%) dan triwulan II (135,71%). Nilai pencapaian sasaran pada triwulan II terjadi kenaikan sebesar sebesar 35,71% dibandingkan pada triwulan I.

Grafik 3.1.30
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I dan II Tahun 2025



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 135,71% disebabkan antara lain :

- Tahapan kegiatan bimtek kader (bobot 25%) dan bimtek komunitas (bobot 20%) yang dijadwalkan dilaksanakan di batch II (Triwulan III) namun dilaksanakan di Triwulan II 2025. Berdasarkan Surat Edaran nomor PM.02.01.5.05.25.09 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) tahun 2025, pelaksanaan Bimtek Kader dan Bimtek Komunitas dapat dilaksanakan di 2 batch yaitu periode Maret – Mei atau Juli – Agustus untuk Bimtek Kader dan periode Mei – Juni atau September – Oktober untuk Bimtek Komunitas. Jumlah desa pangan aman yang diintervensi tahun 2025 sebanyak 6 desa. Sesuai arahan dari pusat dalam pelaksanaan Bimtek Kader dan Bimtek Komunitas untuk sebagian desa (3 desa) yang diintervensi sebaiknya direalisasikan di Triwulan II. Sehingga pelaksanaan bimtek kader dan komunitas yang dijadwalkan di Triwulan III namun direalisasikan di Triwulan II membuat capaian kinerja menjadi 135,7%

- b. Pelaksanaan Desa Pangan Aman dilaksanakan sesuai dengan juknis dan timeline yang telah ditetapkan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut pada periode berikutnya antara lain:

- a. Peningkatan koordinasi dengan Pemda setempat dan OPD terkait di Kabupaten Bandung Barat agar semua rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tepat waktu.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut :

- a. Audiensi dengan Wakil Bupati Bandung Barat beserta jajaran tanggal 24 April 2025.



Gambar 3.1.18 Audiensi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan dengan Wakil Bupati Bandung Barat 24 April 2025

- b. Advokasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan dengan Lintas Sektor tanggal 29 April 2025. Pada kegiatan advokasi dilanjutkan dengan penandatanganan Pernyataan Komitmen untuk melaksanakan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan secara Berkesinambungan oleh semua OPD terkait.



Gambar 3.1.19 Advokasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan dengan Wakil Bupati Bandung Barat 29 April 2025

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.56

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"JUMLAH DESA PANGAN AMAN"
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Jumlah Desa Pangan Aman	135.71 %	14.38%	9.44%	8.44%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Jumlah Desa Pangan Aman disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

4. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata

Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

TABEL 3.1.57

TAHAPAN PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS


No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maret - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10%	Februari - Juli
Total Skor		100%	

TABEL 3.1.58

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

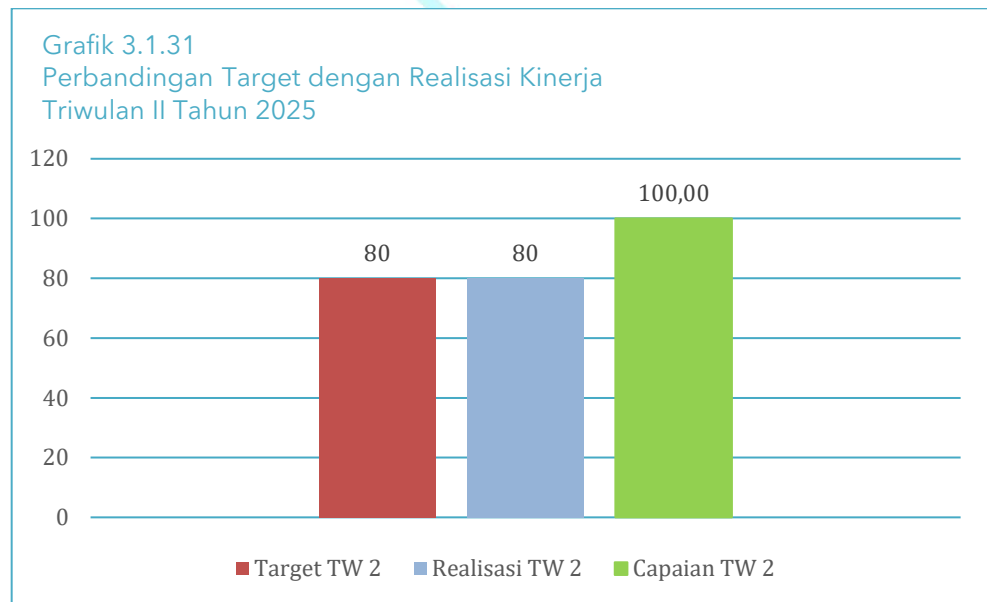
"JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	80,00%	80,00%	100,00%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100,00%. Pada Triwulan II 2025, Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 100,00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **100,00%** dengan kriteria **Baik**.



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 80,00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 80% dengan kategori **Akan Tercapai**.

TABEL 3.1.59

PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN

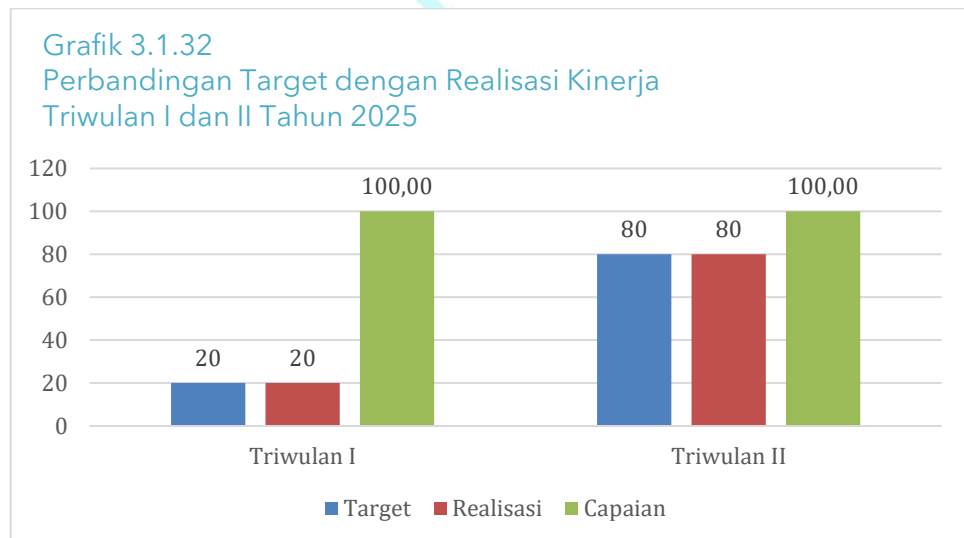
"JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS"

TRIWULAN II TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00%	80,00%	80,00%	Akan Tercapai	

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan I, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 20% target pada triwulan II sebesar 80%. Nilai pencapaian sasaran pada triwulan II terjadi kenaikan sebesar sebesar 40% dibandingkan pada triwulan I.



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan II tahun 2025 disebabkan antara lain :

Pedoman Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas berubah-ubah, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Pembuatan perencanaan sesuai dengan pedoman terbaru.
- Monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian dengan Pedoman Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

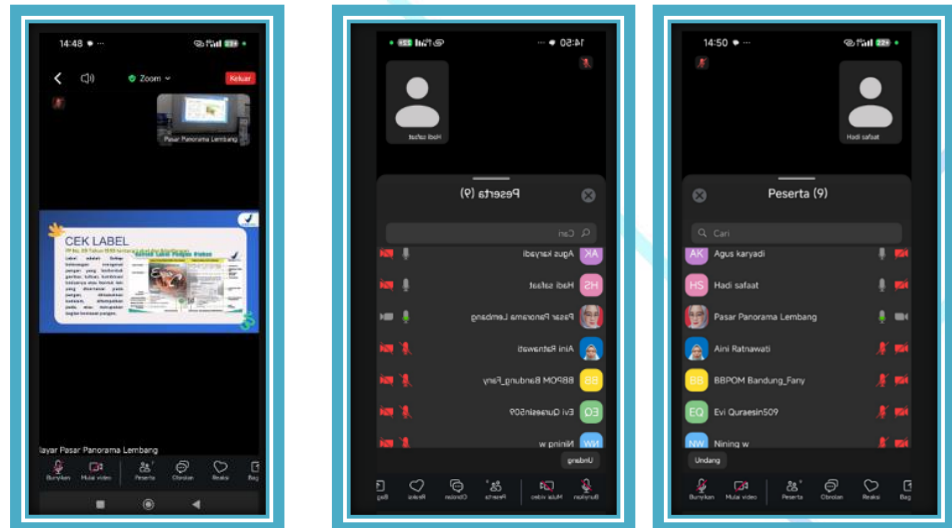
Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan kepada komunitas Pasar Panorama dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025. Kegiatan diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari petugas pasar, pengelola pasar, paguyuban, pedagang dan petugas pasar wilayah II Kabupaten Bandung Barat.



Gambar. 3.1.20 Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan kepada komunitas Pasar Panorama

- b. Pengawasan dilaksanakan secara daring untuk penyegaran materi yang dilaksanakan secara daring yang diikuti oleh petugas pasar yang diintervensi tahun 2025 yaitu Pasar Cipanas Kabupaten Cianjur, Pasar Purwadadi Kabupaten Subang, dan Pasar Jatiasih Kota Bekasi.



Gambar 3.1.21 Pengawasan kegiatan Intervensi Pasar

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi kinerja yang didapatkan digunakan sebagai dasar untuk membuat perencanaan pada TW III
- Pedoman Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang baru dapat menumbuhkan inovasi sosialisasi keamanan pangan dalam bentuk video "Kabayan Ngelmu" yang dapat diakses secara *online* di 1POMJabar.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.60

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00%	34.83%	2.87%	1.87%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi



Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

SASARAN MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM
KEGIATAN KE-5 PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **109.45%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.61.

TABEL 3.1.61

CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-5
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	60,00%	65,67%	109.45%	Sangat Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			109.45%	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diukur dengan membandingkan jumlah UMKM yang memenuhi standar dengan jumlah UMKM yang sedang didampingi pada tahun berjalan. UMKM yang didampingi mencakup UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional. Adapun ruang lingkup UMKM-nya adalah sebagai berikut :

- a) UMKM pangan mencakup skala usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin edar atau PIRT yang akan naik kelas ke MD;
- b) UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor;

UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) dan yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

A. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 - a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

1. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah

UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;

2. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan :
 - a) Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB
 - b) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

1. Untuk UMK Pangan Olahan :
 - a. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
 - b. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

2. Untuk UMKM OBA:
 - a. Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
 - b. *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
 - d. UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
 - e. UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/

atau Tahap 3); dan

f. UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

3. Untuk UMKM Kosmetik:

- a. UMKM yang memproduksi kosmetik;
- b. UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- c. UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- d. UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

TABEL 3.1.62

TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN OLAHAN

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau

				daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret - April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April - Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov - Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

2. Obat Bahan Alam

TABEL 3.1.63

TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM OBAT BAHAN ALAM

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan

	UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator			disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3. Kosmetik

TABEL 3.1.64

TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM KOSMETIK

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Perhitungan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3


- A. Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB / Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan x 100%
- B. jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap / Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan x 100%
- C. Jumlah rekomendasi SPA CPKB / Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

TABEL 3.1.65

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

"PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN"

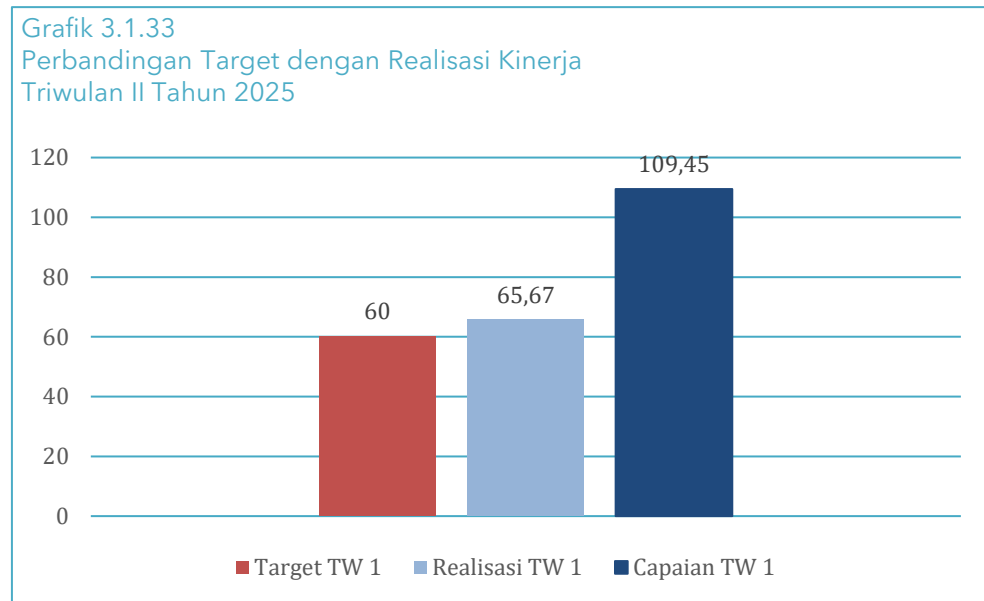
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	60,00%	65.67%	109.45	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 60,00%. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sebesar 65.67%. Dengan demikian, nilai

pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **109.45%** dengan kriteria **Sangat Baik**.



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100% untuk tahapan pendampingan yang dilaksanakan. Jika realisasi kinerja pada triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 65,67% dengan kategori Perlu Upaya Keras.

TABEL 3.1.66

PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN

"PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN"

TRIWULAN II TAHUN 2025

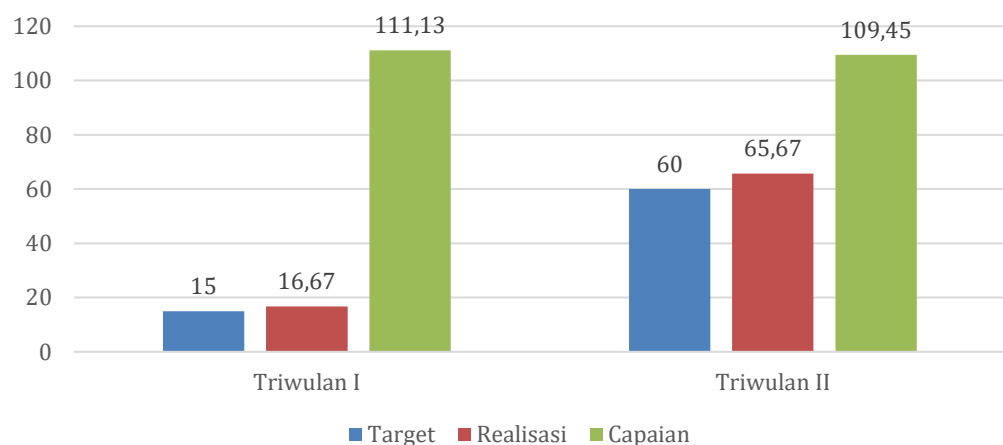
INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara	100,00%	65.67%	65.67%	Perlu Upaya Keras	▲

pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan					
---	--	--	--	--	--

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan II, target yang ditetapkan pada indicator sasaran ini adalah sebesar 60,00%. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan yang dihitung pada triwulan II masih berupa persentase tahapan progress kegiatan fasilitasi dan pendampingan. Realisasi persentase tahapan progress pendampingan pada triwulan I adalah sebesar 16,67% pada triwulan II adalah sebesar 65,67%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dihitung terhadap target triwulan I sebesar 15% dan target triwulan II sebesar 60% maka nilai capaian sasaran pada triwulan I adalah sebesar 111,13 % dan pada triwulan II sebesar 109,45%. Nilai capaian sasaran pada triwulan II terjadi penurunan sebesar 1,68%. Walaupun tampak menurun, namun terdapat perbaikan untuk penilaian kinerja karena pada triwulan I capaian kinerja tidak dapat disimpulkan karena angka capaian > 110 %, sedangkan kriteria untuk capaian pada triwulan II adalah sangat baik.

Grafik 3.1.34
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I dan II Tahun 2025



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan II tahun 2024 disebabkan antara lain :

- Kegiatan Bimtek UMKM Pangan Olahan dilaksanakan lebih cepat dari target waktu yang telah dijadwalkan

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

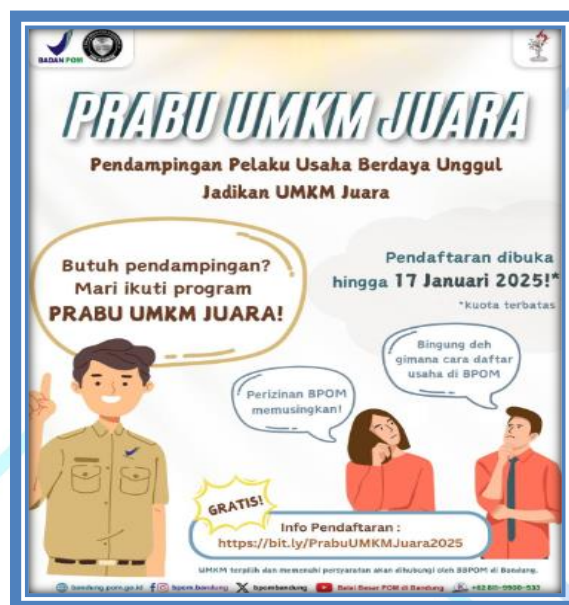
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Tahapan Seleksi Target Pendampingan UMKM

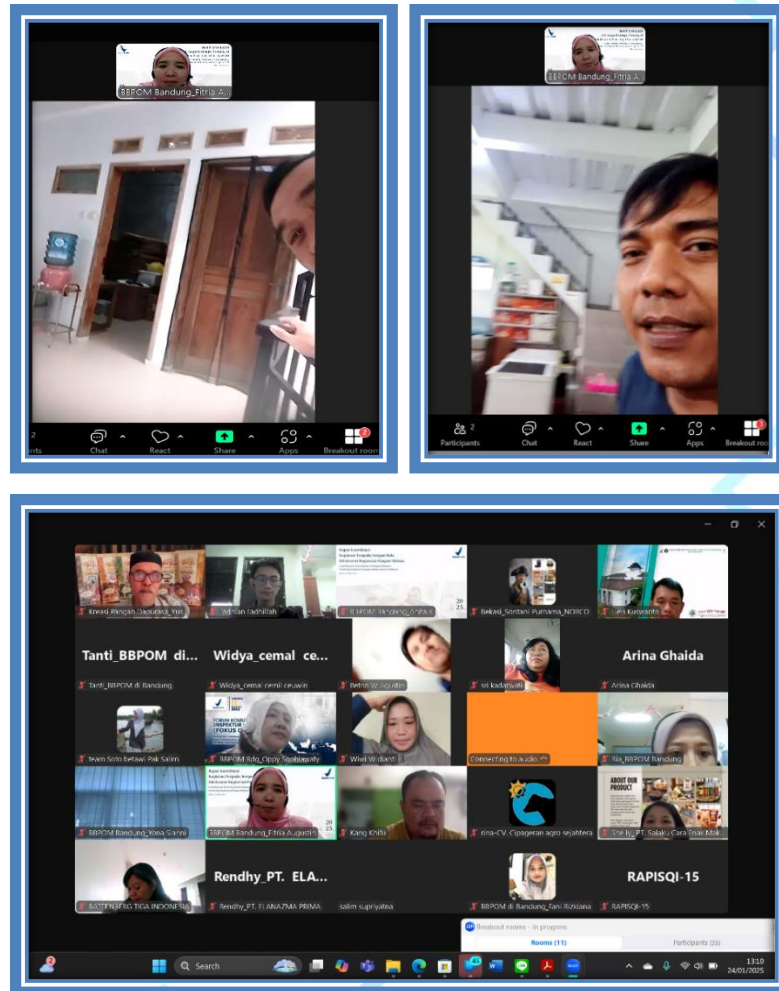
Untuk menetapkan UMKM yang akan dijadikan target dalam program pendampingan UMKM Tahun 2025 dilakukan tahapan seleksi UMKM. Pada tahapan ini BBPOM Di Bandung membuka pendaftaran yang disosialisasikan secara terbuka melalui medsos BBPOM Di Bandung,



Gambar 3.1.22 Informasi pendaftaran pendampingan UMKM

Selain itu BBPOM Di Bandung juga berkolaborasi dengan instansi atau stake holder terkait dimana pada tahapan ini memberikan usulan UMKM yang dapat dicalonkan menjadi target pendampingan.

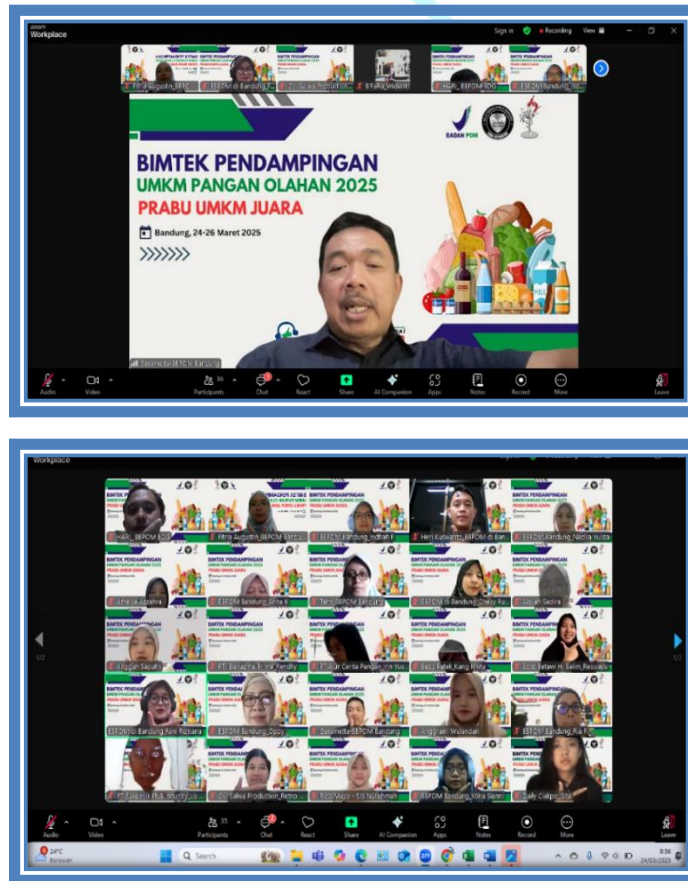
Dari UMKM yang mendaftar secara langsung dan UMKM yang diusulkan oleh stake holder tersebut, dilakukan pemilihan target berdasarkan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh masing-masing UMKM. Untuk UMKM yang lolos tahapan evaluasi dokumen selanjutnya dilaksanakan tahapan seleksi yang dilakukan melalui wawancara terhadap UMK secara daring (aplikasi zoom).



Gambar 3.1.23 Wawancara terhadap UMKM yang lolos seleksi

2. Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan

Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM pangan Olahan yang diselenggarakan secara daring untuk 18 UMKM pangan olahan pada tanggal 24-26 Maret 2025 yang merupakan pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait seluruh aspek Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB), E-Sertifikasi dalam Rangka Izin Penerapan CPPOB dan persyaratan pendaftaran pangan olahan melali E-Reg RBA.



Gambar 3.1.24 Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan

3. Sosialisasi Keamanan Pangan yang diselenggarakan secara daring dan terbuka untuk seluruh UMK pangan olahan pada tanggal 25 Mei 2025 yang merupakan pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait seluruh aspek Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB), E-Sertifikasi dalam Rangka Izin Penerapan CPPOB dan persyaratan pendaftaran pangan olahan melalui E-Reg RBA.



Gambar 3.1.25 Sosialisasi Keamanan Pangan

4. Desk dan Coaching Klinik E-sertifikasi Izin Penerapan CPPOB

Melaksanakan kegiatan Desk Evaluasi Dokumen CAPA Sertifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025 di Aula Balai Besar POM di Bandung dengan mengundang para pelaku usaha yang sedang berproses perizinan Balai Besar POM di Bandung. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait seluruh aspek Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan E-Sertifikasi dalam Rangka Izin Penerapan CPPOB.



Gambar 3.1.26 Desk dan Coaching Klinik E-sertifikasi Izin Penerapan CPPOB

5. Desk Jemput Bola E-registrasi Pangan Olahan

Bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Bagan POM RI, pada tanggal 24 dan 25 Juni 2025 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Desk Registrasi Prabu UMKM Juara yang diikuti oleh 50 pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB oleh Balai Besar POM Di Bandung. Pelaku usaha yang menjadi peserta pada kegiatan ini merupakan UMKM yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dari BBPOM di Bandung untuk tahun 2024 dan 2025. Para pelaku usaha didampingi dan dibantu untuk melakukan pendaftaran akun dan pendaftaran produk pangan olahan oleh petugas dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Balai Besar POM Di Bandung untuk percepatan mendapatkan nomor izin edar. Output dari kegiatan Desk Registrasi ini adalah telah berhasil menerbitkan 23 nomor izin edar (NIE) dan 8 akun Perusahaan.



Gambar 3.1.27 Desk Jemput Bola E-registrasi Pangan Olahan

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, BBPOM Di Bandung memiliki inovasi PRABU UMKM JUARA (Pendampingan Pelaku Usaha agar Berdaya Unggul untuk UMKM Juara yang merupakan inovasi dalam rangka pelaksanaan program pendampingan UMKM. Dalam pelaksanaannya Prabu UMKM Juara berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat diantaranya adalah dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.67

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara	109.45%	47.03%	2.33%	1.33%	Tidak Efisien

pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan					
---	--	--	--	--	--



Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

**SASARAN
KEGIATAN KE-6** **TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN
FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH
KERJA UPT**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **102.43%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.68.

TABEL 3.1.68

CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	58,00%	59.41%	102.43%	Sangat Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			102.43%	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

**PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI
DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI BANDUNG**

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;

- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%.$$


Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3. Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

TABEL 3.1.69

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

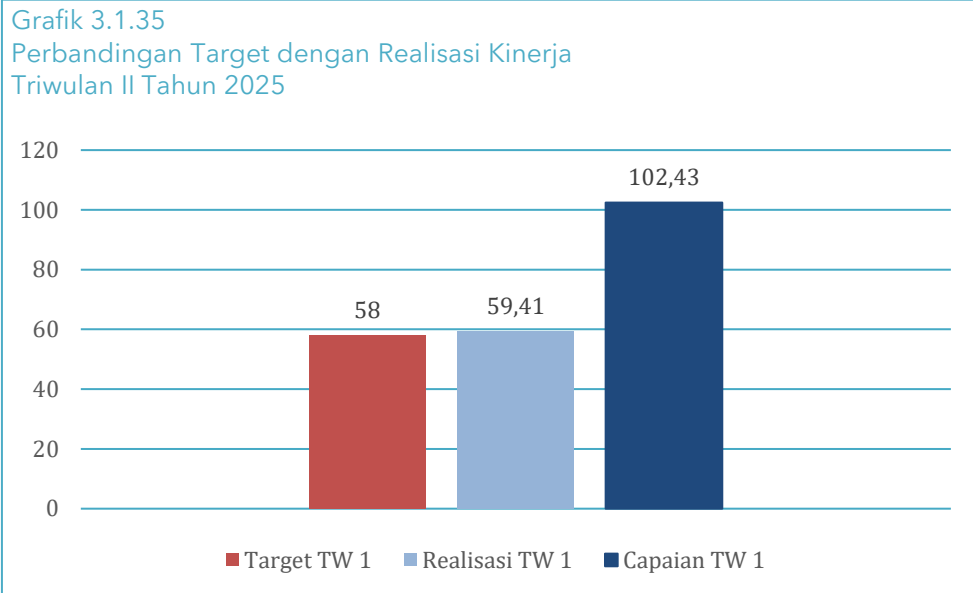
"PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI BANDUNG"

TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	58,00%	59.41%	102.43%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 17,00%. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung sebesar 45,50%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **267,65%** dengan kriteria **Tidak dapat Disimpulkan**.



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 72,00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 100,37% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.70

PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN

"PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI BANDUNG"

TRIWULAN II TAHUN 2025

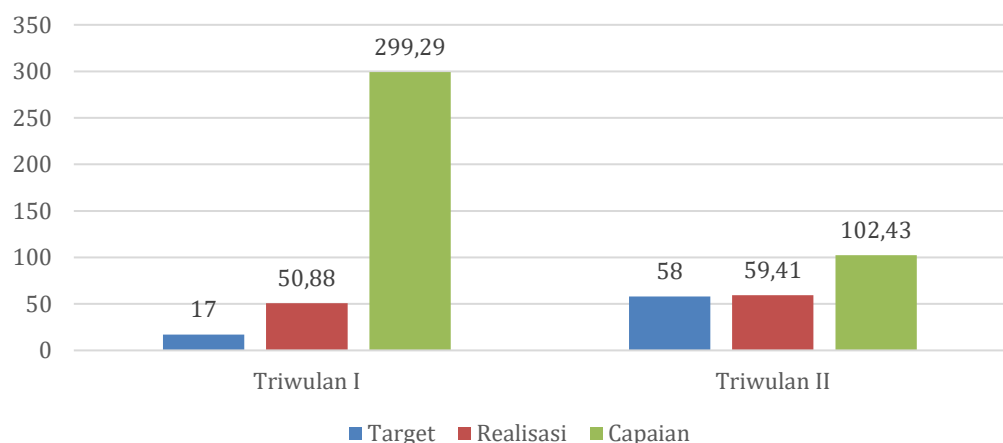
INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase Keberhasilan Penyidikan	72,00%	59.41%	82.51%	Akan Tercapai	

Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung					
--	--	--	--	--	--

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 58%. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung pada triwulan I sebesar 50.88% dan triwulan II sebesar 59.41%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dan II dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (299.29%) dan triwulan II (102.43%). Nilai pencapaian sasaran pada triwulan II terjadi penurunan sebesar sebesar 196.86% dibandingkan pada triwulan I dikarenakan pada Triwulan I formula perhitungan dan target belum dilakukan penyesuaian. Namun pada dasarnya Capaian Triwulan II lebih baik dibandingkan Triwulan I.

Grafik 3.1.36
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I dan II Tahun 2025



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan II tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Adanya jejaring informasi dalam pengumpulan bahan keterangan yang baik, sehingga didapatkan informasi awal yang akurat terkait terjadinya tindak pidana Obat dan Makanan. Pada bulan Juni 2025 dilakukan operasi penindakan terhadap 3 (tiga) sarana yang diduga melakukan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dimana informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana tersebut berasal dari jejaring informasi yang dimiliki.
- Koordinasi dan komunikasi yang telah terjalin baik dengan ICJS yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Korwas PPNS Polda Jawa Barat sehingga penyelesaian berkas perkara dapat dilaksanakan dengan baik dalam waktu se-optimal mungkin. Pada Triwulan II Tahun 2025, koordinasi yang baik tersebut menghasilkan terlaksananya Tahap I atas 1 (satu) perkara yang operasi penindakannya dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025. Selain itu, pada Triwulan II Tahun 2025 juga terdapat 1 (satu) perkara *carry over* yang ditanyakan P-21 dan dilakukan Tahap II terhadap 2 (dua) perkara *carry over*.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Memaksimalkan investigasi atau penelusuran kasus yang didasarkan pelaporan dari masyarakat melalui Poksi Infokom dan diteruskan ke Poksi Penindakan sehingga dapat dihasilkan output berupa perkara dari pelaporan tersebut.
- Membangun jejaring informasi secara berkelanjutan tentang kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang terjadi di wilayah catchment area BBPOM di Bandung.
- Optimalisasi pemberkasan perkara agar perkara yang masih berjalan dapat segera dilakukan Tahap I.
- Memelihara koordinasi berkelanjutan dengan pejabat di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar dan Metro Jaya khususnya dalam proses pelaksanaan bantuan teknis dan taktis sehingga dapat menunjang kegiatan operasi penindakan dan sepanjang proses penyidikan.
- Meningkatkan koordinasi dengan Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk setiap berkas perkara yang sedang ditangani agar penyelesaian berkas dapat dilakukan secara efektif dan efisien

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- **Penyidikan Obat dan Makanan**

Perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada Triwulan II tahun 2025, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan yang ditangani sebanyak 9 perkara dengan rincian 1 (satu) perkara tahun 2025 dan 8 (delapan) perkara carry over.

Perkara tahun 2025 yang sedang ditangani merupakan tindak lanjut dari operasi penindakan pada awal Maret 2025 yaitu perkara terkait Obat Bahan Alam illegal/ mengandung BKO. Terhadap perkara ini sudah ditetapkan tersangka dan direncanakan akan dilakukan Tahap I pada Triwulan III tahun 2025.

Perkara carry over sebanyak 8 (delapan) perkara merupakan perkara tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah perkara carry over semula berjumlah 10 (sepuluh) perkara di awal tahun 2025. Atas intensifikasi yang dilakukan PPNS, maka pada Triwulan II Tahun 2025 terhadap 2 (dua) perkara dapat diselesaikan hingga tahap 2. Adapun 6 (enam) perkara carry over yang tersisa berada pada tahap P-21 dan sedang diusahakan terkait penyelesaiannya hingga Tahap II melalui intensifikasi dan koordinasi terhadap lintas sektor terkait.

- **Investigasi Awal**

Kegiatan investigasi awal adalah kegiatan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi dari masyarakat, temuan hasil dari Kelompok Substansi Pemeriksaan baik dalam rangka pemeriksaan rutin maupun dalam rangka sertifikasi, pengaduan masyarakat melalui Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi, berdasarkan surat dan/atau informasi dari Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media online (patroli siber). Selama Triwulan II tahun 2025, dilakukan kegiatan investigasi awal sebanyak 24 (dua puluh empat) kali terhadap 36 (tiga puluh enam) sarana dengan hasil sejumlah 3 (tiga) sarana dinyatakan berpotensi untuk dapat dilakukan penindakan.

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Mengingat bahwa capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 sebesar **299,29%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, maka pada Triwulan II dilakukan penyesuaian target berdasarkan laporan kemajuan perkara yang sedang ditangani. Adapun target Triwulan II tahun 2025 telah disesuaikan menjadi sebesar 53,0 % dari semula 26,0 %.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.71

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI BANDUNG"
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	102.43%	20.64%	4.96%	3.96%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN KEGIATAN KE-7
TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMANTAUAN SIBER DAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **100,00%** dengan kriteria **BAIK**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.72.

TABEL 3.1.72

CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-7
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
1. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	50,00%	50,00%	100,00%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100,00%	Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

PERSENTASE KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN ANALISIS PENJEJAKAN DIGITAL YANG DISELESAIKAN OLEH BBPOM DI BANDUNG

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - a. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 - b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

TABEL 3.1.73

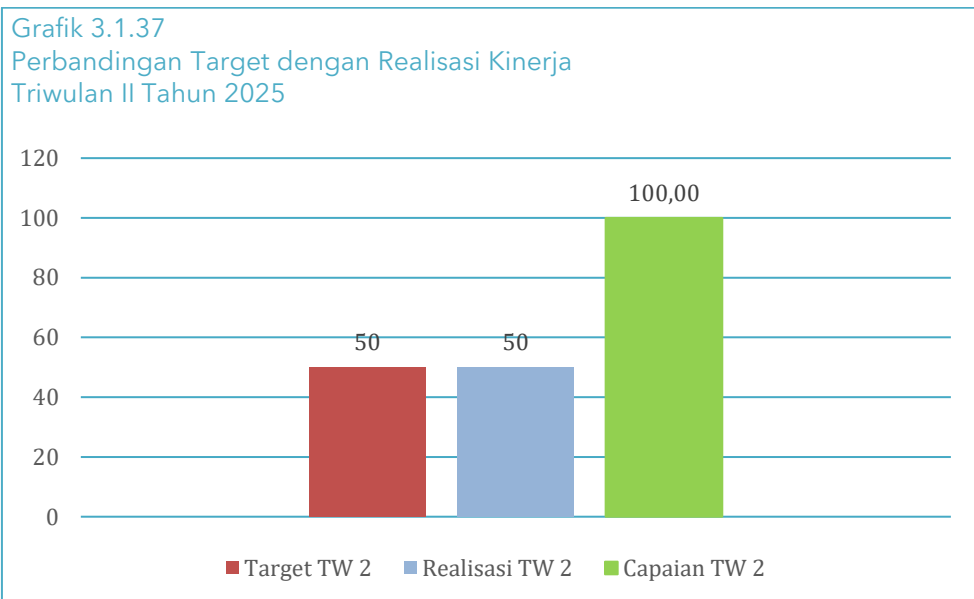
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

"PERSENTASE KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN ANALISIS
PENJEJAKAN DIGITAL YANG DISELESAIKAN OLEH BBPOM DI BANDUNG"
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	50,00%	50,00%	100,00%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50,00%. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung sebesar 50,00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **100,00%** dengan kriteria **Baik**.



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 50,00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 55,56% dengan kategori Akan Tercapai.

TABEL 3.1.74

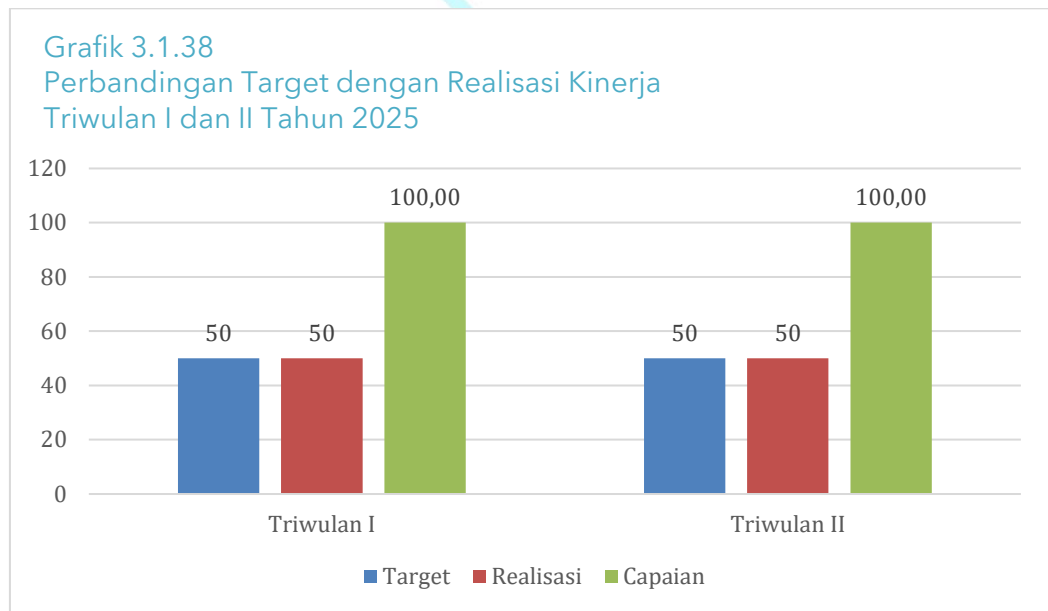
PERBANDINGAN REALISASI TW 2 DENGAN TARGET TAHUNAN

"PERSENTASE KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN ANALISIS
PENJEJAKAN DIGITAL YANG DISELESAIKAN OLEH BBPOM DI BANDUNG"
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90,00%	50,00%	55,56%	Akan Tercapai	

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50.00 % sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung untuk Triwulan I dan Triwulan II masing-masing adalah sebesar 50,00%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dan II dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dan triwulan II masing - masing adalah sebesar 100 %. Nilai pencapaian sasaran pada triwulan II terjadi kenaikan sebesar sebesar 0,20% dibandingkan pada triwulan I.



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan II tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Pelaksanaan patrol siber menggunakan aplikasi *inawebcrawler* yang memudahkan petugas dalam input dan olah data. Dalam aplikasi tersebut tersedia menu pengaturan yang memungkinkan *cut-off* data dilakukan secara otomatis pada waktu yang telah diaturkan. Hal ini menyebabkan pelaporan patrol siber dapat dilaksanakan tepat waktu.
- Manajemen personil juga memberikan kontribusi penting dalam keberhasilan capaian kinerja ini. Kepatuhan seluruh personil untuk input data sebelum masa *cut-off* sehingga ketika *cut-off* dilakukan, jumlah data yang ter-input sudah mencukupi. Penanggung jawab kegiatan selalu memberikan peringatan kepada personil untuk melakukan entry data dan memastikan sudah cukup data yang ter-input ketika melakukan *cut-off*.
- Kegiatan penyusunan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan telah direncanakan akan diselesaikan pada TW IV tahun 2025. Telah ditetapkan target tahun 2025 UPT sebanyak 1 analisis yang kemudian akan diberikan penilaian oleh Kepala UPT.

- Kegiatan pelaporan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal juga telah ditetapkan sebanyak 1 laporan tiap tahun. Direncanakan pelaporan akan dilaksanakan di TW IV tahun 2025. Saat ini sedang dilakukan inventarisasi dan pengumpulan terhadap analisis/ *policy brief* yang diterbitkan oleh Direktorat Cegah Tangkal untuk kemudian dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Pada Triwulan II Tahun 2025, Penanggung Jawab kegiatan menjalani cuti besar dalam rangka pelaksanaan ibadah haji. Personil pengganti telah memahami tugas yang dilaksanakan sehingga pelaporan siber pada Triwulan II Tahun 2025 tidak menemukan kendala.
- Memelihara dan meningkatkan kepatuhan personil dalam melakukan patroli siber dan input data melalui aplikasi yang ditentukan.
- Melakukan inventarisasi rekomendasi analisis/*policy brief* Dit. Cegah Tangkal yang ditujukan kepada UPT dan memantau pelaksanaan rekomendasi terutama yang melibatkan poksi lain.
- Melakukan koordinasi dengan poksi-poksi UPT dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi agar sesuai dengan yang diharapkan.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Penelusuran Siber

Penelusuran siber dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan yakni Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber). Patroli siber dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan yang dilakukan secara daring terutama terhadap komoditi yang diduga illegal, seperti : TIE, BKO, Iklan TMS, dll. Perkembangan pemasaran produk melalui media daring seperti media social, platform e-commerce, dan website yang semakin meningkat merupakan potensi besar terjadinya pelanggaran. Patroli siber dilakukan dengan mengumpulkan data terkait peredaran produk

meliputi data produk (identitas, dugaan pelanggaran, jumlah terjual, jumlah stok, dan harga jual), data penjual (nama penjual, platform yang digunakan, lokasi penjual) dan alamat atau link penjualan beserta *capture* laman penjualan. Seluruh data tersebut umumnya tersedia di platform yang digunakan dan tidak membutuhkan keahlian atau peralatan khusus dalam pengumpulannya.

Pengumpulan data dapat dilakukan dimana dan kapan saja serta oleh siapa saja. Pada pelaksanaannya, secara internal Poksi Penindakan menetapkan target minimal 50 (limapuluh) link penjualan untuk dilaporkan tiap bulan. Pada Triwulan II Tahun 2025 ditemukan 187 *link* penjualan online yang terindikasi melakukan pelanggaran. Terhadap seluruh *link* tersebut direkomendasikan untuk dilakukan takedown.

Berikut rekapitulasi hasil patroli siber yang dilakukan selama TW II tahun 2025 :

TABEL 3.1.75

REKAPITULASI HASIL PATROLI SIBER

Berdasarkan Komoditi	
Komoditi	Jumlah
Obat	8
Obat Bahan Alam	109
Kosmetik	41
Suplemen Kesehatan	21
Pangan	8
Jumlah	187

Berdasarkan Wilayah	
Kota/Kab	Jumlah
Kota Bandung	57
Kab. Bandung	55
Kab. Bandung Barat	3
Kota Cimahi	16
Kota Bekasi	10
Kab. Bekasi	16
Kab. Cianjur	1
Kota Cirebon	1
Kab. Cirebon	13
Kab. Garut	1
Kab. Indramayu	6
Kab. Majalengka	1
Kota Sukabumi	1
Kab. Sukabumi	1
Kab. Sumedang	2
Jumlah	187

Kemudian terhadap 1 (satu) link dengan penjualan terbesar dilakukan profiling menggunakan aplikasi yang sama dengan yang digunakan dalam pelaporan patrol siber. Hasil patrol siber dan profiling sepenuhnya dikelola dan diolah oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI.

2. Pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan

Fungsi cegah tangkal di UPT dilaksanakan melalui penyusunan analisis kerawanan kejahatan dan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal. Penyusunan analisis dilakukan dengan membuat kajian/ analisis terhadap isu-isu kejahatan sesuai dengan wilayah UPT. Termasuk dalam kegiatan ini adalah Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP). Data yang di-input ke dalam aplikasi bersumber dari hasil kegiatan intelijen, hasil kegiatan penindakan/ penyidikan, hasil pengujian pihak ketiga di UPT, data permohonan bantuan ahli yang ditujukan kepada UPT dari pihak Kepolisian. Berdasarkan hasil monev dari Dit Cegah Tangkal Badan POM RI, pemetaan kerawanan kejahatan yang dilakukan BBPOM di Bandung pada TW II tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh data yang di-input 100,0 % disetujui (tidak ada data ditolak/ di-hold/perlu perbaikan).

Terkait penyusunan analisis kerawanan kejahatan yang akan dilaksanakan UPT, saat ini Poksi Penindakan sedang menilai isu yang berpotensi diangkat ke dalam analisis.

Terhadap rekomendasi tindak lanjut kerawanan kejahatan, baik yang bersumber dari analisis Dit Cegah Tangkal maupun yang bersumber dari analisis yang disusun oleh BBPOM di Bandung, dilakukan hal-hal berikut:

- Penyebaran informasi rekomendasi kepada poksi-poksi lain yang terkait melalui Ketua Tim kerja.
- Komunikasi intensif dengan para ketua tim kerja terkait mengenai rekomendasi yang diberikan dengan harapan agar ketua tim dapat melakukan sinergi dalam hal pelaksanaan rekomendasi dengan pelaksanaan tugas rutin.

- Secara rutin memantau tindak lanjut/ feedback dari poksi-poksi terkait.
- Penyusunan laporan feedback untuk disampaikan pada TW IV tahun 2025.

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi dalam upaya mencapai target kinerja dan mengukur performa poksi di BBPOM di Bandung
2. Analisa kebutuhan sumber daya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mempertahankan/ meningkatkan capaian kinerja. Pada kondisi actual tidak ada anggaran khusus yang ditujukan untuk pelaksanaan sasaran kegiatan tersebut.
3. Penggunaan data silang yang mendukung tercapainya kinerja fungsi lain, misalnya : data penelusuran siber dapat digunakan sebagai *raw data* dalam penyusunan analisis kerawanan kejahatan BBPOM di Bandung.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.76

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

"PERSENTASE KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN ANALISIS
PENJEJAKAN DIGITAL YANG DISELESAIKAN OLEH BBPOM DI BANDUNG"
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW II	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	100,00%	0,00%	-%	-%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN
KEGIATAN KE-8 LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang dihitung pada akhir Tahun. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.77.

TABEL 3.1.77

CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA	
1. Indeks Pelayanan Publik UPT	0,00%	0,00%	0,00%	-	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			0,00%	-	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2. Profesionalitas SDM (25%);
3. Sarana Prasarana (18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6. Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka

POM. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik:

75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Kategori nilai:

TABEL 3.1.78

KATEGORI NILAI INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Di triwulan II telah dilakukan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Standar Pelayanan tahun 2025. Terhadap masukan yang telah diterima, dilakukan penetapan Standar Pelayanan, sosialisasi internal tentang Standar Pelayanan, selanjutnya dilakukan penetapan maklumat pelayanan. Terdapat 2 (dua) jenis layanan baru di tahun 2025, sehingga total ada 10 (sepuluh) jenis layanan yang diberikan UPP BBPOM di Bandung.

Kegiatan lain yang dilakukan selama triwulan II yang mendukung antara lain adalah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) mandiri, monitoring dan evaluasi petugas pelayanan publik, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, pengembangan sistem informasi pelayanan publik, dan layanan pengaduan, serta pemenuhan persyaratan dalam keikutsertaan inovasi Prabu UMKM Juara - BBPOM di Bandung dalam kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB.

SASARAN TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT
KEGIATAN KE-9 ORGANISASI YANG OPTIMAL

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang diukur pada akhir Tahun. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.79.

TABEL 3.1.79

CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9
TRIWULAN II TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
2. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
4. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			0,00%	-	-

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. NILAI PEMBANGUNAN ZI UPT BALAI BESAR DI BANDUNG

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

- Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan.
- Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu :

TABEL 3.1.80

KRITERIA PENILAIAN PMPZI

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

2. NILAI AKIP BALAI BESAR DI BANDUNG

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal;
5. Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

TABEL 3.1.81

BOBOT KOMPONEN PENILAIAN AKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12

4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

TABEL 3.1.82

PREDIKAT NILAI AKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

3. NILAI KINERJA ANGGARAN BALAI BESAR DI BANDUNG

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran :

TABEL 3.1.83

KATEGORI KONVERSI NILAI KINERJA ANGGARAN

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

4. INDEKS MANAJEMEN RISIKO BALAI BESAR DI BANDUNG

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

TABEL 3.1.84

KARAKTERISTIK TINGKAT MATURITAS

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

TABEL 3.1.85

NILAI MATURITAS MANAJEMEN RISIKO

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas :

Skor Maturitas = Skor Total / 16

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko.
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama.

3.2. RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Berdasarkan data kinerja pada periode sebelumnya, Tindak Lanjut atas rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya pada setiap indicator adalah sebagai berikut :

TABEL 3.2.1

MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
TAHUN 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Aplikasi SIPT belum menampilkan data timeline pengujian (SLA) untuk sampel rutin Sediaan Farmasi, baru diterapkan pada pengujian sampel pihak ketiga, sehingga pemantauan masih dilakukan secara manual	Sistem pemantauan SLA sampel rutin Sediaan Farmasi dilakukan secara manual yang dibuat internal			Sistem pemanta uan SLA sampel rutin Sediaan Farmasi secara manual yang dibuat internal	Desem ber 2025	
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Sarana pelayanan yang ada di wilayah Balai Besar POM Bandung belum secara rutin melakukan pelaporan efek samping obat yang terjadi di sarana	monitoring dashboard pelaporan ESO Pendampingan kepada yankes baik secara daring (WAG) maupun secara langsung	Maret 2025	KIE pelaporan KTD dan ESO kepada tenaga kesehatan. Sampai dengan 30 Maret 2025 terdapat 3 sarana yang sudah secara aktif melakukan pelaporan ESO	Monitori ng evaluasi hasil KIE yang telah diberika n	Desem ber 2025	Minimal 26% (24 sarana) darijumlah sarana yang diberikan Bimtek pelaporan KTD/ ESO (90 sarana) melakukan pelaporan KTD/ ESO kepada BPOM melalui e-meso
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel Pangan Olahan belum dapat diuji karena alat ICPMS rusak	Perbaikan alat ICPMS	Maret 2025	Alat ICPMS telah diperbaiki	-	-	Sampel Pangan Olahan dapat diuji menggunakan alat ICPMS
		Sampel Pangan Olahan belum dapat diuji karena alat AAS rusak	Perbaikan alat AAS	Septembe r 2025		Perbaika n alat AAS	Septem ber 2025	
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Pengujian sampel dilakukan saat sampel KLB masuk ke Laboratorium Pengujian	Pembentukan tim pengujian sampel KLB	April 2025	Tim Pengujian sampel KLB telah dibentuk	-	-	Tim Pengujian telah siap untuk melakukan pengujian sampel KLB

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel PIRT belum dapat diuji karena alat ICPMS rusak	Perbaiki alat ICPMS	Maret 2025	Alat ICPMS telah diperbaiki	-	-	Sampel PIRT dapat diuji menggunakan alat ICPMS
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	CAPA yang diterima jumlahnya belum memadai	1) Menyampaikan surat pengingat CAPA/ respon kepada pelaku usaha atau instansi terkait baik melalui aplikasi Satu POM Jabar atau manual 2) Pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha berupa Desk CAPA 3) Pelaksanaan koordinasi terkait respon hasil pengawasan dengan instansi terkait 4) Pemantauan CAPA melalui aplikasi Galura Inspeksi/ Satu POM Jabar	Desember 2025	1) Membuat surat penagihan CAPA kepada pelaku usaha ; 2) menghubungi sarana untuk dilakukan desk CAPA	Fitur permohonan desk CAPA pada aplikasi Satu POM Jabar	Desember 2025	Minimal 85% stakeholder (pelaku usaha dan instansi terkait) memberikan respon tindak lanjut atau rekomendasi hasil pemeriksaan sarana sediaan farmasi dan pangan olahan
		Pemantauan CAPA masih dilakukan secara manual yang diambil dari email corporate	Sistem pemantauan CAPA yang dibuat internal	Desember 2025	Pemantauan CAPA sudah bisa dilakukan melalui aplikasi Satu POM Jabar	Penyempurnaan pemantauan CAPA melalui aplikasi Satu POM Jabar	Desember 2025	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemenuhan standar sesuai pedoman belum menggunakan data dari SIPT, masih menggunakan data monev manual	Penarikan data dari SIPT dilakukan secara rutin setiap awal bulan (tanggal 5 bulan berikutnya) dari akun admin UPT dan diolah menggunakan aplikasi satuPOM JABAR	Bulan April 2025	Penggunaan data dari SIPT untuk monev capaian produksi telah dilaksanakan untuk Monev TW 1 TAHUN 2025	Penggunaan aplikasi SATUPO M Jabar belum diimplementasikan, masih proses perbaikan, untuk pengolahan perhitungan timeline menggunakan excel	Bulan Juli 2025	
8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRT) yang diperiksa dan	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemenuhan standar sesuai pedoman belum	Penarikan data dari SIPT dilakukan secara rutin setiap awal bulan (tanggal 5 bulan berikutnya) dari akun admin UPT dan diolah	Bulan April 2025	Penggunaan data dari SIPT untuk monev capaian produksi telah dilaksanakan	Penggunaan aplikasi SATUPO M Jabar belum	Bulan Juli 2025	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan	menggunakan data dari SIPT, masih menggunakan data monev manual	menggunakan aplikasi satuPOM JABAR		untuk Monev TW 1 TAHUN 2025	diimple mentasikan, masih proses perbaik an, untuk pengola han perhitun gan timleine menggu nakan excel		
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1) Pengumpulan database hasil pemeriksaan sarana, pemantauan surat TL dan CAPA dilakukan secara manual dan melalui SIPT; 2) Tidak ada pemantauan timeline, kesesuaian TL pada SIPT 3) Surat TL yang diupload pada SIPT belum disahkan oleh kepala UPT	1) Pemantauan data base hasil pemeriksaan, pengiriman surat TL, penerimaan dan evaluasi CAPA pada aplikasi Galura Inspeksi 2) Pemantauan timeline, kesimpulan hasil pemeriksaan dan kesesuaian TL pada SIPT 3) Pemantauan timeline dan kesesuaian surat TL pada aplikasi Srikandi	Desember 2025	Pengumpulan database hasil pemeriksaan sarana, pengiriman surat TL, pemantauan CAPA sudah dilakukan melalui aplikasi Satu POM Jabar	Penyem purnaan aplikasi Satu POM Jabar terkait input data, pengelo mpokka n data dan bentuk laporann ya	Desem ber 2025	- Memiliki database hasil pemeriksaan sarana secara digital - Pemantauan hasil pemeriksaan sarana secara digital - memudahkan analisa data - Data dapat diakses setiap saat
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1) Pengumpulan database hasil pemeriksaan sarana, pemantauan surat TL dan CAPA dilakukan secara manual dan melalui SIPT; 2) Tidak ada pemantauan timeline, kesesuaian TL pada SIPT 3) Surat TL yang diupload pada SIPT belum disahkan oleh kepala UPT	1) Pemantauan data base hasil pemeriksaan, pengiriman surat TL, penerimaan dan evaluasi CAPA pada aplikasi Galura Inspeksi 2) Pemantauan timeline, kesimpulan hasil pemeriksaan dan kesesuaian TL pada SIPT 3) Pemantauan timeline dan kesesuaian surat TL pada aplikasi Srikandi	Desember 2025	Pengumpulan database hasil pemeriksaan sarana, pengiriman surat TL, pemantauan CAPA sudah dilakukan melalui aplikasi Satu POM Jabar	Penyem purnaan aplikasi Satu POM Jabar terkait input data, pengelo mpokka n data dan bentuk laporann ya	Desem ber 2025	- Memiliki database hasil pemeriksaan sarana secara digital - Pemantauan hasil pemeriksaan sarana secara digital - memudahkan analisa data - Data dapat diakses setiap saat
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan							
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemenuhan standar	Penarikan data dari SIPT dilakukan secara rutin setiap awal bulan (tanggal 5 bulan berikutnya) dari akun admin	Bulan April 2025	Penggunaan data dari SIPT untuk monev capaian produksi telah	Penggu naan aplikasi SATUPO	Bulan Juli 2025	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	sesuai pedoman belum menggunakan data dari SIPT, masih menggunakan data monev manual	UPT dan diolah menggunakan aplikasi satuPOM JABAR		dilaksanakan untuk Monev TW 1 TAHUN 2025	M Jabar belum diimple mentasik an, masih proses perbaik an, untuk pengola han perhitun gan timleine menggu nakan excel		
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Pemenuhan metoda analisa terverifikasi, ruang lingkup pengujian, peralatan dan kompetensi laboratorium masih belum optimal	Pembuatan roadmap peningkatan nilai pemenuhan metoda analisa terverifikasi, ruang lingkup pengujian, peralatan dan kompetensi laboratorium	Juni 2025	Rencana kegiatan verifikasi metode analisa, kalibrasi alat lab, dan peningkatan kompetensi laboratorium	Peningk atan nilai ruang lingkup dengan mengad akan sampel yang tidak tersedia, pelaksan aan peningk atan kompete nsi penguji dan pengada an alat laborato rium baru	Desem ber 2025	
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1) indeks fektifitas KIE pada TW 1 memenuhi target sebesar 87,18%, namun jumlah target responden tatap muka belum memenuhi target hal ini dikarenakan Rencana Pelaksanaan KIE dengan tomas belum ada penjadwalan. Target responden untuk KIE Media juga belum memenuhi target dikarenakan jumlah responden yang mengisi tidak	Melakukan koordinasi dengan tenaga Ahli untuk membuat penjadwalan untuk meningkatkan responden tatap muka. Untuk responden media diupayakan dengan membuat link dan survey lebih mudah serta ajakan kepada rsponden untuk mengisi survey efektifitas	Desember 2025	Pelaksanaan KIE di minggu Ke- 3 hanya dilakukan di 2 titik dengan jumlah peserta 400 orang. Untuk responden media sudah dilakukan publikasi ajakan pengisian survey.	Penjadw alan untuk penyele nggaraan KIE bersama 8 tomas yang lain belum dapat disusun. Untuk KIE media dilakuka n pembua tan infografi s yang	Desem ber 2025	sudah dilaksanakan kegiatan KIE untuk 2 tomas sejumlah 4 titik dengan jumlah responden sebaran bulan 25 April 2025 untuk media 20 responden dan untuk tatap muka sejumlah 30 responden

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
		dapat secara tepat diperkirakan.				lebih menarik		
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Advokasi dengan lintas sektor belum dilaksanakan	Memastikan tahapan advokasi dengan lintas sektor berjalan dengan baik sehingga pemerintah daerah setempat dapat berkomitmen untuk mereplikasi program sekolah dengan PJAS aman secara menyeluruh	April 2025	Pelaksanaan Advokasi	-	April 2025	Advokasi dengan Lintas Sektor telah dilaksanakan
		Pemberdayaan SAKA POM belum optimal	Memberdayakan organisasi seperti Pramuka (SAKA POM) untuk mensosialisasikan keamanan pangan pada komunitas sekolah	Desember 2025	-	Melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah dengan memberdayakan SAKA POM	Desember 2025	
		Masih kurangnya kesadaran sekolah tentang keamanan pangan	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran sekolah akan pentingnya keamanan pangan sehingga sekolah dapat memprioritaskan untuk melakukan program keamanan pangan.	Desember 2025	-	Melakukan pengawalan dan monitoring kepada tim keamanan pangan dan kader keamanan pangan sekolah	Desember 2025	
		Kader Keamanan Pangan Sekolah belum maksimal dalam mensosialisasikan Keamanan pangan	Mendorong keaktifan kader keamanan pangan sekolah untuk mensosialisasikan keamanan pangan secara masive baik secara langsung atau melalui media sosial supaya informasi terbaru terkait keamanan pangan dapat diketahui secara luas	Desember 2025	-	Melakukan pengawalan dan berkomunikasi secara aktif dengan kader keamanan pangan sekolah untuk selalu mensosialisika	Desember 2025	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
						n KP secara massive		
16	Jumlah desa pangan aman	Advokasi dengan lintas sektor belum dilaksanakan	Peningkatan advokasi untuk mendapatkan dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan dan keberlanjutan program agar tetap bisa berjalan secara mandiri	April 2025	Pelaksanaan Advokasi minggu ke IV April 2025		April 2025	sudah dilakukan koordinasi dengan pemeritah daerah Kabupaten Bandung Barat terkait target yang akan mejadi lokus desa yang akan mendapatkan intervensi Program Desa Pangan Aman
		Masih kurangnya komitmen pemerintah desa/kelurahan untuk tetap konsisten melaksanakan Program Desa Pangan Aman	Peningkatan komitmen pemerintah Desa /Kelurahan untuk dapat melanjutkan program Desa Pangan Aman dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun oleh kader keamanan pangan	Desember 2025		Melakukan pengawalan dan monitoring, evaluasi terhadap p rencana aksi yang telah disusun oleh kader keamana n pangan	Desember 2025	
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Program PPABK	Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PPABK	April 2025	Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah		April 2025	Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PPABK
		Masih kurangnya komitmen pimpinan/kader keamanan pangan di pasar tentang keamanan pangan	Peningkatan tindaklanjut hasil sampling dan pengujian	Desember 2025		Melakukan KIE kepada pedagang dan melakukan advokasi kepada kepala pasar dan pemda	Desember 2025	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
						setempa t		
		Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran pedagang tentang keamanan pangan	Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pedagang	Desember 2025		Melakuk an KIE kepada pedagang	Desem ber 2025	
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Masih kurangnya komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan	Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan umk	Desember 2025		Melaksa nakan tahapan fasilitasi kepada UMK Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmeti k	Desem ber 2025	
		Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha tentang persyaratan dan regulasi yang berlaku	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha UMK	April 2025	Sudah dilaksanakan Bimbingan Teknis UMKM untuk Pelaku usaha UMK Pangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik		April 2025	Meningkatany a pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha UMK
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	Terdapat 10 perkara carry over di bulan Januari tahun 2025 dengan rincian : • 4 perkara Tahap 1 • 6 perkara P21	1. Intensifikasi penyelesaian berkas perkara 2. Upaya paksa bagi tersangka yang sudah P21 namun tidak kooperatif 3. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyelesaian perkara		1. Intensifikasi penyelesaian berkas perkara 2. Upaya paksa bagi tersangka yang sudah P21 namun tidak kooperatif 3. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyelesaian perkara	1. Intensifik asi penyeles aian berkas perkara 2. Upaya paksa bagi tersangka yang sudah P21 namun tidak kooperat if 3. Peningk atan koordina si lintas sektor dalam rangka penyeles aian perkara	Desem ber 2025	2 perkara carry over telah diselesaikan, terisa 8 perkara carry over di bulan Maret tahun 2025 dengan rincian : • 1 perkara Tahap 1 • 7 perkara P21

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
20	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	Belum dilakukan penilaian oleh Kepala UPT terhadap analisis kejahatan yang disusun pada tahun 2024	Akan dilakukan penilaian analisis kejahatan yang telah disusun pada tahun 2024	Maret 2025	Sudah dilakukan penilaian terhadap analisis kejahatan yang disusun pada tahun 2024			Analisis kejahatan tahun 2024 sudah dinilai oleh Kepala UPT
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	Terdapat perubahan/pembaruan regulasi tentang perizinan, sehingga standar pelayanan perlu dilakukan reviu, serta ada penambahan jenis pelayanan sehubungan dengan pelimpahan kewenangan untuk layanan Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, obat Kuasi	Melakukan reviu standar pelayanan publik untuk 9 jenis layanan yang ada, dan menyusun draft standar pelayanan untuk layanan Rekomendasi Importir OBA, SK, obat Kuasi. Serta melaksanakan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan Standar Pelayanan	Mei 2025	Terdapat 2 jenis layanan yang sudah direviu	7 jenis layanan dalam proses reviu, 1 jenis layanan dalam proses penyusunan	Mei 2025	- Terdapat 2 dokumen draft jenis layanan - sudah dilakukan pembahasan rencana pelaksanaan FKP
22	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	Belum terdapat penetapan pengelola Inovasi kegiatan Internalisasi WBS	Menetapkan pengelola inovasi kegiatan internalisasi WBS dan menindaklanjuti pengaduan sampai dengan tuntas			Menetapkan pengelola inovasi kegiatan internalisasi WBS dan menindaklanjuti pengaduan sampai dengan tuntas	Desember 2025	
		Belum terdapat pengembangan inovasi layanan public	Menyusun dan menetapkan latar belakang pengembangan inovasi pelayanan publik berdasarkan risiko yang ada atau kebutuhan Unit Kerja			Menyusun dan menetapkan latar belakang pengembangan inovasi pelayanan publik berdasarkan risiko yang ada atau kebutuhan Unit Kerja	Desember 2025	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
		Belum terlaksana Continuous improvement	Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko sehingga mampu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima			Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko sehingga mampu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Desember 2025	
23	Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	Belum memiliki Rencana Strategis Tahun 2025-2029	Menyusun Renstra sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM	Juli 2025		Menyusun Renstra BBPOM di Bandung Tahun 2025-2029	Juli 2025	
		Tidak ada penetapan Indikaor Kinerja Utama	Menyusun SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memuat seluruh indikator pada Perjanjian Kinerja (PK)	Maret 2025	Menyusun SK penetapan IKU			Terdapat penetapan Indikaor Kinerja Utama
		Belum ada reviu dalam penetapan target IKU	Menyusun matriks reviu target indikator kinerja dilengkapi dengan justifikasi yang memadai terkait target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta kertas kerja reviu menyajikan seluruh indikator dan dilengkapi dengan informasi target usulan dari Balai, hasil reviu unit pengampu/Biro Perencanaan dan Keuangan	Maret 2025	Menyusun matriks reviu target indikator kinerja (Matriks A2 melalui aplikasi simetris)			Terdapat reviu dalam penetapan target IKU

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
		Terdapat perbedaan target pada dokumen perencanaan kinerja	Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Maret 2025	Menyusun kertas kerja keselarasan target indikator kinerja PK, RAPK,			Target kinerja sudah selaras
		Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan secara lengkap	Mempublikasikan dokumen perencanaan SAKIP pada e-SAKIP REVIU dan subsite Satuan Kerja	Mei 2025	Mempublikasikan dokumen perencanaan SAKIP ; Renstra, PK, dan RAPK pada e-SAKIP Reviu dan subsite informasi kinerja bbpom bandung			Dokumen Perencanaan kinerja telah dipublikasikan
		Belum ada manual IKU yang merupakan dasar pengukuran kinerja	Menyusun dan mengesahkan manual IKU sebagai acuan dalam pengukuran kinerja seluruh indikator	Mei 2025	Menyusun manual IKU Tahun 2025-2029		Mei 2025	Terdapat Manual IKU TA 2025-2029
		SOP mikro tentang Manajemen Kinerja Organisasi belum mengatur secara lengkap dan rinci	Menyempurnakan SOP Mikro Manajemen Kinerja Organisasi pada mekanisme Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja dengan menambahkan: • Media/sarana pengumpulan data; Timeline penyampaian laporan kinerja bulanan dan triwulanan; Mekanisme usulan perubahan/perbaikan data kinerja	Juli 2025		Melakukan reviu dan revisi SOP Mikro manajemen kinerja, pada mekanisme Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja dengan menambahkan:	Juli 2025	
		Notulen rapat beum menggambarkan arahan pimpinan yang spesifik	Menyusun notulen rapat evaluasi internal yang menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja secara spesifik	Desember 2025		Menyusun notulen rapat monev dengan menyajikan arahan pimpinan terkait pencapaian kinerja secara spesifik	Desember 2025	
		Realisasi kinerja pada pelaporan di SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan	Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada aplikasi	Desember 2025		Sumber data pelaporan menggunakan	Desember 2025	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
		Laporan Kinerja Interim berbeda	SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja			sumber data valid di aplikasi SIMETRIS.. dan Membuat kertas kerja realisasi kinerja 2025, sbb: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-HFxblIkbumjXhnilelZiAIDrdTbnHYX/edit?usp=sharing&ouid=112059272181934449045&rtpof=true&sd=true		
		Pengisian Kendala dan RTL pada aplikasi SIMETRIS tidak tertib	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib dan memadai	Desember 2025		Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Desember 2025	
		Laporan kinerja interim belum menyajikan terkait perubahan indikator dan upaya perbaikan kinerja	Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan: Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja, Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan atau rencana aksi dalam rangka pencapaian target kinerja, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan seluruh indikator	Desember 2025		Menyusun laporan kinerja interim, dengan menyajikan penjelasan terkait penambahan indikator kinerja dan upaya perbaikan	Desember 2025	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
						n penyem purnaan kinerja, analisis program /kegiata n yang menunja ng keberha silan seluruh indikator		
		Laporan kinerja tahunan belum sesuai dengan Pedoman SAKIP	Menyusun laporan Kinerja tahunan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan SAKIP terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan penggunaan target akhir periode renstra yang mutakhir	Februari 2025	Menyusun laporan kinerja tahun 2024 sesuai pedoman penyelenggaraan SAKIP			Laporan Kinerja Tahunan telah direvisi sesuai pedoman
		Penyajian realisasi kinerja pada berbagai laporan, masih terdapat perbedaan	Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja	Desember 2025		Menyusu n kertas kerja keselara san penyajia n realisasi kinerja pada SIMETRI S, SKP Pimpina n, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja, melalui link sbb :	Desem ber 2025	
		belum ada rencana pengembangan kompetensi tim kerja	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Manajemen Kinerja terkait implementasi SAKIP	Maret 2025	Menyusun pengembangan kompetensi tim manajemen kinerja terkait implementasi SAKIP			Pengembang an Kompetensi sudah dilaksanakan
		Laporan evaluasi internal belum sesuai pedoman SAKIP	Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan: Analisis capaian target output berupa identifikasi kendala/hambatan, dan rencana tindak lanjutnya; Evaluasi atas Rencana Aksi	Desember 2025		Menyusu sn Laporan Evaluasi Internal sesuai Pedoma n penyele nggaraa	Desem ber 2025	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
			Perjanjian Kinerja (RAPK) terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan; Timeline pelaksanaan rekomendasi/rencana aksi dan penentuan timeline yang memudahkan proses pemantauan/monitoring sehingga evaluasi internal optimal; Menyusun identifikasi kendala dan rencana aksi secara memadai			n SAKIP BPOM		
24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	Nilai komponen deviasi Hal III masih belum maksimal	Melakukan monitoring dan evaluasi RPD secara berkala	Desember 2025		Melakukan movev dan penyesuaian RPD setiap Triwulan	Desember 2025	
		Nilai komponen pengelolaan UP dan TUP masih belum maksimal	Melakukan monitoring dan evaluasi UP / TUP secara berkala	Desember 2025		Monitoring pelaksanaan UP /TUP	Desember 2025	
		Penetapan target belum menyesuaikan dengan kondisi efisiensi dan relaksasi	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian target RO	Desember 2025		Melakukan movev dan penyesuaian target caput setiap TW	Desember 2025	
25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	Keterlibatan semua pegawai dalam pengelolaan risiko belum maksimal	Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai dalam pengelolaan risiko, terutama dalam melakukan identifikasi risiko	September 2025		Menyusun kuisioner Identifikasi Risiko untuk seluruh pegawai	September 2025	
		Data dukung pelaksanaan kegiatan pengendalian aktifitas belum optimal	Menyusun mekanisme pengendalian aktifitas yang memuat data dukung atribut pengendalian	September 2025		Membuat Kertas Kerja aktifitas pengendalian per poksi	September 2025	
		Belum ada tinjauan implementasi manajemen risiko	Melaksanakan tinjauan manajemen risiko	September 2025		Melaksanakan tinjauan implementasi manaie	September 2025	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timelin e	
						men risiko		

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025, anggaran Balai Besar POM di Bandung sebesar Rp66.390.943.000,-, Pagu Non Blokir sebesar Rp36.886.313.000,- dengan rincian: (1) Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp46.635.378.000,-, pagu non Blokir sebesar Rp19.345.486.000,-; dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp19.755.565.000,-, pagu non Blokir sebesar Rp17.540.827.000,-. Pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi anggaran sebesar Rp. 13.253.700.010,- (35.93%).

TABEL 3.3.1

REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN II TAHUN 2025

PROGRAM	PAGU (Rp)	PAGU DIKURANGI BLOKIR	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Program Pengawasan Obat dan Makanan	46.635.378.000	19.345.486.000	4.339.531.879	22.43%
Program Dukungan Manajemen	19.755.565.000	17.540.827.000	8.914.168.131	50.82%
TOTAL	66.390.943.000	36.886.313.000	13.253.700.010	35.93%

Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan dan alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

TABEL 3.3.2

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	3.924.003.000	1.128.300.992	28.75%

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	58.922.000	37.181.000	63.10%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	6.528.360.000	234.604.768	3.59%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	7.055.981.000	2.479.093.770	35.13%
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	46.436.000	21.840.576	47.03%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	866.166.000	178.808.667	20.64%
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	41.720.000	0	0.00%
8	Layanan Publik UPT yang Prima	389.081.000	223.742.806	57.51%
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	17.975.644.000	8.950.127.431	49.79%
TOTAL		31.886.313.000	13.253.700.010	35.93%

Penyerapan anggaran per sasaran kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025 dari yang terbesar secara berurutan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Kegiatan kedua yaitu: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan pagu sebesar Rp58.922.000,- dan realisasi sebesar Rp37.181.000,- dengan capaian 63.10%.
- 2) Sasaran Kegiatan kedelapan yaitu: Layanan Publik UPT yang Prima dengan pagu sebesar Rp389.081.000,- dan realisasi sebesar Rp223.742.806,- dengan capaian 57.51%.
- 3) Sasaran Kegiatan kesembilan yaitu: Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal dengan pagu sebesar Rp17.975.644.000,- dan realisasi sebesar Rp8.950.127.431,- dengan capaian 49.79%.
- 4) Sasaran Kegiatan kelima yaitu: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan pagu sebesar Rp46.436.000,- dan realisasi sebesar Rp21.840.576,- dengan capaian 47.03%.
- 5) Sasaran Kegiatan keempat yaitu Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan pagu sebesar Rp7.055.981.000,- dan realisasi sebesar Rp2.479.093.770,-, dengan capaian 35.13%.
- 6) Sasaran Kegiatan Kesatu yaitu: Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan pagu sebesar Rp3.924.003.000,- dan realisasi sebesar Rp1.128.300.992,-, dengan capaian 28.75%.
- 7) Sasaran Kegiatan keenam yaitu: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan pagu sebesar Rp866.166.000,- dan realisasi sebesar Rp178.808.667,- dengan capaian 20.64%.
- 8) Sasaran Kegiatan ketiga yaitu: Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan pagu sebesar Rp6.528.360.000,- dan realisasi sebesar Rp234.604.768,- dengan capaian 3.59%.
- 9) Sasaran Kegiatan ketujuh yaitu: Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dengan pagu sebesar Rp41.720.000,- dan realisasi sebesar Rp0,- dengan capaian 0%.

Pada Triwulan II, RPD yang tercantum dalam Halaman I DIPA BBPOM di Bandung sebesar Rp. 22.753.845.926,-, maka deviasi sebesar 0 dengan kategori Baik (Hijau). Secara rinci dijelaskan tabel berikut :

TABEL 3.3.3

HASIL PERHITUNGAN DEVIASI RPD

TRIWULAN II TAHUN 2025

Bulan	% RPD Halaman III DIPA	% Realisasi	Deviasi	Kategori
April	6.28	9.38	4.64	Baik
Mei	6.65	12.97	5.52	Kurang Baik
Juni	9.92	17.64	10.57	Kurang Baik

Target Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025 bahwa target RPD per triwulan, mengacu pada target penyerapan anggaran per triwulan:

- Triwulan II, sebesar minimal 15 persen;
- Triwulan II, sebesar minimal 40 persen;
- Triwulan III, sebesar minimal 60 persen; dan
- Triwulan IIV, sebesar minimal 99 persen.

TABEL 3.3.4

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

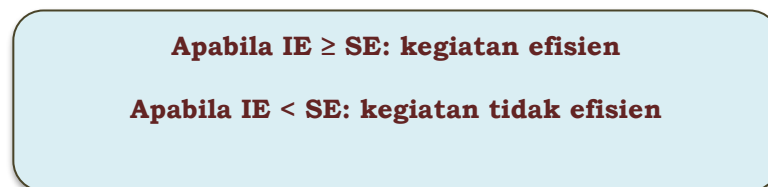
TRIWULAN II TAHUN 2025

Target Realisasi Anggaran TW I	Realisasi Anggaran Triwulan II	Capaian
50%	35.93%	71.86%

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang

sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input. Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian.

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:



Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana).

Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.3.5

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	111.41%	27.99%	3.98	2.98	TIDAK EFISIEN
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	59.85%	6.17%	9.70	8.70	TIDAK EFISIEN
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	113.01%	32.94%	3.43	2.43	TIDAK EFISIEN
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00%	33.55%	2.98	1.98	TIDAK EFISIEN
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.34%	33.55%	3.50	2.50	TIDAK EFISIEN
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	102.41%	13.06%	7.84	6.84	TIDAK EFISIEN

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	107.68%	31.27%	3.44	2.44	TIDAK EFISIEN
8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	124.39%	31.27%	3.98	2.98	TIDAK EFISIEN
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	104.21%	26.66%	3.91	2.91	TIDAK EFISIEN
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	114.55%	32.64%	3.51	2.51	TIDAK EFISIEN
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	118.88%	2.89%	41.14	40.14	TIDAK EFISIEN
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi	101.00%	63.10%	1.60	0.60	EFISIEN

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
	yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	103.75%	3.59%	28.87	27.87	TIDAK EFISIEN
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	100.13%	35.85%	2.79	1.79	TIDAK EFISIEN
15	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	125.00%	7.44%	16.81	15.81	TIDAK EFISIEN
16	Jumlah desa pangan aman	135.71%	14.38%	9.44	8.44	TIDAK EFISIEN
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00%	34.83%	2.87	1.87	TIDAK EFISIEN
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	109.45%	47.03%	2.33	1.33	TIDAK EFISIEN

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	102.43%	20.64%	4.96	3.96	TIDAK EFISIEN
20	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan olehBBPOM di Bandung	100.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	#DIV/0!	57.51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	#DIV/0!	50.12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	#DIV/0!	1.20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL		107.56%	35.93%	2.99	1.99	TIDAK EFISIEN

Pada Triwulan II Tahun 2025, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 25 (dua puluh lima) indikator secara kumulatif masuk kedalam kategori **Tidak Efisien (1.99)**.

Sedangkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.3.6

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN KEGIATAN/OUTPUT
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f = (e/d \times 100)$	f	g	$h = (g/f \times 100)$
1	3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Laporan	6	42.86%	41,720,000	0	0.00%
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1310	Keputusan	936	71.45%	384,431,000	219,092,806	56.99%
3	3165.BDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	75335	Orang	10257	13.62%	6,800,750,000	2,441,495,130	35.90%
4	3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	0	50.00%	439,467,000	40,609,300	9.24%
5	3165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	27	Layanan	7	25.93%	16,177,000	2,040,000	12.61%

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
6	3165.CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%
7	3165.CAN.001 Perangkat pengolahan data dan komunikasi	12	Unit	0	0.00%	0	0	0.00%
8	3165.CBV.001 Prasarana Bidang Kesehatan	4	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%
9	3165.PDD.001 Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	0	44.99%	2,646,701,000	211,322,518	7.98%
10	3165.QCD.U02 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	7	Perkara	4	57.14%	866,166,000	178,808,667	20.64%
11	3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	17	Lembaga	8	50.00%	88,624,000	13,997,000	15.79%
12	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	6	Lembaga	3	47.50%	125,757,000	14,841,640	11.80%
13	3165.QDB.003 Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1	Lembaga	0	80.00%	24,673,000	6,720,000	27.24%

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f = (e/d \times 100)$	f	g	$h = (g/f \times 100)$
14	3165.QDC.001 Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	90	Orang	90	100.00%	12,960,000	800,000	6.17%
15	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	26	UMKM	17	65.67%	46,436,000	21,840,576	47.03%
16	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	Sampel	336	45.10%	622,568,000	206,402,708	33.15%
17	3165.QIA.002 Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1766	Sampel	769	43.54%	1,492,536,000	417,812,272	27.99%
18	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	298	Sarana	142	47.65%	640,815,000	197,604,385	30.84%
19	3165.QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	36	Sarana	28	77.78%	58,922,000	37,181,000	63.10%
20	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	995	Sarana	458	46.03%	1,155,124,000	305,681,627	26.46%

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
21	3165.RAB.001 Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Paket	0	0.00%	3,881,659,000	23,282,250	0.60%
22	6384.EBA.956 Layanan BMN	1	Layanan	0	50.00%	1,098,000	0	0.00%
23	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	50.00%	17,539,729,000	8,914,168,131	50.82%
TOTAL						36,886,313,000	13,253,700,010	35.93%

Pada Triwulan II Tahun 2025, BBPOM di Bandung melaksanakan 23 (dua puluh tiga) Rincian Output (RO) dengan nilai TE masuk kategori Efisien. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT oleh UPT (TE=0.74). Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung pada Triwulan II terlaksana secara EFISIEN (TE=0.22).

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan II Tahun 2025 mengukur pencapaian kinerja Triwulan II tahun 2025 berdasarkan target pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan tanggal 12 Februari 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025-2029. Berikut hasil pencapaian sasaran kegiatan pada Triwulan II tahun 2025, yaitu:

1. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebanyak 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Dari sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 25 (dua puluh lima) indikator sasaran kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: 6 (enam) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Baik, 1 (satu) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Baik, dan 2 (dua) pencapaian sasaran kegiatan akan diukur pada akhir tahun. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.
2. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan pada Triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama sebesar 108.36% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektifitas pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Jawa Barat.
 - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedua sebesar 101.00% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektifitas Pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi di Jawa Barat.
 - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan ketiga sebesar 103.75% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di dalam menguatkan lab pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT.
 - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan keempat sebesar 105.03% dengan kriteria sangat baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektifitas KIE di Jawa Barat.
 - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan kelima sebesar 109.45% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, ini menunjukkan berhasilnya upaya Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan di Jawa Barat.

- ❖ Capaian kinerja sasaran strategis keenam sebesar 102.43% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di Jawa Barat.
 - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan ketujuh sebesar 100,00% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif.
 - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan belum dilakukan pengukuran, pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun sehingga belum dapat menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam memberikan layanan publik UPT yang prima.
 - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesembilan belum dilakukan pengukuran, pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun sehingga belum dapat menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan unit organisasi yang optimal.
3. Pada Triwulan II tahun 2025, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 25 (dua puluh lima) didapatkan hasil EFISIEN sebesar (TE = 0.22).

4.2 SARAN

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi sumber daya yang terbatas maka perlu langkah-langkah strategi yang tepat serta inovasi. Capaian sasaran kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 merupakan dasar untuk menetapkan strategi dan inovasi pada periode selanjutnya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung, antara lain :

1. Koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat, melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan.
2. Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka implementasi instruksi presiden no, 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, melalui peningkatan kualitas reviu perencanaan anggaran dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindaklanjut dari implementasi efisiensi anggaran Tahun 2025

4. Peningkatan dan penguatan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tatakelola pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Melakukan penyesuaian dalam metode pencapaian kinerja pengawasan, baik itu pre market, post market, penyidikan dan pemberdayaan masyarakat, dengan manual Indikator Kinerja Utama sesuai Renscana Strategis Tahun 2025-2029.
6. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terus menerus serta berkesinambungan.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan TA 2025
2. Perjanjian Kinerja TA 2025
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2025
4. Pengukuran Kinerja Triwulan I TA 2025
5. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I TA 2025
6. Capaian Output Triwulan I TA 2025

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

NOMOR HK.02.02.8A.09.24.605 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 20 September 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BANDUNG



I MADE BAGUS GERAMETTA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDUNG

NOMOR HK.02.02.8A.09.24.605 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BANDUNG

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26%
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100 %
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100 %
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81,7
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94,5
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2 Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	6 Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85 %
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14 Laporan
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92,50
		Nilai AKIP UPT BPOM	83,85
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91,75
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,4

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG



I MADE BAGUS GERAMETTA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I MADE BAGUS GERAMETTA

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Bandung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di
Bandung

I MADE BAGUS GERAMETTA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDUNG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85 persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88 persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75 persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48 persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57 persen
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7 nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94 nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	17 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	6 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85 persen
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	72 persen
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 persen
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.5 nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83.1 nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95 nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 66,390,943,000 (Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	46,635,378,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	19,755,565,000

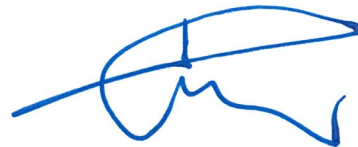
Bandung, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di
Bandung



I MADE BAGUS GERAMETTA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI



TARUNA IKRAR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	02 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	4,8	11	19	32	44	44	44	57	57	57	57	58,922,000
3.	03 - Memperkuatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			79	79	79	80	80	80	81	81	81	81,7	12,603,107,000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86,94	86,94	86,94	86,94	86,94	86,94	86,94	86,94	86,94	86,94	22,383,776,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	10	20	25	40	40	50	75	75	90	100	17	558,912,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	10	15	25	35	35	60	80	80	100	100	6	929,917,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	10	20	25	60	80	100	100	100	100	100	1	166,002,000
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OSA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	10	15	40	50	60	70	75	80	85	90	85	109,594,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	14	16	17	55,88	57,65	58	59	60	62	64	66	72	866,166,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	283,012,000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,7	829,727,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91,5	20,247,184,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83,1	3,084,740,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	100,140,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,95	159,501,000
Total															66,390,943,000

Bandung, 30 June 2025

Kepala Balai Besar POM di Bandung


I MADE BAGUS GERAMETTA

Laporan Capaian Kinerja

Pilih Bulan

April

×



Download Periode Bulan



Download Periode Tahun

Menampilkan 1 sampai 25 dari 25 data

25 ▾

data per halaman

1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	86.25	100.69	116.74%	-	-	-
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	April	-	-	0%	-	-	-
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	85.00	100	117.65%	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	April	100.00	100	100.00%	-	-	-
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	85.00	100	117.65%	-	-	-
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	April	85.00	81.82	96.26%	-	-	-
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	88.00	91.75	104.26%	-	-	-



8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	80.00	99.15	123.94%	-	-	-
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	91.75	94.92	103.46%	-	-	-
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	85.00	99.59	117.16%	-	-	-
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	April	83.48	99.52	119.21%	-	-	-
12	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	19.00	19.05	100.26%	-	-	-
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	April	79.00	82	103.80%	-	-	-
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	April	86.94	88.71	102.04%	-	-	-
15	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	April	25.00	25	100.00%	-	-	-
16	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	April	25.00	25	100.00%	-	-	-
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	April	25.00	25	100.00%	-	-	-
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	April	40.00	41.67	104.18%	-	-	-



19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	April	18.00	55.88	310.44%	-	-	-
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	April	50.00	50	100.00%	-	-	-
21	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	April	0.00	-	0	-	-	-
22	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	April	-	-	0%	-	-	-
23	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	April	-	-	0%	-	-	-
24	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	April	-	-	0%	-	-	-
25	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	April	0.00	-	0	-	-	-

Laporan Capaian Kinerja

Pilih Bulan

Mei

×



Download Periode Bulan



Download Periode Tahun

Menampilkan 1 sampai 25 dari 25 data

25 ▾

data per halaman

1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	86.25	93.69	108.63%	-	-	-
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Mei	-	-	0%	-	-	-
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	85.00	95.81	112.72%	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Mei	100.00	100	100.00%	-	-	-
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	85.00	95.26	112.07%	-	-	-
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Mei	85.00	89.38	105.15%	-	-	-
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	88.00	94	106.82%	-	-	-



8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	80.00	99.44	124.30%	-	-	-
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	91.75	95.19	103.75%	-	-	-
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	85.00	98.88	116.33%	-	-	-
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Mei	83.48	99.35	119.01%	-	-	-
12	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	32.00	30.16	94.25%	-	-	-
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Mei	79.00	82	103.80%	-	-	-
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Mei	86.94	86.6	99.61%	-	-	-
15	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Mei	40.00	50	125.00%	-	-	-
16	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	Mei	35.00	37.5	107.14%	-	-	-
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Mei	60.00	60	100.00%	-	-	-
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Mei	50.00	57	114.00%	-	-	-



19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Mei	25.00	57.65	230.60%	-	-	-
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Mei	50.00	50	100.00%	-	-	-
21	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Mei	0.00	-	0	-	-	-
22	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Mei	-	-	0%	-	-	-
23	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	Mei	-	-	0%	-	-	-
24	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Mei	-	-	0%	-	-	-
25	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Mei	0.00	-	0	-	-	-

Data Realisasi

Pilih Bulan

Juni



Kirim Data Terpilih



Export Data

Cari

	<input type="checkbox"/>						
		Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	86.25	96.09	111.41%	<div><div><p>% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 99.74% % Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%) 95.03% % Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 94.69% % Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 94.88%</p></div><div><p>Aplikasi SIPT belum menampilkan data timeline pengujian (SLA) untuk sampel rutin Sediaan Farmasi, baru diterapkan pada pengujian sampel pihak ketiga, sehingga pemantauan masih dilakukan secara manual</p></div></div>
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85.00	96.06	113.01%	<div><div><p>Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%) "Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%) 80.28% Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%) 100% Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%) 100% Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%) 100% Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%) 100%</p></div><div><p>Alat ICPMS telah diperbaiki (Selesai)</p></div></div>
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Juni	100.00	0	0.00%	<div><div><p>Belum ada Sampel KLB</p></div><div><p>Pembentukan Tim Pengujian sampel KLB (Selesai)</p></div></div>



Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85.00	99.74	117.34%	<div>% Pemenuhan target</div> <div>Sampel PIRT (Bobot 20%) 98.72% % Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%) 100% % Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%) 100% % Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%) 100% % Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%) 100% % Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%) 100%</div>	Perbaikan alat ICPMS (Selesai)
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Juni	85.00	87.05	102.41%	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha 74.11% % Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 100%	CAPA yang diterima jumlahnya belum memadai
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	88.00	95.32	108.32%	% Sarprod Obat 84.07% % Sarprod OBA 97.22% % Sarprod SK 100% % Sarprod Kosmetik 100%	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemenuhan standar sesuai pedoman belum menggunakan data dari SIPT, masih menggunakan data monev manual
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	80.00	99.57	124.46%	% Ketepatan waktu 100% % Ketepatan tindak lanjut 98.72% % Evaluasi Ketepatan Grading 100%	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemenuhan standar sesuai pedoman belum menggunakan data dari SIPT, masih menggunakan data monev manual
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	91.75	95.86	104.48%	% Sardis Obat 97.10% % Sardis OBA 93.09% % Sardis SK 94.23% % Sardis Kosmetik 99.04%	"1) Pengumpulan data hasil pemeriksaan sarana dilakukan secara manual dan melalui SIPT; 2) Pengiriman dan pemantauan surat TL secara manual 3) Pengiriman CAPA melalui email corporate 4) Pemantauan CAPA secara manual"



Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85.00	97.37	114.55%	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%) 18.35% % Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%) 69.15% % Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%) 9.88%	data hasil pemeriksaan sarana dilakukan secara manual dan melalui SIPT; 2) Pengiriman dan pemantauan surat TL secara manual 3) Pengiriman CAPA melalui email corporate 4) Pemantauan CAPA secara manual"
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Juni	83.48	99.24	118.88%	% Iklan Obat 100% % Iklan Kos 100% % Iklan OBA 97.56% % Iklan SK 100% % Iklan PO 98.64%	Terdapat penambahan Capaian Karena kesalahan rumus
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	44.00	44.44	101.00%	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 28 Sarana Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT 63 Sarana	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemenuhan standar sesuai pedoman belum menggunakan data dari SIPT, masih menggunakan data monev manual
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Juni	80.00	83	103.75%	Sesuai Penilaian SKL Triwulan II	Pemenuhan metoda analisa terverifikasi, ruang lingkup pengujian, peralatan dan kompetensi laboratorium masih belum optimal
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Juni	86.94	87.05	100.13%	Memenuhi Target berdasarkan hasil perhitungan Aplikasi	1) indeks fektifitas KIE pada TW 1 memenuhi target sebesar 87,05%, namun jumlah target responden tatap muka belum memenuhi target hal ini dikarenakan Rencana Pelaksanaan KIE dengan tomas belum ada penjadwalan. Target responden untuk KIE Media juga belum memenuhi target dikarenakan jumlah responden yang mengisi tidak dapat secara tepat diperkirakan.



	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Juni	40.00	50	125.00%	Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi telah Selesai Dilakukan	SAKA POM belum optimal Masih kurangnya kesadaran sekolah tentang keamanan pangan Kader Keamanan Pangan Sekolah belum maksimal dalam mensosialisasikan Keamanan pangan
	Jumlah desa pangan aman	Juni	35.00	47.5	135.71%	Adanya pelaksanaan Bimtek	Masih kurangnya komitmen pemerintah desa/kelurahan untuk tetap konsisten melaksanakan Program Desa Pangan Aman
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Juni	80.00	80	100.00%	Pelaksanaan Sesuai Target Timeline , pada bulan juni terlaksana Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Masih kurangnya komitmen pimpinan/kader keamanan pangan di pasar tentang keamanan pangan Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran pedagang tentang keamanan pangan
	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Juni	60.00	65.67	109.45%	% UMKM Pangan Olahan 92% % UMKM OBA 55% % UMKM Kosmetik 50%	Masih kurangnya komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan
	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Juni	58.00	59.41	102.43%	Nilai Realisasi SPDP 0.45 Nilai Realisasi Tahap I 0.55 Nilai Realisasi P21 5.1 Nilai Realisasi Tahap II 4	Terdapat 10 perkara carry over di bulan Januari tahun 2025 dengan rincian : • 4 perkara Tahap 1 • 6 perkara P21
	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Juni	50.00	50	100.00%	Sesuai Nota Dinas Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor PR.09.02.63.07.25.350	Kendala Sudah terselesaikan
<div>Update Data</div>	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Juni	-	-	0		
<div>Update Data</div>	Indeks Pelayanan Publik UPT	Juni	0.00	-	0		
<div>Update Data</div>	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Juni	-	-	0		



<div>Update Data</div>	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Juni	-	-	0
<div>Update Data</div>	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Juni	0.00	-	0

Menampilkan 1 sampai 25 dari 25 data

100 ^ data per halaman

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada hari Kamis tanggal Sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima bertempat Kantor Balai Besar POM di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt
NIP : 19690718 199603 1 001
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung
2. Nama : Dwi Kurniasari, S.Si., Apt
NIP : 19810108 200604 2 004
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar POM di Bandung

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Balai Besar POM di Bandung periode April sampai dengan bulan Juni 2025 dengan hasil sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Rincian Output (RO) Triwulan II

No	Program/ Kegiatan/RO	Volume				Anggaran		
		Target 2025	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
1	3165.AEA.001 – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Laporan	6	42.86%	41,720,000	0	0.00%
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1310	Keputusan	936	71.45%	384,431,000	219,092,806	56.99%
3	3165.BDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	75335	Orang	10257	13.62%	6,800,750,000	2,441,495,130	35.90%
4	3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	0	50.00%	439,467,000	40,609,300	9.24%
5	3165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	27	Layanan	7	25.93%	16,177,000	2,040,000	12.61%
6	3165.CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%
7	3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	12	Unit	0	0.00%	0	0	0.00%
8	3165.CBV.001 Prasarana Bidang Kesehatan	4	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%
9	3165.PDD.001 Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	0	44.99%	2,646,701,000	211,322,518	7.98%

No	Program/ Kegiatan/RO	Volume				Anggaran		
		Target 2025	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
10	3165.QCD.U02 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	7	Perkara	4	57.14%	866,166,000	178,808,667	20.64%
11	3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	17	Lembaga	8	50.00%	88,624,000	13,997,000	15.79%
12	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	6	Lembaga	3	47.50%	125,757,000	14,841,640	11.80%
13	3165.QDB.003 Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1	Lembaga	0	80.00%	24,673,000	6,720,000	27.24%
14	3165.QDC.001 Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	90	Orang	90	100.00%	12,960,000	800,000	6.17%
15	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	26	UMKM	17	65.67%	46,436,000	21,840,576	47.03%
16	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	Sampel	336	45.10%	622,568,000	206,402,708	33.15%
17	3165.QIA.002 Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1766	Sampel	769	43.54%	1,492,536,000	417,812,272	27.99%
18	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	298	Sarana	142	47.65%	640,815,000	197,604,385	30.84%
19	3165.QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	36	Sarana	28	77.78%	58,922,000	37,181,000	63.10%
20	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	995	Sarana	458	46.03%	1,155,124,000	305,681,627	26.46%
21	3165.RAB.001 Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Paket	0	0.00%	3,881,659,000	23,282,250	0.60%
22	6384.EBA.956 Layanan BMN	1	Layanan	0	50.00%	1,098,000	0	0.00%
23	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	50.00%	17,539,729,000	8,914,168,131	50.82%
	TOTAL					36,886,313,000	13,253,700,010	35.93%

2. Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan II

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Volume			Anggaran		
			Target TW II	Realis asi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	f	g=(f/ex100)	h	i	j=(h/ix100)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	96.09	111.41%	1,492,536,000	417,812,272	27.99%
		2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	-	-	12,960,000	800,000	6.17%
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	96.06	113.01%	407,259,200	134,161,760	32.94%
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100.00	100.00%	61,516,800	20,640,271	33.55%
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	99.74	117.34%	153,792,000	51,600,677	33.55%
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	87.05	102.41%	98,178,000	12,823,291	13.06%
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	94.76	107.68%	315,073,500	98,530,475	31.27%
		8 Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	99.51	124.39%	315,073,500	98,530,475	31.27%
		9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	95.61	104.21%	574,873,000	153,266,716	26.66%
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	97.37	114.55%	423,198,000	138,125,556	32.64%
		11 Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	99.24	118.88%	69,543,000	2,009,500	2.89%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	44	44.44	101.00%	58,922,000	37,181,000	63.10%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	80	83	103.75%	6,528,360,000	234,604,768	3.59%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di	14 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan	86.94	87.05	100.13%	6,816,927,000	2,443,535,130	35.85%

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Volume			Anggaran		
			Target TW II	Realis asi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	f	g=(f/ex1 00)	h	i	j=(h/ix1 00)
	masing-masing wilayah kerja UPT	Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung						
		15 Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	40	50.00	125.00%	75,274,600	5,598,800	7.44%
		16 Jumlah desa pangan aman	35	47.5	135.71%	132,431,700	19,040,740	14.38%
		17 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	80	80	100.00%	31,347,700	10,919,100	34.83%
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	60	65.67	109.45%	46,436,000	21,840,576	47.03%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	17	59.41	102.43%	866,166,000	178,808,667	20.64%
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20 Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan olehBBPOM di Bandung	50	50.00	100.00%	41,720,000	-	0.00%
8	Layanan Publik UPT yang Prima	21 Indeks Pelayanan Publik UPT	0		#DIV/0!	389,081,000	223,742,806	57.51%
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22 Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung			#DIV/0!	17,855,419,000	8,948,739,431	50.12%
		23 Nilai AKIP Balai Besar di Bandung			#DIV/0!	3,707,000	-	0.00%
		24 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung			#DIV/0!	1,098,000	-	0.00%
		2 Indeks Manajemen Risiko 5 Balai Besar di Bandung			#DIV/0!	115,420,000	1,388,000	1.20%
	TOTAL					36,886,313,000	13,253,700,010	35.93%

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Tata Usaha

Dwi Kurniasari, S.Si., Apt,

Bandung, 10 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Realisasi anggaran dan capaian output dibandingkan target dan nilai efisiensi sampai dengan Triwulan II 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	IE	TE	KET
a	b	c		d	$e = (d/c \times 100)$	f	g	$h = (g/f \times 100)$	$i = (e/h)$	$j = i-1$	
1	3165.AEA.001 – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Laporan	6	42.86%	41,720,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1310	Keputusan	936	71.45%	384,431,000	219,092,806	56.99%	1.25	0.25	EFISIEN
3	3165.BDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	75335	Orang	10257	13.62%	6,800,750,000	2,441,495,130	35.90%	0.38	-0.62	TIDAK EFISIEN
4	3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	0	50.00%	439,467,000	40,609,300	9.24%	5.41	4.41	TIDAK EFISIEN
5	3165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	27	Layanan	7	25.93%	16,177,000	2,040,000	12.61%	2.06	1.06	TIDAK EFISIEN
6	3165.CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	3165.CAN.001 Perangkat pengolahan data dan komunikasi	12	Unit	0	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8	3165.CBV.001 Prasarana Bidang Kesehatan	4	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9	3165.PDD.001 Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	0	44.99%	2,646,701,000	211,322,518	7.98%	5.63	4.63	TIDAK EFISIEN
10	3165.QCD.U02 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	7	Perkara	4	57.14%	866,166,000	178,808,667	20.64%	2.77	1.77	TIDAK EFISIEN
11	3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	17	Lembaga	8	50.00%	88,624,000	13,997,000	15.79%	3.17	2.17	TIDAK EFISIEN
12	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	6	Lembaga	3	47.50%	125,757,000	14,841,640	11.80%	4.02	3.02	TIDAK EFISIEN
13	3165.QDB.003 Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1	Lembaga	0	80.00%	24,673,000	6,720,000	27.24%	2.94	1.94	TIDAK EFISIEN
14	3165.QDC.001 Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	90	Orang	90	100.00%	12,960,000	800,000	6.17%	16.20	15.20	TIDAK EFISIEN
15	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	26	UMKM	17	65.67%	46,436,000	21,840,576	47.03%	1.40	0.40	EFISIEN
16	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	Sampel	336	45.10%	622,568,000	206,402,708	33.15%	1.36	0.36	EFISIEN

17	3165.QIA.002 Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1766	Sampel	769	43.54%	1,492,536,000	417,812,272	27.99%	1.56	0.56	EFISIEN
18	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	298	Sarana	142	47.65%	640,815,000	197,604,385	30.84%	1.55	0.55	EFISIEN
19	3165.QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	36	Sarana	28	77.78%	58,922,000	37,181,000	63.10%	1.23	0.23	EFISIEN
20	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	995	Sarana	458	46.03%	1,155,124,000	305,681,627	26.46%	1.74	0.74	EFISIEN
21	3165.RAB.001 Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Paket	0	0.00%	3,881,659,000	23,282,250	0.60%	0.00	-1.00	TIDAK EFISIEN
22	6384.EBA.956 Layanan BMN	1	Layanan	0	50.00%	1,098,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
23	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	50.00%	17,539,729,000	8,914,168,131	50.82%	0.98	-0.02	TIDAK EFISIEN
Total				13061	43.88%	36,886,313,000	13,253,700,010	35.93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

NO	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Volume				Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE
		Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian			
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	86.25	96.09	111.41%	1,492,536,000	417,812,272	27.99%	3.98	2.98	TIDAK EFISIEN
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	26	-	-	12,960,000	800,000	6.17%	9.70	8.70	TIDAK EFISIEN
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	96.06	113.01%	407,259,200	134,161,760	32.94%	3.43	2.43	TIDAK EFISIEN
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00	100.00%	61,516,800	20,640,271	33.55%	2.98	1.98	TIDAK EFISIEN
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	99.74	117.34%	153,792,000	51,600,677	33.55%	3.50	2.50	TIDAK EFISIEN
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85	87.05	102.41%	98,178,000	12,823,291	13.06%	7.84	6.84	TIDAK EFISIEN

7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	94.76	107.68%	315,073,500	98,530,475	31.27%	3.44	2.44	TIDAK EFISIEN
8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	99.51	124.39%	315,073,500	98,530,475	31.27%	3.98	2.98	TIDAK EFISIEN
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	91.75	95.61	104.21%	574,873,000	153,266,716	26.66%	3.91	2.91	TIDAK EFISIEN
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	97.37	114.55%	423,198,000	138,125,556	32.64%	3.51	2.51	TIDAK EFISIEN
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	83.48	99.24	118.88%	69,543,000	2,009,500	2.89%	41.14	40.14	TIDAK EFISIEN
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	44	44.44	101.00%	58,922,000	37,181,000	63.10%	1.60	0.60	EFISIEN
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7	80	83	103.75%	6,528,360,000	234,604,768	3.59%	28.87	27.87	TIDAK EFISIEN
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94	86.94	87.05	100.13%	6,816,927,000	2,443,535,130	35.85%	2.79	1.79	TIDAK EFISIEN
15	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	40	50.00	125.00%	75,274,600	5,598,800	7.44%	16.81	15.81	TIDAK EFISIEN
16	Jumlah desa pangan aman	6	35	47.5	135.71%	132,431,700	19,040,740	14.38%	9.44	8.44	TIDAK EFISIEN
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	80	80	100.00%	31,347,700	10,919,100	34.83%	2.87	1.87	TIDAK EFISIEN
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85	60	65.67	109.45%	46,436,000	21,840,576	47.03%	2.33	1.33	TIDAK EFISIEN

19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72	17	59.41	102.43%	866,166,000	178,808,667	20.64%	4.96	3.96	TIDAK EFISIEN
20	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan olehBBPOM di Bandung	90	50	50.00	100.00%	41,720,000	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	0		#DIV/0!	389,081,000	223,742,806	57.51%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
22	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.5			#DIV/0!	17,855,419,000	8,948,739,431	50.12%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
23	Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83.1			#DIV/0!	3,707,000	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5			#DIV/0!	1,098,000	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95			#DIV/0!	115,420,000	1,388,000	1.20%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
	TOTAL					36,886,313,000	13,253,700,010	35.93%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN

A. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

No	Program ?kegiatan/Output	Target Tahunan	B4			B5			B6			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran					
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		B4	B5	B6			
1	3165.AEA.001 – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	4	4	100	5	5	100	6	6	100	41.720.000	-	#VALUE!	-	#VALUE!	-	#VALUE!
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1310	546	637	116,6666667	641	784	122,308892	736	936	127,173913	384.431.000	133.574.780	34,75%	166.011.508	43,18%	219.092.806	56,99%
3	3165.BDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	75335	1333	1319	98,94973743	3333	3877	116,321632	6333	10257	161,9611559	6.800.750.000	184.457.000	2,71%	924.927.900	13,60%	2.441.495.130	35,90%
4	3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	439.467.000	16.123.300	3,67%	19.967.800	4,54%	40.609.300	9,24%
5	3165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	27	6	4	66,66666667	7	5	71,4285714	9	7	77,77777778	16.177.000	-	#VALUE!	-	#VALUE!	2.040.000	12,61%
6	3165.CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	-	-	#VALUE!	-	#VALUE!	-	#VALUE!
7	3165.CAN.001 Perangkat pengolahan data dan komunikasi	12	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	-	-	#VALUE!	-	#VALUE!	-	#VALUE!
8	3165.CBV.001 Prasarana Bidang Kesehatan	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	-	-	#VALUE!	-	#VALUE!	-	#VALUE!
9	3165.PDD.001 Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	2.646.701.000	7.007.000	0,26%	20.180.480	0,76%	211.322.518	7,98%
10	3165.QCD.U02 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	7	1	1	100	2	2	100	3	4	133,3333333	866.166.000	63.036.177	7,28%	109.401.427	12,63%	178.808.667	20,64%
11	3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	17	4	4	100	6	8	133,3333333	6	8	135	88.624.000	916.000	1,03%	4.188.000	4,73%	13.997.000	15,79%
12	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	6	1	1	100	2	2	100	2	2	100	125.757.000	-	#VALUE!	-	#VALUE!	14.841.640	11,80%
13	3165.QDB.003 Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1	0	0	100	0	0	60	0	0	100	24.673.000	-	#VALUE!	-	#VALUE!	6.720.000	27,24%
14	3165.QDC.001 Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	90	90	90	100	90	90	100	90	90	100	12.960.000	800.000	6,17%	800.000	6,17%	800.000	6,17%
15	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	26	10	10	100	13	14	107,692308	16	17	106,25	43.436.000	4.240.000	9,76%	16.748.957	38,56%	21.840.576	50,28%
16	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	136	136	100	232	240	103,448276	342	336	98,24561404	622.568.000	11.720.972	1,88%	45.894.266	7,37%	206.402.708	33,15%
17	3165.QIA.002 Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1766	313	312	99,68051118	544	538	98,8970588	768	769	100,1302083	1.492.536.000	33.854.632	2,27%	194.008.189	13,00%	417.812.272	27,99%
18	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	298	65	72	110,7692308	94	113	120,212766	126	141	111,9047619	640.815.000	42.645.600	6,65%	118.904.149	18,56%	197.604.385	30,84%
19	3165.QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	36	12	12	100	20	19	95	28	28	100	58.922.000	7.313.000	12,41%	13.773.000	23,37%	37.181.000	63,10%
20	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	995	201	254	126,3681592	321	357	111,214953	441	458	103,8548753	1.155.124.000	72.627.448	6,29%	135.701.102	11,75%	305.681.627	26,46%
21	3165.RAB.001 Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	3.881.659.000	-	#VALUE!	-	#VALUE!	23.282.250	0,60%
22	6384.EBA.956 Layanan BMN	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1.098.000	-	#VALUE!	-	#VALUE!	-	#VALUE!
23	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#####	5.652.019.338	32,22%	6.838.933.141	38,99%	8.914.168.131	50,82%

B. Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	B4			B5			B6			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran					
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		B4		B5		B6	
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	86.25	100.69	116.74	86.25	94.35	109.39	86.25	96.09	111.40	1.492.536.000	6.286.000	0,42%	166.439.557	11,15%	417.812.272	
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26		4.44	#DIV/0!		11.11	#DIV/0!		15.56	#DIV/0!	12.960.000	-	0,00%	-	0,00%	800.000	
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	94.69	111.40	85.00	95.81	112.72	85.00	96.06	113.01	407.259.200	-	0,00%	22.212.641	5,45%	134.161.760	
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	61.516.800	-	0,00%	3.417.329	5,56%	20.640.271	
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	100.00	117.65	85.00	95.26	112.07	85.00	99.74	117.35	153.792.000	-	0,00%	8.543.324	5,56%	51.600.677	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.00	85.00	90.91	106.95	85.00	89.38	105.16	85.00	87.05	102.41	98.178.000	34.000	0,03%	2.773.972	2,83%	12.823.291	
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.00	88.00%	91.75	10426.26	88.00%	94.00	10682.36	88.00%	95.32	108.32	315.073.500	1.644.500	0,52%	39.662.860	12,59%	98.530.475	
		Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTIP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	99.12	123.90	80.00	99.35	124.18	80.00	99.57	124.46	315.073.500	1.644.500	0,52%	39.662.860	12,59%	98.530.475	
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	91.75	97.04	105.76	91.75	95.19	103.75	91.75	95.61	104.21	574.873.000	7.302.014	1,27%	40.091.770	6,97%	153.266.716	
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	99.59	117.17	85.00	98.88	116.33	85.00	97.37	114.56	423.198.000	7.302.014	1,73%	35.067.770	8,29%	138.125.556	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	83.48	99.03	118.63	83.48	98.32	117.78	83.48	99,24	118,88	69.543.000	-	0,00%	-	0,00%	2.009.500	
		Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57.00	19	19.05	100.25	32	30.16	94.25	44	44.44	101.01	58.922.000	7.313.000	12,41%	13.773.000	23,37%	37.181.000	
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.70	79	82.00	103.80	79	82.00	103.80	80	83.00	103.75	6.528.360.000	3.330.000	0,05%	16.503.480	0,25%	234.604.768	
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94	86,94	88.71	102.04	86,94	86.60	99.60	86.94	87.05	100.12	6.816.927.000	176.038.000	2,58%	916.508.900	13,44%	2.443.535.130	
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	25	25.00	100.00	40	50.00	125.00	40	50.00	125.00	75.274.600	366.400	0,49%	1.674.400	2,22%	5.598.800	
		Jumlah desa pangan aman	6	25	25.00	100.00	35	37.50	107.14	35	47.50	135.71	132.431.700	274.800	0,21%	1.256.400	0,95%	19.040.740	
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	25	25.00	100.00	60	60.00	100.00	80	80.00	100.00	31.347.700	274.800	0,88%	1.256.400	4,01%	10.919.100	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	B4			B5			B6			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran					
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		B4		B5		B6	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.00	40	41,67	104,17	50	57	114	60	65,67	109,44	46.436.000	4.240.000	9,13%	16.748.957	36,07%	21840576	
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72.00	55,88	55,88	100	57,65	57,65	100	58	59,41	104,43	866.166.000	27.352.059	3,16%	73.717.309	8,51%	178808667	
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	41.720.000	-	0,00%	-	0,00%	0	
8	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00		389.081.000	32.120.000	8,26%	64.556.728	16,59%	223742806	
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.50			#DIV/0!			#DIV/0!				17.855.419.000	1.264.232.960	7,08%	2.453.603.263	13,74%	8948739431	
		Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83.1			#DIV/0!			#DIV/0!				3.707.000	-	0,00%	-	0,00%	0	
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5			#DIV/0!			#DIV/0!				1.098.000	-	0,00%	-	0,00%	0	
		Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95			#DIV/0!			#DIV/0!				115.420.000	-	0,00%	1.388.000	1,20%	1388000	

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG****DETAIL INDIKATOR KINERJA DETAIL CAPAIAN RO**

No.	Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Status Konfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
1	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	AEA	001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	283,012,000	0	N	14	kegiatan	6	43.39	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Stabilized	6	42.84	100
2	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	BAH	001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	829,727,000	219,092,806	N	1310	dokumen	936	71.44	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	736	56.17	100
3	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	BDC	001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	22,282,048,000	2,441,495,130	N	75335	Orang	10257	13.62	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	6333	8.4	100
4	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	BKB	001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	3,686,000,000	40,609,300	N	1	laporan	0	50	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Stabilized	1	50	100
5	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	BMB	001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	101,728,000	2,040,000	N	27	kegiatan	7	25.91	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	9	33.32	77.76
6	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	CAB	001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	50,000,000	0	Y	1	Unit	0	0	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	0	0
7	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	CAN	001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,000,000	0	Y	12	Unit	0	0	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	0	0
8	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	CBV	001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	4,342,350,000	0	Y	4	Unit	0	0	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	0	0

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG**

9	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	PDD	001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2,646,701,000	211,322,518	N	1	Lembaga	0	44.99	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	2	Maximize	Stabilized	1	50	89.98
10	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	QCD	U02	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANDUNG	866,166,000	178,808,667	N	7	Perkara	4	57.15	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	3	42.85	100
11	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	QDB	001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	586,716,000	13,997,000	N	17	Lembaga	8	50	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	6	40	100
12	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	QDB	002	Desa Pangan Aman	916,015,000	14,841,640	N	6	Lembaga	2	47.5	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	2	35	100
13	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	QDB	003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	152,100,000	6,720,000	N	1	Lembaga	0	80	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	0	80	100
14	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	QDC	001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	99,200,000	800,000	N	90	Orang	90	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	90	100	100
15	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	QDG	001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	109,594,000	21,840,576	N	26	UMKM	17	65.67	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	16	60	100
16	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	QIA	001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	622,568,000	206,402,708	N	745	Produk	336	45.11	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	342	45.9	98.28
17	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	QIA	002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1,492,536,000	417,812,272	N	1766	Produk	769	43.55	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	768	43.48	100



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG

18	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	QIC	001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	640,815,000	197,604,385	N	298	Lembaga	141	47.31	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	126	42.28	100
19	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	QIC	003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	58,922,000	37,181,000	N	36	Lembaga	28	77.77	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	28	77.77	100
20	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	QIC	004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,155,124,000	305,681,627	N	995	Lembaga	458	46.02	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	441	44.31	100
21	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	DR	3165	RAB	001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	5,265,826,000	23,282,250	N	1	Paket	0	.44	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	0	100
22	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	WA	6384	EBA	956	Layanan BMN	8,000,000	0	N	1	Layanan	0	50	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	1	50	100
23	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	6	WA	6384	EBA	994	Layanan Perkantoran	20,095,795,000	8,914,168,131	N	1	Layanan	0	50	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	1	50	100
Total Nilai																							1,966.02		
Jumlah Output																							20		